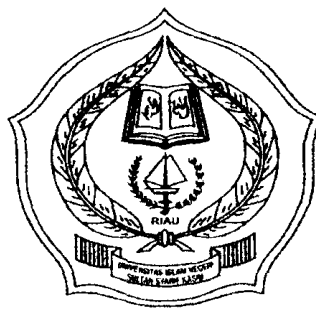


**SKRIPSI
TELAAH KRITIS TAQIYUDDIN AN NABHANI
TERHADAP DEMOKRASI**



NELLA LUCKY
10631004045

**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAKSI

Syaikh Taqiyuddin an Nabhani adalah seorang tokoh pendiri Hizbut Tahrir. Ia dilahirkan di Ijzim pada tahun 1909. Taqiyuddin mendapat pendidikan agama di rumah ayahnya, seorang Syaikh Faqih Fiddin, begitu juga dari ibunya yang menguasai ilmu Syari'ah. Syaikh Taqiyuddin banyak mendapat pengaruh dari kakek beliau, Syaikh Yusuf an Nabhani yang mempunyai hubungan erat dengan para penguasa daulah Ustmanyah saat itu. Melalui perantara kakek beliaulah, Taqiyuddin mengetahui dan mengalami langsung peristiwa- peristiwa politik yang pada masa itu kemunduran dialami oleh kaum Muslimin. Hal ini ditandai dengan runtuhnya keKhilafahan Utsmani Turki, Istanbul pada tahun 1924. Sejak runtuhnya kekhilafahan itu, maka kaum Muslimin tidak lagi memiliki seorang Khalifah yang memerintah dengan sistem pemerintahan Islam yang Kaffah. Kondisi itu digantikan dengan sistem lain yang bukan bersumber dari Islam yang kental dengan pengaruh Imperialis.

Kondisi semacam ini menggerakkan hati Taqiyuddin untuk membangkitkan kaum Muslimin dari segala keterpurukan dan keteringgalannya. Perjuangan ini diawali dengan usahanya menyadarkan Ummat Islam dengan Ceramah-ceramah dan Khutbah beliau di berbagai mesjid yang bertujuan meluruskan kembali pemikiran dan pemahaman kaum Muslimin. Upaya penyadaran itu adalah dengan mengatakan dan menyadarkan kepada kaum Muslimin bahwa mereka adalah kaum tertindas, hukum Islam dikebiri dan lain sebagainya. Perjuangan beliau semakin tampak dengan didirikannya Hizbut

Tahriri. Hizbut Tahrir yang beliau dirikan merupakan sebuah partai politik yang bertujuan melanjutkan kembali kehidupan Islam yang pernah terputus dengan tegaknya Syari'ah dibawah naungan Khilafah Islamiah.

Kekhilafahan atau Negara Islam merupakan sebuah Negara yang menerapkan Islam secara Kaffah dalam bentuk sistem pemerintahan Islam. Negara akan menjadikan Islam tidak hanya pada tataran teori belaka, akan tetapi Negara dalam Kekhilafahan Islam akan menerapkan Islam secara praktis dalam kehidupan masyarakatnya. Ketiadaan Khilafah sekarang ini menyebabkan Islam tidak bisa diterapkan secara praktis dalam kehidupan. Hukum Islam digantikan dengan Sistem-sistem lain seperti Demokrasi, yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat dan melegalkan pengambilan hukum tanpa pertimbangan Syar'i yang dasarnya adalah sekularisme, metoda pengambilan pendapatnya adalah suara mayoritas dan salah satu idenya ialah *Freedom*. Padahal Islam menghendaki pemeluknya untuk memeluk Islam secara Kaffah menetapkan perkara sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, menilai kebenaran berdasarkan nash Syar'i, bukan suara mayoritas dan Islam menyuruh pengikutnya untuk terikat dengan aturan Syari'at.

Dengan alasan inilah, menurut Taqiyuddin segala hukum yang berdasar selain Islam adalah bathil dan mencocoki hukum yang bathil tersebut dengan nash Syar'i adalah perbuatan tercela. Taqiyuddin berupaya menyadarkan ummat atas ketertindasannya dan berupaya meluruskan pemikiran dan pemahaman ummat agar mau kembali kepada pemikiran serta pemahaman Islam yang murni(Kaffah) sehingga akhirnya negeri yang di impikan, *Khilafah Islamiyah ala Minhajun Nubuwwah* akan terwujud.

Beranjak dari sinilah penulis ingin memaparkan bagaimana sesungguhnya sistem Demokrasi dan bagaimana pula Kritik yang diberikan Taqiyuddin terhadap Demokrasi tersebut.

Demikianlah Abstrak dari skripsi ini yang berjudul “ TELAAH KRITIS
TAQIYUDDIN TERHADAP DEMOKRASI”

Pembimbing

Penulis

Saleh Nur M.Ag

Nella Lucky

NIP:

NIM: 10631004045

DAFTAR ISI

Nota Dinas.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	vi
Abstraksi	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	9
C. Batasan dan Perumusan Masalah	9
D. Alasan Pemilihan Judul.....	10
E. Tujuan Kegunaan penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II. BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN NABHANI	21
A. Kehidupan Awal Taqiyuddin an Nabhani.....	21
B. Ilmu dan Pendidikan.....	23
C. Aktivitas Politik Taqiyuddin an Nabhani	28
D. Karya-Karya Taqiyuddin an Nabhani	36
E. Pemikiran- pemikiran Taqiyuddin an Nabhani.....	40
BAB III. DEMOKRASI DAN TELAAH KRITIS TAQIYUDDIN AN NABHANI	55
A. Pengertian dan Hakikat Demokrasi.....	55

B. Latar Belakang Munculnya Demokrasi.....	62
C. Kriteria Demokrasi	65
I. Asas Demokrasi	65
II. Demokrasi berdasarkan Suara Mayoritas	67
III. Jaminan Kebebasan Umum.....	69
D. Telaah Kritis Taqiyuddin an Nabhani terhadap Demokrasi	74
I. Kritik terhadap Pengertian Demokrasi.....	77
II. Kritik terhadap Latar Belakang kemunculan Demokrasi yang merupakan Aqidah Demokrasi	87
III. Kritik terhadap Suara Mayoritas dalam Demorkasi.....	91
IV. Kritik terhadap ide Kebebasan dalam Demokrasi	98
BAB IV. ANALISIS	106
BAB V. A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR KEPUSTAKAAN	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT Maha Kuasa menuntut agar ummat manusia menyembah semata-mata hanya kepadaNya.¹Ini berarti bahwa ummat manusia wajib mengambil nilai-nilai, dan hukum berdasarkan hukum Allah yakni dari Alqur'an dan Sunnah Rasulullah. Allah juga telah menurunkan risalah Islam. Dia menjadikan risalah tersebut berdiri di atas landasan aqidah Tauhid, yaitu, *Aqidah Lailahaillallah Muhammadarrasulullah*.²

Islam adalah agama yang sempurna, demikian juga Islam adalah sistem yang sempurna. Di dalamnya terdapat aturan yang mengatur bentuk interaksi antar ummat manusia.³ Islam juga merupakan risalah yang paripurna dan universal. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan, serta hubungan antara kehidupan itu dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Ia juga memecahkan seluruh masalah manusia.

Islam juga telah membawa corak pemikiran yang khas yang dapat melahirkan sebuah peradaban yang berbeda dengan peradaban manapun,

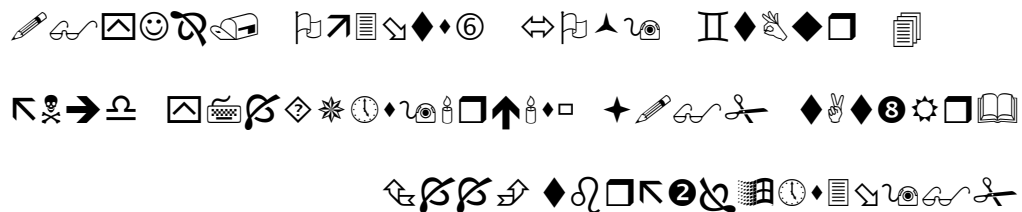
¹Anonim, *Khilafah is The Answer*, terj Abu Faiz, *Khilafah adalah Solusinya*, Pustaka Thoriqul Izzah, Bogor, 2003, hlm. 11.

²Abdul Qadim Zallum, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, terj Maghfur, *Sistem Pemerintahan Islam*, Al izzah, Bangil, 2002, hlm. 1.

³Muhammad Husein Abdullah, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*, Pustaka Thoriqul Izzah, Bogor, 2002, hlm.117.

melahirkan kumpulan konsepsi kehidupan, membuat perasaan para penganutnya mendarah daging dengan corak peradabannya.⁴

Dengan demikian, Islam adalah agama yang komprehensif bagi kehidupan manusia, mengandung nilai-nilai dan hukum berdasarkan hukum Allah. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang berhak menetapkan dan membuat hukum selain hukum Allah. Sedangkan keta'atan di dalam hukum adalah termasuk ibadah yang harus diatuhidkan untuk Allah semata. Jika tidak, seseorang menjadi musyrik bersama orang-orang binasa.



*“Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.*⁵

Dalam ayat tersebut jelas bahwa hukum harus bersumber dari Allah yang termanifestasi dalam syari'atNya. Dengan demikian, dilarang mengambil bahkan menggunakan hukum selain hukum Allah.

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pula perkembangan pemikiran, terutama dari Barat yang melahirkan berbagai ide demi kelangsungan hidup manusia yang berupa pandangan hidup, sistem dan lain sebagainya. Ide tersebut ada yang sesuai dengan Islam dan ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Diantara ide tersebut adalah sistem Demokrasi.

⁴Abdul Qadim Zallum, *Op. Cit.*, hlm 2.

⁵QS. al Maidah: 44.

Kata demokrasi tidak dapat dilepaskan dari wacana politik apapun, baik dalam konteks mendukung, setengah mendukung atau menentang. Banyak orang yang menjadikan demokrasi sebagai sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupannya. Masing-masing mereka telah merumuskan makna demokrasi dan mengaitkan dengan Akidah yang diyakini. Akibatnya, pengertian demokrasi menjadi beragam. Banyak dari ulama menerapkan pemikiran Barat terhadap hukum-hukum syari'at dalam hal demokrasi, seperti yang mereka katakan bahwa : “*Syuro* adalah jiwa dan asal demokrasi” dan “*Islam adalah bapak dari demokrasi*”⁶

Dalam beberapa kondisi, demokrasi telah menyimpang dari makna dasar yang telah ditetapkan sejak awal istilah ini dibuat. Menjadi sebuah keharusan untuk mengetahui seluruh makna dan pengertian yang dikaitkan dengan demokrasi, baik makna yang diberikan oleh pemilik kata itu sendiri atau makna lain yang diberikan kepadanya, atau yang digunakan manusia untuk memaknainya.

Demokrasi lahir dilatarbelakangi oleh keberadaan para penguasa di Eropa yang mengklaim bahwa seorang penguasa adalah wakil Tuhan di Bumi dan berhak memerintah rakyat berdasarkan kekuasaannya.⁷ Mereka beranggapan bahwa Tuhan telah memberi kewenangan untuk membuat hukum dan menerapkannya.⁸ Dengan kata lain, seorang penguasa dianggap memiliki kewenangan mutlak untuk memerintah rakyat dengan peraturan yang

⁶Mushthafa asy-Syaka-ah, *Islam bi la mazhab*, hlm. 38, dinukil dari Mahmud al Khalidi, *Kaidah pokok Sitem Pemerintahan Islam*. hlm.xi.

⁷Abdul Qadim Zallum, *Ad-Dimuktatayah Nizham al Kufur*. Terj Shiddiq al Jawi, *Demokrasi Sistem Kufur*, Pustaka Thariqul izzah, Bogor, cet V,2008, hlm. 2.

⁸*Ibid.*

dibuatnya sendiri, karena kekuasaan mereka berpijak pada kekuasaan yang bersumber dari Tuhan, dan bukan dari rakyat, akibatnya mereka secara leluasa menzalimi dan menguasai rakyat.

Kemudian timbullah konflik antara penguasa Eropa dan rakyatnya. Keadaan semacam ini membangkitkan kesadaran para filosof dan pemikir. Mereka mulai membahas masalah pemerintahan dan menyusun konsep sistem pemerintahan rakyat yaitu sistem Demokrasi.⁹ Sistem ini menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan, sementara penguasa mengambil kekuasaannya dari rakyat sebagai sumber kedaulatan.¹⁰ Rakyat dipandang sebagai pemilik kehendak yang melaksanakan sendiri kehendaknya dan menjalankan sesuai dengan keinginannya. Artinya tidak ada satu kekuasaanpun yang berkuasa atas rakyat. Rakyatlah yang membuat peraturan yang akan mereka terapkan serta menjalankannya sesuai dengan keinginannya. Rakyat pula yang berhak mengangkat penguasa dalam posisinya sebagai wakil mereka untuk memerintah mereka dengan peraturan yang juga dibuat oleh mereka.

Dalam hal ini terlihat bahwa, sumber kemunculan demokrasi seluruhnya adalah manusia.¹¹

Dari segi defenisi, kata ini berasal dari bahasa Yunani. Demokrasi tersusun dari dua kata, *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *kratos*, yang Kedaulatan.¹² Rakyat yang menetapkan Undang-Undang dalam sistem kehidupannya. Rakyat yang memilih penguasa dan rakyat pula

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.* hlm. 3.

¹²Tim ICCE UIN JAKARTA, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 110.

yang mengharuskan penguasa untuk menerapkan sistem dan perundang-undangan tersebut.

Dengan demikian, makna demokrasi sebagai dasar hidup masyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karna kebijakan tersebut akan menentukan nasib hidup rakyat.¹³

Demokrasi mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas dimana suara mayoritas tersebut selalu menjadi ukuran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat tidak mungkin semuanya duduk di pemerintahan. Karna itu wajar, muncul konsep perwakilan rakyat. Lembaga inilah yang disebut dengan dewan perwakilan. Dalam sistem demokrasi dewan perwakilan diklaim merupakan representasi dari kehendak umum mayoritas rakyat. Dewan ini kemudian memilih pemerintah dan kepala negara yang akan menjadi kepala negara yang akan menjadi penguasa sekaligus wakil rakyat dalam pelaksanaan kehendak umum rakyat. Kepala negara mengambil kekuasaan dari rakyat yang telah memilihnya dan ia memerintah rakyat dengan peraturan dan undang-undang yang dibuat atas nama rakyat. Dengan demikian rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara mutlak, rakyatlah yang berhak menetapkan undang-undang dan rakyat pula yang memilih penguasa yang akan melaksanakan undang-undang itu.

¹³ *Ibid.*

Demokrasi juga menghendaki adanya kebebasan umum bagi rakyat agar rakyat dapat dapat melaksanakan kedaulatan dan kehendaknya sendiri secara sempurna. Kebebasan umum ini berlaku pada setiap individu rakyat. Dengan begitu rakyat akan dapat mewujudkan kedaulatannya, sekaligus merealisasikan dan menjalankan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dan tekanan. Kebebasan individu yang bersifat umum itu tampak dalam 4 aspek: *Kebebasan beragama, Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Kepemilikan dan Kebebasan Berprilaku*.¹⁴

Taqiyuddin, mengkritik penuh Demokrasi dan menyatakan dengan tegas bahwa Demokrasi murni bertentangan dengan Islam baik dari segi sumber kemunculannya, Aqidah yang melahirkannya, asas yang mendasarinya, serta berbagai ide dan aturan yang dihasilkannya.¹⁵

Menurut Taqiyuddin sistem pemerintahan Islam berdiri di atas pilar Aqidah Islam. Kedaulatannya ditangan syara', bukan di tangan ummat. Dalam hal ini, baik ummat maupun khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri. Yang berhak membuat aturan adalah Allah SWT. Sedangkan Khalifah hanya berhak mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan sebagai Undang-Undang dasar serta perundang-undangan dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Begitu pula ummat tidak berhak memecat Khalifah. Khalifah tidak akan dipecat kecuali Khalifah melanggar hukum syara'. Akan tetapi ummat tetap berhak untuk mengangkatnya. Sebab agama Islam telah meletakkan kekuasaanya di

¹⁴ Abdul Qadim Zallum, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 1.

tangan ummat sehingga ummat berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dengan bai'at, untuk menjadi wakil mereka.¹⁶

Dalam upaya mengambil keputusan, demokrasi menghendaki adanya suara mayoritas. Menurut Taqiyuddin an Nabhani kriteria penentuan hukum tidak tergantung pada pendapat mayoritas dan minoritas melainkan pada nash-nash syariat. Sebab, yang menjadi *musyarri'* hanyalah Allah, bukan ummat. Untuk menyelesaikan permasalahan umum di tengah-tengah ummat selalu menggantinya dari hukum syara'. Banyak hal yang perlu dipersoalkan dalam masalah ini. Dan yang lebih penting untuk dipersoalkan ialah apakah suara mayoritas itu mutlak benar? Jika tidak, bagaimana jika suara mayoritas itu benar? Apakah hal ini bertentangan dengan Islam

Demokrasi, yang juga terkait dengan kebebasan, Islam tidak menghendaki adanya kebebasan, apalagi membiarkan individu untuk membuat hukum dan menetapkan sesuatu dengan hawa nafsunya . Paparan masalah yang penulis utarakan di atas hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah yang ada, terutama dalam konsep demokrasi dan ada banyak hal lain lagi yang perlu dituntaskan dan diluruskan terkait dalam hal demokrasi.

Berangkat dari kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana penolakan Taqiyuddin an Nabhani terhadap Demokrasi. Penulis merasa perlu memaparkan bagaimana Taqiyuddin an Nabhani menelaah dan memberikan kritisi penuh terhadap konsep Demokrasi dalam

¹⁶Syabab HT, *The Method to Re- Establish the Khilafah*, terj Ramadhan Adi, *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2004, hlm. 52-55.

bentuk skripsi sekaligus mencoba memberikan penyelesaian(*Problem Solving*). Berkenaan dengan itu, maka penulis memberi judul:

**‘TELAAH KRITIS TAQIYUDDIN AN NABHANI TERHADAP
DEMOKRASI’**

B. Penegasan istilah

Untuk menghindari kesulitan dan kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan penegasan istilah, yaitu :

Kritis : Proses untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi. Informasi tersebut bisa di dapatkan dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat atau komunikasi.¹⁷

Taqiyuddin :Beliau adalah Pendiri Hizbut Tahrir yang berarti Partai Pembebasan yang berupaya berjuang untuk menegakkan kembali Negara Khilafah.

Demokrasi : Keadaan Negara dimana sistem pemerintahnya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹⁸

Dengan demikian yang penulis maksudkan dengan judul “Telaah Kritis Taqiyuddin an Nabhani Terhadap Demokrasi” ialah suatu penelitian yang memaparkan penolakan Taqiyuddin an Nabhani terhadap demokrasi.

¹⁷ <http://wordpress.com>

¹⁸ TIM ICCE UIN JAKARTA, *Op. Cit.*, hlm. 110.

C. Batasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana konsep Demokrasi dan bagaimana pula telaah kritis Taqiyuddin an Nabhani terhadap Demokrasi.

D. Alasan Pemilihan Judul

1. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab runtuhnya moral Islam, terutama adanya anggapan bahwa agama Islam adalah agama yang tertindas serta peradaban Barat adalah karna ummat Islam meninggalkan hukumnya dan mengadopsi hukum yang bukan berasal dari hukum Islam. Ditambah lagi masyarakat tidak menyadari bahwa barat hendak membius masyarakat Islam dengan menghadirkan konsep-konsep pemikiranya terutama mengenai demokrasi terhadap masyarakat Islam yang telah meracuni pemikiran ummat Islam serta mengkultuskan dan mendukung Demokrasi secara penuh. Untuk itu, penulis merasa hal ini perlu dituntaskan dan dicari kebenarannya terutama mengenai bagaimana sebenarnya sistem demokrasi dan bagaimana pula pertentangannya dengan konsep Islam, khususnya menurut Taqiyuddin an Nabhani.
2. Pembahasan yang terkandung oleh judul penelitian ini relevan dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni, yakni Fakultas Ushuluddin, jurusan Aqidah Filsafat.

3. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis berharap bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi utama dalam segala bidang kajian keilmuan Islam terutama dalam hal yang berkaitan dengan Demokrasi dalam kaitannya dengan Islam, khususnya yang dibahas dalam skripsi ini.
4. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada studi yang dilakukan terhadap permasalahan ini, khususnya dalam bentuk skripsi.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk :

- A. Memahami Demokrasi serta mengetahui kelemahan dan keburukan Demokrasi .
- B. Mengetahui bagaimana penolakan dan kritik Taqiyuddin an Nabhani terhadap Demokrasi.

2. Kegunaan Penelitian

- A. Menambah Khazanah ilmiah berkaitan dengan Demokrasi dengan segala kelemahannya.
- B. Menambah wawasan mengenai pertentangan konsep Demokrasi dalam Islam, khususnya mengetahui bagaimana penolakan Taqiyuddin terhadap Demokrasi.
- C. Syarat kelulusan pada jurusan Aqidah Filsafat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan penelitian yang membahas tentang telaah kirtis Taqiyuddin an Nabhani terhadap Demokrasi.

Namun dalam perkembangannya memang banyak para ilmuwan yang berkomentar dan mengadakan penelitian tentang demokrasi, ada yang secara penuh mendukung dan bahkan mengkultuskan demokrasi, serta ada pula yang menentang Demokrasi tetapi mempropagandakannya dengan hakikat *syura* dan lain sebagainya dan beranggapan bahwa demokrasi tidak seluruhnya berasal tidak sesuai dengan Islam.

Syeikh Muhammad Ibrahim salah seorang ulama pakar mantap mufti Negara Saudi Arabia dalam bukunya *Tahkiem al Qawaen* juga menjelaskan mengenai pengambilan hukum yang juga ada kaitannya dengan Demokrasi, karna Demokrasi juga berkaitan dengan metode dan sistem pengambilan dan penetapan hukum. Dalam buku itu beliau juga menjeaskan bahwa ada 6 golongan penguasa kafir terang-terangan yang mana hal ini terkait dengan Demokrasi.¹⁹

Yusuf Qardawi dalam bukunya *Fikih Daulah* juga berbicara mengenai Demokrasi. Beliau menjelaskan bahwa Demokrasi tidak bertentangan dalam

¹⁹Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Tahkiem al Qawaen*, dikutip dari, Syaikh Muhammad Aman, bin Ali al Jamie, *Haqiqatu al Dimiqratiyyati wa Annaha Laisat min al Islam*, terj Saiful Islam, *Demokrasi Murni Bukan ajaran dari Islam*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 55-60.

Islam. Pasalnya, menurutnya substansi Demokrasi adalah hak rakyat untuk memilih penguasa dan itu ada dalam Islam.²⁰ Beliau juga mengatakan:

*“Demokrasi mencakup kebebasan-kebebasan dan metode-metode untuk meruntuhkan para penguasa yang tirani, demokrasi juga adalah siyasah syar’iyah yang pembahasannya sangat luas dalam fiqih Islam. Demokrasi dan syura adalah dua sisi mata uang yang tidak mungkin pisah.”*²¹

Anwar an Jundi dalam kitabnya *Sumum al Istisyaq wa al Mustasyriqun fi al Ulm al Islamiyah*, ia menyatakan bahwa Pemikiran politik Islam berbeda dengan pemikiran Demokrasi Barat, diantaranya Karena kedaulatan dalam pemikiran politik Islam bukanlah di tangan Ummat, seperti sistem Demokrasi, juga bukan di tangan kepala Negara, seperti sistem kediktatoran, melainkan ada dalam penerapan syari’ah Islam. dengan demikian-menurutnya- sistem politik Islam sangat jauh berbeda dengan sistem apapun yang telah menyimpang itu.²²

Syaikh Abu Muhammad Ashim Al Maqdisi dalam bukunya *Agama dan Demokrasi* juga mengupas tuntas mengenai kekurangan dan pertentangannya dengan Islam secara gamblang.

Muhammad Yusuf Musa. Dalam kitabnya *Nizham al Hukm fil Islam*, iya menyatakan bahwa sesungguhnya sistem pemerintahan Islam bukanlah

²⁰Yusuf Qardawi, *Fiqh Daulah*, dikutip dari, dari al Wa’ie, *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Demokrasi Sistem Kufur*, No 24 Tahun IX,1-30 April 2009, hlm. 14.

²¹Harian *Asy Syarq* edisi 2719, 25 Agustus 1995 M, dikutip dari, [http://salafi. Or.id](http://salafi.or.id).

²²Anwar an Jundi, *Sumum al Istisyaq wa al Mustasyriqun fi al Ulm al Islamiyah*, hlm 96, dikutip dari, Farid Wadjiji & Shiddiq al Jawi *et.al, Ilusi Negara Demokrasi*, al Azhar Press, Bogor, 2009.hlm.303.

sistem demokrasi, baik dalam pengertiannya menurut kaum Yunani kuno, maupun dalam pengertiannya yang modern.²³

Abu al A'la al Maududi salah satu kitab yang membuat suatu konsep politiknya ialah *Nadlariyat al Islam al Siyasah*, dalam kitab ini beliau menjelaskan bentuk Negara teodemokrasi (bentuk demokrasi berdasarkan agama Allah) menjelaskan dan mengaitkan demokrasi dengan Agama Allah.²⁴

Muhammad Imarah dalam bukunya *Perang Termonologi Islam Versus Barat* tahun 1998, menjelaskan sistem Demokrasi tidak mengenal batasan- batasan Ilahiah tentang kewenangan operasional, sistem *syura* Islam memiliki kelebihan antara dua wilayah urusan : Urusan yang menjadi wewenang Allah, yakni hak mengurus hanyalah wewenang Allah dan urusan yang menjadi hak wewenang manusia yakni hak mengurus yang menjadi kesanggupan manusia dan di dalam wewenangnya inilah merupakan kewajiban *syura*.²⁵ Dalam buku tersebut beliau juga berusaha mengaitkan *syuro* dan demokrasi. Secara ringkas, beliau menandakan bahwa *syuro* dan Demokasi menemukan titik temu dan titik pisah sekaligus.

Di antara para peneliti demokrasi dan termasuk pecinta demokrasi adalah Emha Ainun Najib, dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi la raiba fih* tahun 2009 :

²³Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al Hukm fi al-Islam*, hlm. 245, dikutip dari al Wa'ie, *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Demokrasi Sistem Kufur*, No 24 Tahun IX, 1-30 April 2009, hlm. 18.

²⁴Abul a'la al-Maududi, *Nazdariyah al Islam as Siyasah*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1991, terj, hlm. 39-41.

²⁵Muhammad 'Imarah, *Ma'rakatul baina al Gharbi wal Islami*, terj Musthalah Maufur, *Perang Terminology Islam versus Barat*, Rabbani Press, Jakarta, 1998, hlm. 183.

Peran utama demokrasi adalah rakyat, menurut beliau, rakyat pasti benar. Sehingga bisa secara mantap diambil kesimpulan bahwa yang menanglah yang benar, alias yang benar adalah yang menang. Kebenaran adalah kemenangan. Yang menang selalu benar, yang kalah selalu salah. Yang menang pasti benar, yang kalah pasti salah.

.....
Kebenaran rakyat adaah puncak Demokrasi. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sebagaimana Tuhan tidak perlu dipertanyakan, maka rakyatpun demikian . Rakyat tidak bias salah. Pilihan rakyat tidak insyaAllhah baik dan benar. Kalau tidak setuju pada ini silahkan keluar dari rumah Agung Demokrasi.²⁶

Di negeriku, fungsi Tuhan, nabi dan Rasul dan Agama sudah di Recover. Di Replace. Sudah secara efektif dan efisien digantikan oleh berbagai institusi kenegaraan. Warga Negara tidak perlu membuang-buang waktu untuk berinteraksi dengan Tuhan yang toh mustahil untuk benar-benar dikenali, tidak perlu sia-sia mewawancarai nabi-nabi dan rasul-rasul yang terletak terlalu jauh di belakanzaman. Demokrasi dengan sejumlah perangkatnya sudah sangat cukup untuk menggantikan mereka semua.²⁷

Abdul Qadim Zallum yang juga merupakan murid dari Taqiyuddin an Nabhani dalam bukunya *Pemikiran Politik Islam* juga mengupas mengenai konsep-konsep politik termasuk Demokrasi serta bagaimana pula pandangan Islam terhadap Demokrasi. Dalam buku itu beliau mengupas mengenai bagaimana pertentangan Demokrasi dan Islam secara kongrit dan lugas.

Terkait dengan penelitian terhadap Taqiyuddin an Nabhani, memang telah ada yang meneliti dalam bentuk skripsi, akan tetapi dalam pembahasan yang berbeda, yaitu *Bai'at Perspektif Taqiyuddin an Nabhani*, oleh Mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Edi Sabara Manik. Dalam tulisan itu beliau memaparkan bagaimana bai'at dijadikan sebagai satu-satunya metode untuk mengangkat seorang

²⁶ Emha Ainun Najib, *Op. Cit.*, hlm. 22-26.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 55-56.

Khalifah(Kepala Negara) dalam sistem pemerintahan Islam.²⁸ Masih terkait dengan Taqiyuddin an Nabhani, Muhammad Ayyub juga Mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin, UIN Suska Riau, beliau juga telah melakukan penelitiannya terhadap tokoh tersebut, dalam sebuah pembahasan yang berjudul, *Qadha dan Qadar Perspektif Taqiyuddin an Nabhani*. Dalam penelitiannya beliau memaparkan mengenai konsep Qadha dan Qadar perspektif Taqiyuddin an Nabhani. Namun hingga saat ini belum ada yang melakukan penelitian mengenai telaah kritis Taqiyuddin an Nabhani terhadap Demokrasi .

Bagi Taqiyuddin an Nabhani, yang memberikan konsep sistem pemerintahan Islam, dan ingin mendirikan kembali Negara Khilafah, beliau mengatakan bahwa sistem Pemerintahan Islam bukan sistem Demokrasi menurut pengertian hakiki Demokrasi. Kedaulatan dalam Islam bukan di tangan ummat melainkan di tangan syara', dan kekuasaan berada di tangan ummat. Ringkasnya beliau mengatakan bahwa Demokrasi adalah sistem kufur. Bukan karena demokrasi berbicara tentang pemilihan penguasa, sehingga hal itu bukan masalah mendasar. Tetapi perkara yang mendasar dalam Demokrasi adalah menjadikan kewenangan membuat hukum berada di tangan manusia, bukan di tangan Allah. ²⁹

Dalam dunia Islam, nama Taqiyuddin memang belum mempunyai pengaruh yang besar, apakah di kalangan keulamaan, maupun

²⁸ Edi Sabara Manik, *Bai'at Perspektif Taqiyuddin an Nabhani*,. Skripsi Sarjana. Riau, UIN SUSKA RIAU, 2004, hlm. 1-119.

²⁹Taqiyuddin an Nabhani, *Struktur Negara Khilafah*, HTI Press, Jakarta, 2008, hlm. 22-27.

kecendikiawanan karena mayoritas dari mereka cenderung menyembunyikan pengaruh An Nabhani.³⁰ Walau demikian gerakan yang didirikannya, Hizbut Tahrir menjadi pergerakan yang diperhitungkan oleh dunia Internasional, apakah oleh Negara-negara Barat maupun negeri-negeri Muslim. Seorang tokoh dari Jepang, Prof Dr. Hasan Konakata menyampaikan; bahwa sesungguhnya an Nabhani merupakan tokoh penting yang sering dilupakan orang, padahal (menurutnya) Syeikh Taqiyuddin an Nabhani merupakan tokoh peletak dasar Ilmu Ekonomi Islam karena beliau adalah yang pertama kali menulis buku *an Nidzam al Iqtishadi fi al Islam* sekitar tahun 1950, Muhammad Baqir al Shadr (Ulama Syi'ah Iran) sendiri menulis bukunya yang terkenal *Iqtishaduna* baru pada tahun 1961. Disamping itu pada tahun 1950, Taqiyuddin an Nabhani telah menulis buku *Nidzam al Islam*, yang di dalamnya memuat Konstitusi Islam (Ad Dustur Islam). Rancangan Konstitusi itu belum pernah ada sebelumnya, kecuali pada akhir tahun 1970-an atau awal 80-an oleh Al Ikhwanul Muslimin, Al azhar dan Revolusi Islam Iran.

Namun demikian, mereka semua (para pemikir Islam) dan para pemikir Barat sepakat bahwa demokrasi adalah suatu sistem yang meletakkan kedaulatan di tangan Rakyat.

Dalam bukunya *Struktur Negara Khilafah* menjelaskan bahwa Khilafah Islam yang ingin kembali ditegakkannya beliau menjelaskan bahwa

³⁰ Al wa'ie, *Media Politik dan Dakwah; Membangun kesaan Ummat; Menyaoal listrik mahal*, no 68 Tahun. VI, 1-30 April. Hlm. 57-61. Hal ini dilakukan karena memang pemerintah Yordania Negara-negara Arab melarang HT dan menangkap aktivis HT, sehingga untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan an Nabhani dan HT. para aktivis, ulama dan Masyarakat sekitarnya cenderung merahasiakan keberadaanya. Lihat juga Ihsan Smarah, Syaikh Taqiyuddin an Nabhani ; *Meneropong perjalanan spiritual dan dakwahnya*, Al Azhar Press, Bogor, 2003.

sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang unik yang berbeda dengan sistem lain, termasuk Demokrasi.

Seiring dengan cita-citanya yang ingin melanjutkan kehidupan Islam dalam bentuk sistem pemerintahan Islam, maka hal yang wajar bila beliau menolak sistem-sistem selain Islam, termasuk sistem Demokrasi. Oleh sebab itu kajian ini berusaha menggambarkan secara sistematis dan lengkap bagaimana telaah kritis Taqiyuddin an Nabhani terhadap Demokrasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis laksanakan adalah penelitian pustaka(*Library Research*)³¹yaitu penelitian yang objek utamanya ialah buku-buku dan literatur-literatur lainnya.

2. Sumber penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber, yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder³². Sumber primer terdiri dari buku-buku Taqiyuddin an Nabhani seperti : Struktur Negara Khilafah, Daulah Islam, Mafahim Hizbut Tahrir, Sistem Pergaulan dalam Islam, Kepribadian Islam, Sistem Pemerintahan Islam dan kitab-kitab karya an Nabhani lainnya yang berkaitan dengan sistem Khilafah dan Pemerintahan serta politik dalam Islam. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari buku-

³¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, hlm. 3.

³²Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama atau buku yang dikarang langsung oleh sang tokoh. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber-sumber yang mendukung sumber primer. Lihat: Winarno Ahmad, *Dasar dan Tehnik Riset*, Tarsito, Bandung, 1978, hlm. 125.

buku teori politik dan teori politik Islam yang berhubungan dengan demokrasi, dan sistem pemerintahan maupun pemerintahan Islam yang dikarang oleh para tokoh politik Islam seperti Mengadili Demokrasi(Hafizh Shalih), Ilusi Negara Demokrasi, (Faridh Wajdi & Shiddiq al Jawi et .al), Demokrasi sistem Kufur(Abdul Qadim Zallum), serta buku-buku dan majalah, bulletin Media Ummat, al Wa'ie yang berkaitan dengan judul ini dan masih relevan dengan maksud penelitian ini. Serta penulis juga berusaha mengikuti seminar-seminar dan wawancara dengan para kader Hizbut Tahrir dan yang lainnya yang berkaitan dengan judul guna mendukung proses penulisan.

3. Teknik Pengumpulan data.

Langkah awal yang ditempuh guna memperoleh data adalah dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan demokrasi dan literatur mengenai penolakan Taqiyuddin an Nabhani tentang Demokrasi, baik berupa buku, naskah serta informasi lainnya. Data terkumpul lalu ditelaah dan diteliti untuk selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan keperluan pembahasan ini. Selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga menjadi suatu kerangka yang jelas dan mudah difahami untuk diberikan analisa.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul diolah sehingga membentuk satu keruntutan dan kesatuan gagasan. Setelah itu data terkumpul dan dianalisa dengan

menggunakan metode analisis.³³ Dalam menganalisa penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu cara penelitian dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual masa sekarang.³⁴ Sebagai tambahan tokoh lain juga sedikit penulis paparkan, hanya untuk melengkapi tulisan ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisannya dalam lima bab dengan sub-sub dalam masing-masing bab.

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, alasan pemilihan judul, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI, yang berisikan riwayat hidup Taqiyuddin an Nabhani dan karya-karya serta Pemikiran Taqiyuddin an Nabhani.

BAB III : TELAAH KRITIS TAQIYUDDIN an NABHANI TERHADAP DEMOKRASI, yang berisikan sumber kemunculan, akidah yang melahirkannya, asas yang mendasarinya, serta berbagai ide dan aturan yang dihasilkannya

³³Metode analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti, atau cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat : Sudarto, *Metodologi penelitian Filsafat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 59.

³⁴Wasti Soemanto, *Pedoman Skripsi Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 15

serta bagaimana Kritik Taqiyuddin terhadap keseluruhan konsep tersebut.

BAB IV : ANALISIS

BAB V : PENUTUP, yang merupakan hasil kajian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA.

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Muhammad Husein, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*, Bogor, Pustaka Thoriqul Izzah, 2002.

Ahmad Winarno, *Dasar dan Tehnik Riset*, Bandung. Tarsito, 1978

An-Nabhani Taqiyuddin, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Bogor, Thariqul Izzah, 2001.

An-Nabhani Taqiyuddin, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin sejarah dan relaitas empiric*, Bangil, Al izzah, Cet 1, 2002.

An-Nabhani Taqiyuddin, *Struktur Negara Khilafah*, Jakarta, Hizbut Tahrir Indonesia, 2006

Belhaj Ali, *Menegakkan kembali Negara Khilafah*, Bogor, Pustaka Thoriqqul Izzah, 2001,

Faiz Abu, *Khilafah adalah Solusinya*, Bogor, Pustaka Thoriqul Izzah, 2003.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta, Andi Offset, 1995.

Hawa Said, *Al Islam*, II, cet I, Jakarta, Al I'tisom Cahaya Umat, 2002) cet I terj.

Hizbut Tahrir Indonesia, *Dari Masjid al- Aqhsha menuju Khilafah*, HTI Press, 2006.

Shariati Ali, *Tugas Cendikiawan Muslim*, Jakarta, Srigunting, 1996.

Syabab HT, *Bagaimana membangun kembali Negara Khilafah*, Bogor, Thariqul Izzah, 2004.

Syukur Amin, *Zuhud di abad Modern*, Yogyakarta, 2004,

[www. bahrulfikri.wordpress.com](http://www.bahrulfikri.wordpress.com)

[www. belajarislam.com](http://www.belajarislam.com)

Yunus Mahmud, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta, PT Hidakarya Agung, 1972.

Zallum Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil, Al izzah, 2002.

BAB II

BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI

A. Kehidupan Taqiyuddin An-Nabhani dan Karya-Karyanya

1. Silsilah dan Pendidikan Taqiyuddin An-Nabhani

Nama Syaikh Taqiyuddin an Nabhani (1909-1979M), ia dilahirkan di Ijzim, sebuah kampung di daerah Ahifa Palestina. Mendapat pendidikan dikampung haamannya, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Al Azhar dan Darul Ulu, Kairo, beliau pernah menjadi dosen dan hakim di beberapa kota di Palestina. Setelah peristiwa 1948, ia dan keluarga meninggalkan kampung Ghalaman menuju Beirut, kemudian diangkat menjadi anggota Mahkamah Banding Bait al Maqdis (Yerusalem) ia juga pernah menjadi dosen Islamic College di Yaman.

Tahun 1952, Taqiyuddin an Nabhani mendirikan parainya. Dengan konsentrasi penuh mendirikan partai, menerbitkan brosur-brosur yang secara keseluruhan merupakan sumber pengetahuan pokok partai. Dia hidup berpindah pindah antara Yordania, Suriah dan Libanon. Ia kemudian wafat dan dimakamkan di Beirut. Amat sulit mengenal tokoh-tokoh pemimpin partai yang terkemuka dikarenakan aktivitasnya yang sangat rahasia. Sepeninggal an Nabhani, hisb dipimpin oleh Abdul Qadim Zallum, kelahiran Palestina, penulis buku *Hakaz al Hudimat al Khilafah*

ABSTRAKSI

Syaikh Taqiyuddin an Nabhani adalah seorang tokoh pendiri Hizbut Tahrir. Ia dilahirkan di Ijzim pada tahun 1909. Taqiyuddin mendapat pendidikan agama di rumah ayah beliau, seorang Syaikh Faqih Fiddin, begitu juga dari ibu beliau yang menguasai ilmu Syari'ah. Syaikh Taqiyuddin banyak mendapat pengaruh dari kakek beliau, Syaikh Yusuf an Nabhani yang mempunyai hubungan erat dengan para penguasa daulah Ustmaniyah saat itu. Melalui perantara kakek beliaulah, Taqiyuddin an Nabhani mengetahui dan mengalami langsung peristiwa-peristiwa politik yang pada masa itu kemunduran dialami oleh kaum Muslimin. Hal ini ditandai dengan runtuhnya keKhilafahan Utsmani Turki, Istanbul pada tahun 1924. Sejak runtuhnya keKhilafahan itu, maka kaum Muslimin tidak lagi memiliki seorang Khalifah yang memerintah dengan sistem pemerintahan Islam yang Kaffah. Kondisi itu digantikan dengan sistem lain yang bukan bersumber dari Islam melalui serangan Imperialisme pemikiran oleh para penjajah kafir Barat.

Kondisi semacam ini menggerakkan hati Taqiyuddin untuk membangkitkan kaum Muslimin dari segala keterpurukan dan keteringgalannya. Perjuangan ini diawali dengan usahanya menyadarkan Ummat Islam dengan Ceramah-ceramah dan Khutbah beliau di berbagai mesjid yang bertujuan meluruskan kembali pemikiran dan pemahaman kaum Muslimin. Upaya penyadaran itu adalah dengan mengatakan dan menyadarkan kepada kaum Muslimin bahwa mereka adalah kaum tertindas, hukum Islam dikebiri dan lain sebagainya. Perjuangan beliau semakin tampak dengan didirikannya Hizbut

Tahriri. Hizbut Tahrir yang beliau dirikan merupakan sebuah partai politik yang bertujuan melanjutkan kembali kehidupan Islam yang pernah terputus dengan tegaknya Syari'ah dibawah naungan Khilafah Islamiah.

Kekhilafahan atau Negara Islam merupakan sebuah Negara yang menerapkan Islam secara Kaffah dalam bentuk sistem pemerintahan Islam. Negara akan menjadikan Islam tidak hanya pada tataran teori belaka, akan tetapi Negara dalam Kekhilafahan Islam akan menerapkan Islam secara praktis dalam kehidupan masyarakatnya. Ketiadaan Khilafah sekarang ini menyebabkan Islam tidak bisa diterapkan secara praktis dalam kehidupan. Hukum Islam digantikan dengan Sistem-sistem lain seperti Demokrasi, yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat dan melegalkan pengambilan hukum tanpa pertimbangan Syar'i yang dasarnya adalah sekularisme, metoda pengambilan pendapatnya adalah suara mayoritas dan salah satu idenya ialah *Freedom*. Padahal Islam menghendaki pemeluknya untuk memeluk Islam secara Kaffah menetapkan perkara sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, menilai kebenaran berdasarkan nash Syar'i, bukan suara mayoritas dan Islam menyuruh pengikutnya untuk terikat dengan aturan Syari'at.

Dengan alasan inilah, menurut Taqiyuddin segala hukum yang berdasar selain Islam adalah bathil dan mencocoki hukum yang bathil tersebut dengan nash Syar'i adalah perbuatan tercela. Taqiyuddin berupaya menyadarkan ummat atas ketertindasannya dan berupaya meluruskan pemikiran dan pemahaman ummat agar mau kembali kepada pemikiran serta pemahaman Islam yang murni(Kaffah)

sehingga akhirnya negeri yang di impikan, *Khilafah Islamiah ala Minhajun Nubuwwah* akan terwujud.

Beranjak dari sinilah penulis ingin memaparkan bagaimana sesungguhnya sistem Demokrasi dan bagaimana pula Kritik yang diberikan Taqiyuddin terhadap Demokrasi tersebut.

Demikianlah Abstrak dari skripsi ini yang berjudul “ TELAAH KRITIS
TAQIYUDDIN AN NABHANI TERHADAP DEMOKRASI”

Pembimbing

Penulis

Saleh Nur M.Ag

Nella Lucky

BAB II

BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI

A. Kehidupan Awal Taqiyuddin an Nabhani

Nama lengkap Taqiyuddin an Nabhani adalah Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an Nabhani. Ia lebih dikenal dengan nama Taqiyuddin an Nabhani, keturunan kabilah Bani Nabhan.¹ Karna itu, nama an Nabhani dinishbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, satu kabilah arab penghuni padang sahara Palestina.² Bani Nabhan adalah satu suku dari Arab al Badiyah. Bani Nabhan ini bermukim di desa Ijzim³ yang terletak sebelah utara kota Al-Quds, wilayah Haifa, Palestina. Di desa inilah Taqiyuddin An-Nabhani lahir dan menghabiskan masa kecilnya.

Taqiyuddin an Nabhani lahir di desa Ijzim pada Tahun 1909. Menurut pendapat yang paling kuat, beliau lahir pada tahun 1332 H – 1914 M.⁴ Beliau mendapat didikan ilmu dan agama di rumah ayah beliau sendiri, seorang Syaikh yang *faqih fiiddin*. Ayah beliau seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di kementrian pendidikan Palestina. Ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperoleh dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf

¹Taqiyuddin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Muhammad Maghfur Wachid, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, cet. II, hlm. 359.

²Ihsan Samarah, *Ma'fhum al- Adalah al Ijtima'iyah fi al-Fikri al- Islami al Mua'shir*, terj Muhammad Shiddiq al-Jawi, *Syeikh Taqiyuddin an Nabhani, Meneropong perjalanan spiritual dan dakwahnya*, al Azhar Press, Bogor, 2003, cet II, hlm. 5.

³Desa Ijzim terletak lebih kurang 28 km selatan Haifa di pedalaman Palestina, dibagian selatan gunung Al-Karmala, berada pada ketinggian 100 m di atas permukaan laut. Sekarang desa Ijzim termasuk ke dalam *Qadha* (setingkat kecamatan) Haifa, *A'mal* (setingkat kabupaten) 'Aka wilayah (setingkat provinsi) Beirut.

⁴Al Wa'ie, *Media Politik dan Dakwah; Membangun kesadaran Ummat; Membumikan al Qur'an dengan Formalisasi Syari'ah; Mengenal Syaikh Taqiyuddin an Nabhani; Pendiri Hizbut Tahrir* (Bagian I), No 74 Tahun VII, 1-31 Oktober 2006, hlm. 23.

an Nabhani.⁵ Di dalam keluarga yang kuat komitmen keagamaannya inilah Taqiyuddin an Nabhani tumbuh dan berkembang, sehingga berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadiannya. Selain itu, Taqiyuddin an Nabhani juga menjadi seorang remaja yang cerdas. Salah satu bukti kecerdasannya adalah kemampuannya menghafal al Qur'an di bawah usia 13 tahun.⁶

Syaikh Taqiyuddin dipengaruhi oleh ketaqwaan dan kesadaran kakek beliau dari pihak ibu, Syaikh Yusuf an Nabhani dan mengambil banyak manfa'at dari keilmuan sang kakek. Beliau banyak menarik pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqh yang diselenggarakan oleh kakeknya. Diskusi-diskusi yang diikutinya sangat mempengaruhi kecerdasannya. Syaikh Taqiyuddin juga mendapatkan kesadaran politik pada usia sangat muda, khususnya dalam masalah politik-politik penting. Sebab kakek beliau memiliki penguasaan atas masalah-masalah politik karena hubungan dekatnya

⁵Ihsan Samarah, *Op. Cit.*, hlm.6. Profil Yusuf bin Ismail an Nabhani adalah seorang ulama pada akhir abad ke-19. Ia lahir pada tahun 1265 H/1849 M. Ia hidup pada masa pemerintahan kekhalifahan Utsmani yang sedang pada masa kemundurannya. Yusuf bin Ismail an Nabhani adalah seorang yang 'alim, Rasikh, wara', *mutqin*, *At-taqi* dan *Al-'abid*. Ia juga seorang yang produktif menulis. Beliau termasuk qadhi senior. ,memangku jabatan sebagai Qadhi di Nisbah Jenin, termasuk provinsi Nablus. Beliau berpindah ke konstatinopel. Lalu diangkat menjadi qadhi di Kiwi Sanjak, termasuk provinsi Moushul. Berikutnya beliau menjabat sebagai kepala mahkamah al jaza; di ladzaqiyah kemudian di Al Quds. Lalu sebagai mahkamah al huquq di Beirut. Lihat, al Wa'ie, *Membumikan Al Qur'an dengan Formalisasi Syari'ah, ...Membumikan al Qur'an dengan formalisasi Syai'ah...Op. Cit.*Karya-karyanya mencapai 80 buah. Lihat <http://www.al-islam.or.id/misc/biografi.htm> atau www.hizbut-tahrir.or.id. mengenai Syaikh Yusuf An-Nabhani ini, beberapa penulis biografi menyebutkan: "Dia adalah Yusuf Bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad An-Nabhani As-Syafi'i. julukannya Abul Mahasin. Ia adalah seorang penyair, sufi, dan termasuk salah seorang qadhi yang terkemuka. Dia menangani peradilan (qadla') di Qushbah Janin, yang termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai qadhi untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di Al Ladziqiyah, kemudian di Al Quds. Selanjutnya dia menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Dia menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah." Lihat juga, Ihsan Imarah, *Ma'fhum....Op. Cit.* hlm. 6.. Lihat Juga Yusuf an Nabhani, *Jami' Karamat al Auliya'*, Mustafha al Babi al Halabi, Kairo, 1962, BAB Muqaddimah, hlm.3.

⁶*Ibid.*, hlm. 7.

dengan para pejabat pemerintahan di Daulah Utsmaniah.⁷ Fenomena ini menarik perhatian kakeknya. Mengamati perkembangan sosok Taqiyuddin an Nabhani tersebut, kakeknya menyarankan kepada ayahanda beliau, untuk mengirimkannya belajar ke Al-Azhar melanjutkan pendidikan Syar'i.⁸

B. Ilmu dan Pendidikan

Pendidikan pertama Taqiyuddin an Nabhani di peroleh di rumahnya di bawah bimbingan ayah dan kakek beliau yang telah mengajarkan hafalan al Qur'an sehingga beliau hafal al Qur'an sebelum baligh. Beliau juga memperoleh dasar-dasar ilmu syari'ah dari ayah dan kakeknya. Disamping itu, Taqiyuddin an Nabhani juga belajar di sekolah dasar di daerah Ijzim. Setelah tamat sekolah dasar, ia melanjutkan sekolah menengah di 'Aka. Belum selesai sekolah menengah, ia pindah ke Kairo untuk sekolah di Al-Azhar. Perpindahan ini terjadi karena kakeknya telah meyakinkan ayahnya tentang perlunya mengirim Taqiyuddin an Nabhani ke Al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan dalam bidang ilmu syariah.⁹

Taqiyuddin an Nabhani kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al Azharyah di Al-Azhar pada tahun 1928. Dan beliau lulus pada tahun itu juga dengan prediket excellent dan mendapat ijazah al Ghuraba. Selesai Tsanawiyah Al-Azhar, ia melanjutkan studinya di Universitas Dar Al-

24.

⁷al Wa'ie, *Membumikan Al Qur'an dengan Formalisasi Syari'ah...*, *Op. Cit.*, hlm.

⁸*Ibid.*

⁹.Ihsan Imarah, *Op. Cit.*, hlm. 13.

‘Ulum.¹⁰ Universitas Dar Al-Ulum saat itu berstatus sebagai cabang dari Al-Azhar. Pada saat yang sama beliau juga mengikuti halaqah-halaqah ilmiah di Al Azhar As Syarif, yaitu mengikuti halaqah para Syaikh yang ditunjukkan oleh kakek beliau, seperti Syaikh Muhammad Al Hadhir Husein-*Rahimahullah*--Proses belajar di Universitas Dar Al-Ulum sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Taqiyuddin an Nabhani terutama disiplin ilmu filsafat.¹¹

Selama di Al- Azhar, sosok pemuda yang cerdas ini memperlihatkan kesungguhan dan kemampuannya dalam belajar. Teman-teman dan para dosen mengenalnya sebagai sosok dengan pemikiran yang cerdas, pendapat yang kokoh, pemikiran dan pemahaman yang mendalam, serta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam diskusi-diskusi yang bersifat pemikiran (*fikriyah*).¹²

Taqiyuddin An-Nabhani menamatkan kuliahnya di Universitas Dar Al-Ulum tahun 1932. Pada tahun yang sama, ia menyelesaikan kuliahnya di Universitas Al-Azhar As-syarif menurut sistem lama. Di mana para

¹⁰.Universitas Dar Al-‘Ulum memiliki *background* sejarah yang cukup menarik. Lahirnya lembaga ilmiah yang berorientasi salafiyah, mempunyai pandangan tersendiri terhadap filsafat Yunani. Salah satu keistimewaan belajar di perguruan tinggi ini adalah mahasiswa dikenalkan pada referensi-referensi induk yang orisinil dari berbagai disiplin ilmu Islam. Di lembaga ini, ketika mempelajari sejarah ilmu-ilmu Islam, di jelaskan pula sejarah masuknya filsafat Yunani ke dunia Islam. Juga ditunjukkan mana buku-buku yang telah dicemari oleh penilaian filsafat itu. Lihat Daud Rasyid, *Pembaharuan dalam Islam dan Orientalisme Dalam Sorotan*, Usamah Press, Jakarta, 2003, hlm 89.

¹¹Pandangan dan kritikan Taqiyuddin An-Nabhani terhadap filsafat bisa dilihat dalam kitab-kitabnya, khususnya kitab *Assyakshiyah Islamiyah*. Kritikan Taqiyuddin An-Nabhani ini ditujukan kepada lebih khusus terhadap Ilmu Kalam dan Mutakalliminnya yang lahir setelah umat Islam bersentuhan dengan filsafat. Bahkan beliau mengatakan bahwa di dalam Islam tidak terdapat filsafat. Ia juga mengkritik filsuf Muslim.Lihat, Taqiyuddin an Nabhani, *Al Syahshiyah al Islamiyah*, terj Zakia Ahmad, *Kepribadian Islam*, HTI Press, Jakarta, 2008, cet. I, hlm 178-183.

¹².Ihsan Samarah, *Op Cit* ,hlm. 12.

mahasiswanya dapat memilih beberapa syaikh Al Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab, dan ilmu-ilmu syari'ah seperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.¹³

Ijazah yang beliau peroleh adalah ijazah Tsanawiyah Al Azhariyah, ijazah Al Ghuraba dari Al Azhar, diploma dalam bidang bahasa Arab di Darul Ulum di Kairo. Beliau juga mendapatkan ijazah dari Sekolah Tinggi Peradilan Syari'ah yang menjadi cabang dari Al Azhar, yaitu ijazah dalam masalah peradilan, kemudian keluar dari Al Azhar dan mendapat ijazah Alamyah-sekarang setingkat doktor- dalam masalah Syari'ah.¹⁴

Setelah lulus menyelesaikan pendidikannya di Al-Azhar, Taqiyuddin an Nabhani kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di kementerian Palestina sebagai seorang guru di sekolah menengah atas negeri Haifa.¹⁵

Syaikh Taqiyuddin bekerja dalam bidang pengajaran Syari'ah di kementerian pendidikan hingga tahun 1938. Dalam kurun waktu 1932 sampai dengan 1938, Taqiyuddin an Nabhani sering pindah tempat tinggal dan pindah tempat mengajar.¹⁶ Selama berkecimpung di dunia pendidikan, ia gelisah dan

¹³. Ihsan Samarah, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁴. Hizbut Tahrir Indonesia, *Dari Masjidil Aqsha menuju Khilafah, sejarah awal perjuangan Hizbut Tahrir*, HTI Press, Kantor Penerangan Hizbut Tahrir, 2006, hlm 14. lihat juga al Wai'e, *Op. Cit.*, hlm. 24. lihat juga, www.HTI/syeikh-taqiyuddin-nabhani-pendiri-atau.html

¹⁵. Ihsan Samarah, *Op. Cit.*, hlm. 11.

¹⁶. Beliau berkata” Adapun golongan terpelajar, maka para penjajah di sekolah-sekolah missionaris sebelum adanya pendudukan, telah menetapkan sendiri kurikulum-kurikulum pendidikan dan Tsaqafah(kebudayaan) berfilsafat, hadharah,(peradaban) dan pemahaman kehidupan mereka yang khas. Kemudian tokoh-tokoh Barat dijadikan sumber Tsaqafah sebagaimana sejarah dan kebangkitan Barat dijadikan sumber asal bagi apa yang mengisi pemikiran kita”oleh karnanya, Taqiyuddin An-Nabhani menjauhi bidang-bidang pendidikan dan mulai mencari pekerjaan lain dengan pengaruh peradaban Barat yang relatif

resah, melihat pengaruh Barat masuk ke sekolah-sekolah. Ia menganggap pengaruh Barat dalam bidang peradilan relatif kecil, dibandingkan dunia pendidikan. Ia lebih memilih berkecimpung di dunia hukum daripada pendidikan. Inilah alasan yang menyebabkan ia meninggalkan bidang pendidikan dan mencoba melamar kerja di Mahkamah Syariah.¹⁷ Dalam hal ini beliau berkata:

“Adapun an Nizhamul Ijtima’I (hukum-hukum Syari’ah yang mengatur pria dan wanita) dan segala hal yang merupakan konsekwensinya (yakni al Ahwalussyakhsyyah) tetap menerapkan Syari’at Islam sampai sekarang, meskipun telah berlangsung penjajahan dan penerapan hukum-hukum kufur. Tidak diterapkan sama sekali selain Syari’at Islam di bidang itu sampai saat ini...”¹⁸

Maka dari itu beliau sangat berkeinginan bekerja di Mahkamah Syari’ah, Akhirnya keinginan Taqiyuddin an Nabhani bekerja di peradilan terwujud berkat bantuan kawan beliau - sama-sama belajar di Al Azhar. Berkat bantuan mereka, Ia diterima di Mahkamah Syariah besar sebagai sekretaris, lalu dipindahkan ke Tabriya. Namun demikian karna beliau mempunyai cita-cita dan pengetahuan di bidang peradilan, beliau terdorong untuk mengajukan permohonan kepada Al Majlis Al Islamy Al A’la, untuk mendapatkan hak menangani peradilan. Setelah para pejabat peradilan menerima permohonannya, mereka lalu memindahkan beliau ke Haifa dengan tugas sebagai kepala sekretaris(*Basy Katib*) di Mahkamah Syar’iyah Haifa. Kemudian pada tahun 1940, beliau diangkat sebagai *Musyawwir* (Asisten

lebih sedikit. Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, *Ad-Daulah al-Islamiyah*, Beirut, Da al-Ummah, 1994, hlm. 153-154, Lihat juga Ihsan Samarah, *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹⁷. Ihsan samarah, *Op cit.*, hlm 13.

¹⁸Taqiyuddin an Nabhani, *Nizhamul Islam*. Mansyurat Hizbut Tahrir, Al Quds, cet 5 1953, hlm. 41-52.

Qadhi) dan beliau terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945, yakni saat beliau dipindah ke Ramallah untuk menjadi Qadhi di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Setelah itu beliau keluar dari Ramallah menuju Syam sebagai akibat jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi. Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya Al Ustadz Anwar Al Khatib mengirim surat kepada beliau, isinya meminta beliau agar kembali ke Palestina untuk di angkat sebagai Qadhi di Mahkamah Syar'iah Al Quds. Syeikh Taqiyuddin mengabulkan permintaan itu dan kemudian beliau diangkat sebagai Qadhi di Mahkamah Syar'iah Al Quds pada tahun 1948. Kemudian oleh kepala Mahkamah Syar'iah dan kepala Mahkamah Isti'naf saat itu - Al Ustadz Abdul Hamid As Sa'ih- beliau lalu diangkat sebagai anggota *Mahkamah Isti'naf* (Banding) dan tetap memegang kedudukan itu sampai tahun 1950. Pada tahun 1950 inilah beliau lalu mengajukan permohonan mengundurkan diri karena beliau mencalonkan diri menjadi anggota *Majlis Niyabib* (Majlis Perwakilan) . Pada tahun 1951, Syaikh an Nabhani mendatangi kota Amman untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada para pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kuliyah Ilmiah Islamiyah. Hal ini terus berlangsung sampai awal tahun 1953. Ketika beliau mulai sibuk dalam Hizbut Tahrir yang telah beliau rintis antara tahun 1949 hingga 1953.¹⁹ Taqiyuddin wafat pada tanggal 25 Rajab 1398 H, bertepatan 20 Juni 1977 M.²⁰ Jenazah beliau dimakamkan di

¹⁹Ihsan Imarah, *Op Cit.*, hlm. 13-16.

²⁰*Ibid.*, hlm. 26.

Al Awza'i di Beirut. Beliau meninggalkan amanah bagi pengganti sekaligus rekan seperjuangan beliau, Syaikh Abdul Qadim Al Zallum.²¹

C. Aktivitas Politik Taqiyuddin an Nabhani

Sejak remaja Syaikh an Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya (*Siyasah*)²² karena pengaruh kakeknya Syaikh Yusuf an Nabhani.²³

Syaikh Taqiyuddin mulai mengkaji secara mendalam dan menaruh perhatian besar pada partai-partai, gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi yang tumbuh sejak abad ke empat hijryah. Beliau mengkaji secara mendalam pemikiran-pemikiran, dan sebab-sebab penyebarannya ataupun kegagalannya. Beliau mengkaji partai-partai itu karna kesadaran beliau akan wajib adanya kelompok Islami yang beraktivitas mewujudkan kembali Negara Khilafah.²⁴

²¹ Al Wa'ie,...*Isu Gender perlu diwaspadai...Op Cit.* Beliau adalah Al-'Alim al-Kabîr Syaikh Abdul Qadim bin Yusuf bin Abdul Qadim bin Yunus bin Ibrahim. Syaikh Abdul Qadim Zallum lahir pada tahun 1342 H –1924 M. Menurut pendapat paling kuat, beliau lahir di Kota al-Khalil, Palestina. Beliau berasal dari keluarga yang dikenal luas dan terkenal keberagamaannya (religius). Ayah beliau *rahimahullâh* adalah salah seorang dari para penghawal al-Quran (Hafizh al-Quran). Beliau membaca al-Quran di luar kepala hingga akhir hayat beliau. Ayahanda Syaikh Zallum bekerja sebagai guru pada masa *Daulah al-Khilafah Utsmaniyah*. Lihat juga, <http://hizbut-tahrir.or.id/2007/05/20/syaikh-abdul-qadim-zallum-amir-hizbut-tahrir-kedua>

²² Politik dalam pengertian an Nabhani sebutan kekuasaan atau rebutan jabatan. Politik dalam bahasa Arab diterjemahkan *asSiyasah*, menurut an Nabhani ialah “Pengaturan U rusan Ummat” baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang dilaksanakan oleh Negara dan ummat. Negara yang melaksanakan aktivitas pelaksanaan kepada ummat secara langsung, sedangkan ummat yang menguasai dan mengoreksinya. Lihat, Taqiyuddin an Nabhani, *Mafahim as Syasah..Op. Cit.*, hlm. 1.

²³ Syaikh Yusuf pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan, tokoh-tokoh freemasonry dan pihak-pihak lain yang membangkang Daulah Utsmaniyah. Lihat, Ihsan Samarah, *Op. Cit.*, hlm. 16.

²⁴ al Wa'ie,...*Membumikan Al Quran dengan formalisasi Syari'ah....Op. Cit.*, hlm.27. Runtuhnya khilafah karena saat itu Inggris menetapkan syarat bagi Turki bahwa Inggris tak akan menarik dirinya dari Turki kecuali setelah Turki menjalankan syarat-syarat sebagai berikut : *Pertama*, Turki harus menghancurkan institusi Khilafah Islamiah. *Kedua*, Turki harus berjanji untuk menumpas setiap gerakan yang akan mendukung Khilafah. *Ketiga*, Turki harus memutuskan hubungannya dengan Islam. *Keempat*, Turki harus memilih konstitusi yang

Syaikh Taqiyuddin melihat adanya kelemahan Arab dihadapan kelompok-kelompok kecil orang Yahudi anak asuh Mandatori Inggris di Yordania, Mesir dan Irak sejak kemunculan Israel di Tanah Palestina Mei 1948. Karna itu beliau mulai mengkaji sebab-sebab hakiki yang dapat membangkitkan kaum Muslimin. Beliau menuliskan hal itu di dua risalah yaitu *Risalah al A'rab* (Misi Arab) dan *Inqadz Filishtin* (Membebaskan Palestina), keduanya beliau keluarkan tahun 1950.²⁵

Beliau juga sering mengadakan perdebatan-perdebatan partai politik dan aktivitas geraknya di antara mahasiswa di Al Azhar dan Kuliyah Dar Ulum, telah menyingkap pula kepeduliannya akan masalah-masalah politik.²⁶ Beberapa sahabatnyapun telah menceritakan sikap-sikapnya yang mengagungkan seruan yang bersifat menantang, yang mampu memimpin situasi Al Azhar saat itu, disamping itu beliau juga melakukan perdebatan dengan ulama Al Azhar yang fokus kajiannya adalah untuk kebangkitan ummat Islam.

Sebenarnya ketika Syaikh Taqiyuddin an Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina dan ketika beliau menjalankan tugasnya di kementrian Palestina, ia sudah melakukan kesadaran kepada murid yang diajarnya dan orang yang ditemuinya, mengenai situasi yang ada pada saat itu.²⁷ Taqiyuddin an Nabhani

berdasarkan azaz sekularisme sebagai ganti dari konstitusi yang bersumber dari hukum-hukum Islam. Mustafa Kemal kemudian menjalankan syarat—syarat itu dan Negara penjajahpun akhirnya menarik diri dari wilayah Turki. Lihat, Jalal al Alam, hlm 48, lihat juga, Bulletin mahasiswa, edisi 9/IV-Y2K9, *Membangkitkan Pemuda dengan Visi : Syari'ah dan Khilafah*.

²⁵Al Wai'e, ...*Membumikan Al Qur'an dengan Formalisasi Syari'ah...*, *Op. Cit.*, hlm 27.

²⁶Ihsan Imarah, *Op. Cit.*, hlm.16

²⁷*Ibid.*, hlm. 17.

menyadari bahwa pengaruh penjajahan Barat di negeri kaum Muslimin semakin kuat. Alasan ini yang menyebabkan beliau mengajukan kepada mereka ide pendirian partai politik yang berlandaskan Islam.

Ketika beliau pindah pekerjaan di bidang peradilan, beliau mengadakan kontak dengan para ulama yang pernah beliau kenal, dalam upaya mengajukan ide itu pula, beliau berpindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwa beliau itu kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik dikalangan ulama maupun kalangan pemikir. Beliau mengumpulkan para ulama di berbagai kota seluruh penjuru Palestina, beliau mendiskusikan dengan para ulama melalui metode kebangkitan yang shahih.²⁸

Kedudukan beliau di Mahkamah Isti'na'f di Al Quds sangat membantu aktivitas beliau tersebut. Dengan demikian beliau dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan pengumpulan para ulama dari berbagai kota di Palestina dan mengadakan dialog dengan mereka dan berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam (*Jam'iyat Islamiyah*) dan partai politik yang bercorak Nasionalis dan Patriotis. Beliau menjelaskan kekeliruan langkah mereka, kesalahan pemikiran mereka dan rusaknya kegiatan mereka.²⁹ Dan beliau juga memaparkan banyak masalah

²⁸Al wa'ie,...*Membumikan Al Qur'an dengan Formalisasi Syari'ah...*, Op Cit.

²⁹Taqiyuddin banyak menjelaskan mengenai kegagalan- kegagalan gerakan- gerakan yang berupaya mewujudkan kebangkitan dalam beberapa bukunya, terutama dalam kitab, *At Takatul al Hizbiy*, beliau juga mengkaji penyebab utama kesalahan dan kegagalan tersebut, salah satunya ialah gerakan tersebut berdiri di atas *Fikrah*(pemikiran) yang masih umum dan tidak jelas. Sehingga muncul kekkaburan dan pembiasan, Lebih dari itu, pemikiran mereka tidak cemerlang, tidak jernih dan tidak murni. Beliau juga mengatakan , paham nasionalisme dan patriotisme adalah paham penjajah yang ingin meracuni mayarakat dengan paham kedaerahan yang sempit. Adapun para aktivis gerakan Nasionalisme, orang-orang Arab

politik dalam ceramah-ceramah beliau di berbagai acara keagamaan di Masjidil Aqsha, mesjid Ibrahim Al Khalil dan mesjid-mesjid lainnya.³⁰

Dalam kesempatan seperti itu, beliau selalu menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab dengan mengatakan bahwa semua itu merupakan rekayasa penjajahan Barat dan merupakan salah satu sarana penjajah Barat agar dapat terus mencengkram negeri-negeri Islam. Beliau juga sering membongkar strategi-strategi politik negeri-negeri Barat dan membeberkan niat-niat mereka untuk menghancurkan Islam dan ummatnya. Selain itu beliau berpandangan bahwa kaum Muslimin berkewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam.³¹

Kecaman Taqiyuddin terhadap sistem pemerintahan di negeri Arab tersebut membuat marah raja Yordania, Raja Abdullah Husein.³² Sikap keras

aktivis gerakan ini menyerukan kebangkitan atas dasar Nasionalisme yang kabur dan tidak jelas dan tidak menghiraukan ajaran Islam, mereka mengajukan kehormatan bangsa Arab, keAraban, kemerdekaan, dan sejenisnya tanpa disertai kejelasan sedikipun akan makannya. Singkatnya, menurut beliau paham Nasionalis dan Patriotis adalah paham penjajah yang memasukkan pengaruhnya kepada negeri-negeri Islam. Lihat, Taqiyuddin an Nabhani, *At-Takatul al Hizbiy*, terj Zakaria, Labib, dkk., *Pembentukan Partai Politik Islam*, HTI Press, Jakarta, 2007, cet. II, hlm. 5-20.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ihsan Samarah, *Op. Cit.* hlm 19.

³² Syaikh an Nabhani di panggil untuk menghadapnya, terutama karna khutbah yang beliau sampaikan di mesjid Raya Nablus. Beliau di suruh hadir dalam suatu majlis lalu ditanya oleh Raja Abdullah mengenai apa yang menyebabkan beliau menyerang sistem-sistem pemerintah di negeri-negeri Arab, termasuk juga negeri Yordania. Namun Syaikh an Nabhani tidak menjawab pertanyaan itu dan malah berpura-pura tidak mendengar. Ini mengharuskan raja Abdullah mengulangi tiga kali pertanyaanya berturut-turut. Akan tetapi Syaikh Taqiyuddin tetap tidak menjawabnya. Maka Raja Abdullahpun marah dan bertanya kepada beliau,

“Apakah kamu akan menolong dan melindungi orang yang kami tolong dan lindungi, dan apakan kamu juga akan memusuhi orang yang kami musuhi?”

Lalu Syaikh Taqiyuddin berkata: *“ Kalau aku lemah untuk mengucapkan keberanian hari ini, lalu apa yang harus aku ucapkan kepada orang-orang sesudahku nanti?”*

Kemudian Syaikh Taqiyuddin bangkit dari duduknya seraya berkata : *” Aku berjanji kepada Allah, bahwa aku akan menolong dan melindungi (agama) Allah dan akan memusuhi orang yang memusuhi (agama) Allah. Dan aku amat membenci sikap nifak dan orang-orang munafik!”*

dan tegas, hampir saja mengantarkannya ke penjara. Sekalipun demikian, kejadian tersebut tidaklah membuat surut aktivitas politiknya. Tekad dan semangat Taqiyuddin tidak pernah luntur. Ia terus mengadakan kontak dan diskusi- diskusi sehingga akhirnya berhasil meyakinkan tokoh ulama, para pemikir dan politik untuk membentuk partai politik yang berasaskan Islam. Akibat kejadian dengan Raja Abdullah tadi beliau lalu kembali ke Al quds dan beliau mengajukan pengunduran diri.³³

Syaikh Taqiyuddin pernah maju dan mencalonkan diri untuk menjadi anggota perwakilan, namun karena sikap beliau yang lurus dan kegiatan politik yang ingin mendirikan partai politik yang berideologi Islam, serta karena sikap beliau yang terlalu berpegang kuat pada Islam, ditambah lagi adanya intervensi negara terhadap hasil pemilu, maka hasil pemilu tidak berpihak pada kemenangan beliau. Namun, untuk kesekian kalinya aktivitas politiknya tidak pernah berhenti. Beliau terus mengadakan kontak dan diskusi. Taqiyuddin lalu menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi kepartaian dan pemikiran-pemikiran yang mungkin dijadikan *Tsaqafyah*³⁴ bagi partai

Maka marahlah raja mendengarkan jawaban itu, sehingga dia lalu mengeluarkan perintah dan mengusir an Nabhani dari mejlis tersebut dan menangkap beliau dan kemudian Taqiyuddin benar-benar ditangkap! Namun kemudian Raja Abdullah menerima permintaan maaf Syaikh Taqiyuddin tersebut lalu memerintahkan pembebasannya, sehingga Syaikh Taqiyuddin tidak sempat bermalam di tahanan. Lihat Ihsan Samarah, *Op. Cit.* hlm. 20-21.

³³Taqiyuddin menyatakan”*Sesungguhnya orang-orang seperti saya sebaiknya tidak bekerja untuk melaksanakan tugas apapun dari sebuah pemerintahan*” Lihat, Ihsan Imarah, *Op. Cit.*

³⁴Taqiyuddin an Nabhani mengemukakan bahwa Tsaqafah Islam adalah pengetahuan-pengetahuan yang menjadikan Aqidah Islam sebagai sebab dalam pembahasannya. Pengetahuan tersebut bisa mengandung Aqidah Islam dan membahas tentang Aqidah seperti ilmu Tauhid. Bisa juga pengetahuan yang bertumpu pada Aqidah Islam, seperti Fiqih, Tafsir dan Hadist. Juga pengetahuan yang terkait dengan pemahaman yang terpancar dari Aqidah Islam berupa hukum-hukum, seperti pengetahuan-pengetahuan yang mengharuskan ijthad dalam Islam, seperti ilmu-ilmu bahasa Arab, Musthala hadist dan ilmu

yang akan didirikannya itu. Dan ternyata pemikiran Taqiyuddin an Nabhani mendapat tempat dan diterima oleh para ulama, pemikir, politikus tersebut. Dan puncak aktivitas politik beliau adalah dengan mendirikan Hizbut Tahrir.³⁵ Syekh Taqiyuddin mulai beraktifitas di kota Al Quds.³⁶

Pada tanggal 17 November 1952 M, lima orang pendiri Hizb menyampaikan permintaan resmi kepada Kementrian Dalam Negeri Yordania dengan maksud untuk mendirikan partai politik. Kemudian Hizb melengkapi syarat-syarat perundang-undangan yang dituntut oleh Undang –Undang Jam'iyat Utsmani. Hizb juga melampirkan anggaran dasar Partai untuk menjelaskan kepada pemerintah dan melampirkan anggaran dasar partai.³⁷ Dengan semua itu Hizbut Tahrir telah menjadi partai resmi menurut Undang-Undang terhitung sejak hari Sabtu 28 Jumada Tsaniyah 1372 H,

Ushul. Semuanya termasuk Tsaqafah Islam karena Aqidah Islam menjadi sebab pembasannya. Tsaqafah Islam merupakan kebudayaan islam yang menginvestasikan peradaban (Hadharah: Himpunan ide kehidupan) Islam .Lihat Taqiyuddin an Nabhani, *Al Syakhshiyah al- Islamiyah...*, *Op. Cit.*, hlm.386.

Hadharah adalah sekumpulan (mafahin) ide yang dianut dan mempunyai fakta tentang kehidupan. Hadharah bersifat khas, terkait dengan pandangan hidup. Lihat, Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham al Islam*, terj Abu Amin, dkk., *Perturan Hidup dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2003, cet III, hlm. 92.

³⁵ Al Wai'e, *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Mengenai Isu Gender perlu diwaspadai; Syekh Taqiyuddin an Nabhani; Pendiri Hizbut Tahrir (Bagian II)*, No 75 Tahun VIII, 1-30 November 2006, hlm. 24.

³⁶ Pada saat itu beliau bekerja di Mahkamah Isti'naf Asy Syar'iyah (Mahkamah Banding Syari'ah) di kota tersebut. Beliau menjalin kontak dengan beberapa tokoh disana, diantaranya Syekh Ahmad ad Daur, Nimr al Mishr dari al Lad, Daud Hamdan dari Ramallah, Syekh Abdul Qadaim Zallum dari kota al Khalil, Dr.'Adil an Nablusi, Ghanim Abduh, Munir Syaqr, Syaikh As'ad Bayouth at Tamimi, dan lain-lain. Pada awalnya pertemuan ini berlangsung secara acak dan tidak teratur. Mayoritas dilakukan di Al Quds atau Al Khalil. Diskusi itu berlangsung mengenai masalah kebangkitan ummat dan berlangsung hingga tahun 1952 M. Lihat *Ibid.*, 25.

³⁷ Hizb juga menyiarkan status statur pendiriannya di koran As Sharh no 176, tanggal 14 Maret 1952. Lihat *Ibid* .

bertepatan tanggal 14 Maret 1953.³⁸ Sejak saat itu Hizb memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan partainya.

Berdasarkan permohonan yang diajukan tadi, dimana pihak diharapkan memaklumi pendirian sebuah partai politik, maka Hizbut Tahrirpun lalu menyewa sebuah rumah di kota Al Quds dan memasang papan nama Hizbut Tahrir.³⁹

Namun, pemerintah memanggil lima orang pendiri Hizb dan menangkap empat orang dari mereka. Dan pemerintah mengeluarkan penjelasan bertanggal 7 Rajab 1372 H- 22 Maret 1953 menganggap Hizbut Tahrir adalah tidak legal dan melarang aktifitas Hizb untuk melakukan kegiatan kepartaian apapun. Pada tanggal 1 April 1953 M penguasa pemerintah memerintahkan pencopotan papan nama Hizbut Tahrir yang digantungkan di kantor Hizb di Al Quds.⁴⁰

Hanya saja Taqiyuddin an Nabhani tidak memperhitungkan larangan itu sama sekali. Ia tetap teguh melanjutkan visinya menyebarkan risalah yang telah ditetapkan sebagai risalah Hizbut Tahrir.⁴¹ Ia sangat berharap

³⁸ Publikasi pendirian partai politik ini secara resmi tersiar pada tahun 1953. Pada saat Taqiyuddin an Nabhani mengajukan permohonan resmi kepada departemen dalam negeri Yordania sesuai Undang-Undang organisasi saat itu yang diterapkan saat itu. Dalam surat itu terdapat permohonan izin agar Hizbut Tahrir diizinkan melakukan aktivitas politiknya. Lihat Al Wai'e, *Media Politik dan dakwah; Membangun Kesadaran Umat; Hizbut Tahrir; Al Khilafah, dan Syari'ah*, No. 55., Edisi Khusus, Maret, 2005, hlm 35-36.

³⁹ Ihsan Imarah, *Op Cit.*, hlm. 23.

⁴⁰ Alwai'e, ... *Isu Gender Perlu diwaspadai...*, *Op. Cit.*

⁴¹ Menurut Taqiyuddin sudah seharusnya ada sebuah gerakan yang memahami Islam, baik dalam aspek *Fikrah* (konsep) maupun *thariqah* (metoda penerapan) lalu menerapkan keduanya dan berusaha melangsungkan kembali kehidupan Islam di salah satu wilayah di antara wilayah-wilayah Islam, sehingga wilayah ini menjadi titik awal pergerakan yang memancarkan sinar dakwah Islam dan kemudian menjadi titik tolak penyebaran dakwah Islam. Atas dasar inilah Hizbut Tahrir berusaha untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam di seluruh dunia dengan jalan mendirikan Daulah Islamiah di satu atau beberapa wilayah sebagai titik sentral Islam dan sebagai benih berdirinya Daulah Islamiah yang besar

membangkitkan ummat Islam melalui Hizbut Tahrir, gerakan dakwah yang ia dirikan dan tetapkan falsafahnya dengan karakter tertentu yang digali dari nash syara' dan sirah Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, Syaikh Taqiyuddin kemudian menjalankan aktivitas secara rahasia dan segera membentuk Dewan Pimpinan (*Qiyadah*) yang baru bagi Hizbut Tahrir, dimana beliau sendiri yang memegang pucuk kepemimpinannya. Meskipun dalam tataran praktis aktivitas politik Hizbut Tahrir tidak terlihat, namun dalam tataran ide, Taqiyuddin tetap melakukan kritik terhadap penguasa secara terbuka. Dan dewan pimpinan yang beliau pimpin ini dikenal dengan nama *Lajnah Qiyadah*. Beliau terus memegang kepemimpinan hingga wafat.

Sepanjang masa kepemimpinan beliau, beliau telah melakukan kegiatan politik yang luas. Hasil yang gemilang ialah mewariskan kepada kita sebuah partai politik yang terencana, sistematis dan terukur. Semua upaya beliau ini telah menjadikan Hizbut Tahrir sebagai partai dengan kekuatan Islam yang luar biasa sehingga Hizbut Tahrir sangatlah disegani oleh seluruh pemikir dan para politikus baik taraf regional maupun international, kendatipun Hizbut Tahrir tetap tergolong partai yang dilarang keberadaanya di seluruh dunia (karena ketegasan sikap menyerukan penerapan Syari'at Islam

dan akan mengembalikan kembali kehidupan Islam, dan menerakan Islam secara sempurna di seluruh negeri-negeri Islam, serta mengembangkan Dakwah Islam di seluruh dunia. Setelah mengadakan pengkajian, analisis dan pembahasan, Hizbut Tahrir kemudian memilih menentukan hukum syara'. Dan menerapkan kaidah kulliyat yang megatakan: Sesuatu kewajiban tidak terlaksana tanpa sesuatu maka sesuatu itu hukumnya wajib. Atas dasar inilah beliau ingin tetap meneruskan perjuangannya. lihat Taqiyuddin an Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, terj Abdullah, HTI Pess, Jakarta, 2007, cet III, hlm. 21-22.

secara total dan itu tentu bertentangan dengan ideologi penguasa-penguasa yang ada).⁴²

Hizbut Tahrir juga telah mengeluarkan banyak selebaran (*Nasyrah*) politik penting, yang membeberkan berbagai persengkokolan jahat untuk melawan ummat Islam. Walhasil aktivitas politik merupakan aspek paling menonjol dalam kehidupan Syaikh Taqiyuddin an Nabhani. Sampai ada yang berpendapat bahwa beliau adalah Hizbut Tahrir itu sendiri, karena kemampuan beliau melakukan analisa politik, sebagaimana nampak dalam kecermatan selebaran politik yang dikeluarkan Hizbut Tahrir. Beliau juga banyak menelaah peristiwa-peristiwa politik, lalu mendalaminya dengan amat cermat, disertai pemahaman sempurna terhadap situasi-situasi politik yang ada.

D. Karya-karya Taqiyuddin an Nabhani

Karya-karya Taqiyuddin an Nabhani mengupas berbagai bidang, mulai bidang politik, ekonomi, sosial, hingga masalah-masalah individu. Karya-karya Taqiyuddin an Nabhani mencapai 30 kitab lebih. Selain itu, ia juga menulis sangat banyak *nasyrah-nasyrah*, yaitu artikel-artikel yang berisi

⁴²Pada intinya menurut Taqiyuddin, Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berideologikan Islam. Bercita-cita untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam melalui tegaknya Daulah Islam...Hizbut Tahrir menyerukan Islam sebagai Qiyadah Fikriyah (kepemimpinan berikir) yang melahirkan peraturan-peraturan yang dapat memecahkan problematika manusia secara keseluruhan, baik di bidang ekonomi, budaya, kemasyarakatan, dan lain-lain. ...Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berjuang mengubah mafahim (ide-ide) yang telah tercemari oleh penjajah, yang memabatasi Islam hanya pada aspek ibadah dan akhlak semata. Lihat, Taqiyuddin an Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, terj Abdullah, HTI Press, Jakarta, 2007, cet III, hlm 127-128.

tanggapan terhadap situasi yang terjadi, kritik konstruktif berdasarkan persepsi Islam, yang ia tulis dan sebar sebagai solusi problematika yang muncul.

Kebanyakan karya Syaikh Taqiyuddin an Nabhani berupa kitab-kitab Tanzhiriyah (penetapan pemahaman/pandangan) dan Tanzhimiyah (penetapan peraturan), atau kitab-kitab yang dimaksudkan untuk mengajak kaum muslimin untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Daulah Islamiah.⁴³

Adapun karya-karya yang dikeluarkan Taqiyuddin an Nabhani adalah sebagai berikut:

Yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain : 1. *Nizhamul Islam*; 2. *At Takatul Al Hizbi*; 3. *Mafahim Hizbut Tahrir*; 4. *Nizhamul Iqthishadi fil Islam*; 5. *Nizhamul Ijtima'i fil Islam*; 6. *Nizhamul Hukum fil Islam*; 7. *Ad Dustur*; 8. *Muqaddimah Dustur*; 9. *Ad Daulatul Islamiyah*; 10. *Asy Syakhshiyah Al Islamiyah (3 jilid)*; 11. *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir*; 12. *Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir*; 13. *Nida' Haar*; 14. *Al Khilafah*; 15. *At Tafkir*; 16. *Ad Dusiyyah*; 17. *Sur'atul Badihah*; 18. *Nuqthatul Inthilaq*; 19. *Dukhulul Mujtama'*; 20. *Inqadzu Filisthin*; 21. *Risalatul Arab*; 22. *Tasalluh Mishr*; 22. *Al Ittifaqiyyah Ats Tsana'iyyah Al Mishriyyah As Suriyyah wal Yamaniyyah Hallu Qadliyyah Filisthin ala Ath Thariqah Al Amrikiyyah wal Inkiliziyyah*; 23. *Nazhariyatul Firagh As Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar*.

⁴³Ihsan Imarah, *Op. Cit.*, hlm 30.

Dari sekian banyak karya Taqiyudin an Nabhani ini, yang paling banyak mengupas tentang Demokrasi (Kritik terhadap Demokrasi) adalah karyanya berjudul *Nizhamul Islam, dan Assyakhsyah Islamiyah*.

Buku-buku tersebut diterbitkan atas nama Taqiyuddin an Nabhani. Pengaruh Taqiyuddin an Nabhani. Pengaruh Taqiyuddin an Nabhani dan Hizbut Tahrir melalui buku-buku dan *nasyrah-nasyrah* yang dikeluarkannya semakin besar dan mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat.⁴⁴ Bukti dan respon masyarakat adalah dengan bergabungnya mereka dengan Hizbut Tahrir dan mendukung perjuangan partai-partai politik International ini. Pemerintah Yordania khawatir melihat pengaruh tersebut dan risau terhadap dampak yang muncul, yakni akan menyongsong rezim saat itu. Selanjutnya pemerintah Yordania mengeluarkan Undang-Undang yang melarang buku Taqiyuddin an Nabhani.

Untuk menghindari sanksi pelanggaran Undang-Undang yang telah ditetapkan pemerintah Yordania tersebut, selanjutnya Taqiyuddin an Nabhani menggunakan nama-nama anggota Hizbut Tahrir yang notabenenya adalah murid-murid beliau sendiri dengan maksud supaya kitab-kitab karya Taqiyuddin an Nabhani mudah disebarluaskan. Ternyata cara ini cukup efektif dan menyebarluaskan pemikiran-pemikirannya. Informasi tentang pergantian nama Taqiyuddin diperoleh dari muridnya sendiri.⁴⁵

Adapun kitab-kitab Taqiyuddin an Nabhani yang menggunakan nama murid-muridnya sebagai berikut : *Asyasah Al Iqthishad Al Musla, An Nizhan*

⁴⁴Taqiyuddin an Nabhani, *Dukhul Mujtama'*, Hizbut Tahrir, , Alquds, 1958, hlm 1-2.

⁴⁵Ihsan Imarah, *Op Cit*, hlm. 40. lihat juga, al wa'ie, ... *Isu Gender Perlu diwaspadai...*, *Op. Cit.* hlm. 26.

Al Uqubat dengan menggunakan nama muridnya Abdurrahman Al Maliki, *An Naqd al Isytirakiah*, *Kaifa Hudimat Al Khilafah*, *al Amwa fi Daulah Khilafah* dengan menggunakan nama muridnya Abdul Qadim Zallum, *Ahkam Al Bayyinat* dengan menggunakan nama muridnya Ahmad Daur, *Ahkam Ash Shalat dan Al fikr Islami* dengan menggunakan nama muridnya Muhammad Ismail.⁴⁶

Apabila karya-karya Taqiyuddin an Nabhani tersebut ditelaah dengan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu ushul, akan nampak bahwa ia sesungguhnya adalah seorang *mujtahid* yang mengikuti metode para fuqaha dan mujtahidin terdahulu. Hanya saja, ia tidak mengikuti salah satu aliran dalam ijtihad yang dikenal di kalangan Ahlus Sunnah. Artinya, Taqiyuddin an Nabhani tidak mengikuti suatu madzhab tertentu di antara madzhab-madzhab fiqh yang telah dikenal, akan tetapi ia memilih dan menetapkan (*mentabanni*) ushul fiqh tersendiri yang khusus baginya, lalu atas dasar itu ia mengistinbath hukum-hukum syara'.⁴⁷

Namun perlu diingat di sini bahwa *ushul fiqh* Taqiyuddin an Nabhani tidaklah keluar dari metode fiqh sunni, yang membatasi dalil-dalil syar'i pada Al Kitab, As Sunnah, Ijma' Shahabat, dan *Qiyas Syar'iy*, yakni Qiyas yang illat-nya terdapat dalam nash-nash syara' semata.⁴⁸

Ciri khas karya-karya Taqiyuddin an Nabhani adalah menampilkan Islam sebagai sebuah ideologi (istilah Taqiyuddin an Nabhani adalah *mabda*) yang sempurna. Menurut Taqiyuddin an Nabhani bahwa Islam adalah

⁴⁶Taqiyuddin an Nabhani, *Dukulul Mujtama'...* Op Cit.

⁴⁷Ihsan Imarah, *Op. Cit.*, hlm. 35.

⁴⁸*Ibid.*

ideologi yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia dewasa ini.⁴⁹ Dalam karya-karyanya Taqiyuddin an Nabhani menempatkan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan, karena karya-karyanya ini dimaksudkan untuk bekal bagi anggota-anggota Hizbut Tahrir secara khusus dan umat Islam pada umumnya dalam melanjutkan kehidupan Islam dengan jalan menegakkan kembali Khilafah Islamiyah. Kitab-kitab Taqiyuddin an Nabhani juga menjadi landasan ideologis dan politis bagi Hizbut Tahrir. Contohnya, dalam kitab *Nizhamul Islam* beliau menjelaskan, secara garis besar, ada tiga *mabda* (ideology) di dunia. Diantara ideology ini yaitu Kapitalisme, Sosialisme dan Islam. Dalam kitab itu beliau menjelaskan perbedaan masing-masing ideology tersebut dan menjelaskan kelemahan masing-masing ideology tersebut. Menurut beliau *mabda* yang benar hanyalah *mabda* Islam. Dalam kitab *Attakattul al Hizby* beliau memaparkan bahwa dalam pembentukan partai politik harus selaras antara *Fikroh* dan *Thariqah*, agar partai itu mampu bangkit. Dan masih banyak lagi kitab karya

⁴⁹. Dalam perspektif Taqiyuddin An-Nabhani bahwa bangkitnya manusia tergantung pada pemikirannya tentang manusia, kehidupan, dan alam semesta, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum dan sesudah kehidupan di dunia. Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa supaya manusia bangkit harus ada perubahan menyeluruh terhadap pemikiran manusia dewasa ini, kemudian diganti dengan pemikiran lain. Sebab, pemikiranlah yang membentuk *mafahim* (persepsi) terhadap segala sesuatu. Manusia selalu mengatur segala tingkah lakunya di dalam kehidupan ini sesuai dengan *mafahim*nya tentang kehidupan. Menurutnya, jika kita hendak mengubah tingkah laku manusia yang rendah menjadi luhur, tidak ada jalan lain kecuali harus mengubah *mafahim*nya terlebih dahulu...Taqiyuddin An-Nabhani mendefinisikan *mabda* (ideologi) adalah *aqidah aqliyah* yang melahirkan peraturan. *Aqidah aqliyah* ialah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, serta hubungan ketiganya dengan sebelum dan sesudah kehidupan di dunia. Sedangkan peraturan yang lahir dari *aqidah* tidak lain berfungsi untuk memecahkan berbagai problematika hidup manusia, menjelaskan cara pelaksanaan pemecahannya, memelihara *aqidah* serta untuk mengemban *mabda* (ideologi). Penjelasan tentang cara pemeliharaan *aqidah*, dan penyebaran risalah dakwah inilah yang dinamakan *tariqah*. Jadi, *mabda* (ideologi) mencakup dua bagian, yaitu *fikrah* dan *thariqah*. Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham al-Islam... Op. Cit.*, hlm 1-18 dan 36-38 .

Taqiuddin an Nabhani yang bersifat ideologis dan politis yang hingga saat ini menjadi landasan politis dan ideologi bagi Hizbut Tahrir.

C. Pemikiran-Pemikiran Taqiuddin an Nabhani

Dalam perspektif Taqiuddin an Nabhani, realitas masa kini memperlihatkan umat Islam mundur dan tidak mampu bangkit setelah pernah menguasai dunia berabad-abad lamanya. Sejak pertengahan abad XII Hijriah (ke 18 M) dunia Islam mengalami kemerosotan dan kemunduran yang paling buruk dari masa kejayaannya dengan sangat cepat. Sekalipun telah dilakukan berbagai upaya membangkitkan kembali atau setidaknya mencegah agar kemerosotan dan kemundurannya tidak terus berlanjut, akan tetapi tidak satupun upaya tersebut membuahkan hasil. Sementara itu dunia Islam masih tetap berada dalam kebingungan di tengah-tengah kegelapan akibat kekacauan dan kemundurannya dan masih terus merasakan pedihnya keterbelakangan dan berbagai goncangan.⁵⁰

Alasannya, sejak runtuhnya Khilafah Utsmani, negeri-negeri kaum muslimin dikuasai oleh Barat. Kaum muslimin masih mengadopsi berbagai pemikiran dan pandangan hidup yang berasal dari Barat. Seperti pemikiran sekularisme yang menjadi landasan berpikir dan pandangan hidup kaum Muslimin hingga kini. Sekularisme menjadi asas dalam segala aktifitas kaum Muslimin. Padahal kebangkitan kaum muslimin hanya bisa dicapai dengan menerapkan Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan.

⁵⁰ Taqiuddin an Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, terj Abdullah, HTI Press, Jakarta, 2007, cet III, hlm 5.

Menurut Taqiyuddin, kaum Muslimin tidak pernah mengalami kemunduran dari posisinya sebagai pemimpin dunia selama tetap berpegang teguh pada agamanya. Sebagai buktinya, kaum Muslimin pernah mengalami masa kejayaan ketika Islam diterapkan pada masa kekhilafahan Islam selama lebih kurang 13 abad. Kemunduran kaum Muslimin ini tampak tatkala mereka meninggalkan dan meremehkan ajaran-ajaran agama, membiarkan peradaban asing menyerbu negeri-negeri mereka, membiarkan paham-paham Barat bercokol di benak mereka. Kemunduran kaum Muslim terjadi di saat kaum Muslimin mengabaikan *Qiyadah Fikriyah* Islam.⁵¹ Artinya, seluruh aktivitas kaum Muslimin tidak lagi berlandaskan Islam. Akhirnya perekonomianpun semakin kacau. Negara telah dirasuki dengan peradaban Barat, ekonomi yang berasal dan bersumber dari Barat, sehingga munculnya paham Kapitalisme, Sekularisme dan lain sebagainya. Dapat dikatakan, kelemahan ini timbul, selain kesalahan dari sistem yang ada, juga merupakan kesalahan ummat Islam itu sendiri yang tidak mengenal dan mempraktikkan lagi ideologi Islam, asing dengan kultur dan *tsaqafah* (Kebudayaan) dalam sendi-sendi kehidupannya. Setelah melakukan kajian panjang terhadap kemunduran Islam,

⁵¹ Qiyadah Fikriyah adalah kaidah berfikir. Qiyadah Fikriyah Islam adalah qiyadah fikriyah yang positif, karena menjadikan akal sebagai dasar untuk beriman kepada wujud Allah. Qiyadah ini mengarahkan perhatian manusia terhadap alam semesta, manusia dan hidup sehingga manusia yakin terhadap adanya Allah yang telah menciptakan makhluk-mahlukNya. Disamping itu, qiyadah ini menunjukkan kesempurnaan mutlaq yang selalu dicari oleh manusia karena drongan fitrahnya. Qiyadah fikriyah ini memberi petunjuk pada akal agar dapat sampai pada tingkat keyakinan terhadap al Khaliq supaya ia mudah terjangkau keberadaannya dan mengimaniNya. Lihat, Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham al Islam...*, Op. Cit., hlm. 57.

terutama setelah runtuhnya Khilafah Islam, Taqiyuddin melihat bahwa realitas tersebut hanya bisa diselesaikan dengan Islam.⁵²

Menurut Taqiyuddin juga penyebab kegoncangan pemikiran dan penyimpangan pemahaman dari kebenaran ini adalah, adanya serangan dahsyat atas kita yang dilancarkan oleh peradaban Barat. Peradaban Barat benar-benar telah mengendalikan cara berpikir dalam selera kita-kita sedemikian rupa, sehingga mengubah pemahaman (*mafahim*) kita tentang kehidupan, tolak ukur (*maqayis*) kita terhadap segala sesuatu dan keyakinan (*qanaat*) kita yang telah tertancap di dalam jiwa kita, seperti ghirah kita terhadap Islam dan penghormatan kita terhadap tempat-tempat suci dan lain sebagainya.⁵³

Menurut Taqiyuddin an Nabhani bahwa pemikiran bagi umat manapun adalah kekayaan yang tak ternilai harganya yang mereka miliki dalam kehidupan mereka, bila mereka adalah sebuah umat yang baru lahir. Bahkan, pemikiran merupakan peninggalan sangat berharga yang akan diwarisi oleh generasi penerusnya. Menjadi umat yang memiliki identitas dalam bentuk pemikirannya yang maju. Sedangkan kekayaan yang bersifat materi, penemuan ilmiah, rekayasa industri, dan lainnya, masih jauh kedudukannya dibanding dengan pemikiran. Bahkan semua bisa diraih melalui pemikiran, dan semata-mata bisa dilestarikan hanya oleh pemikiran.⁵⁴

⁵² Hizbut Tahrir Indonesia, *Dari Masjid al-Aqsha menuju Khilafah....*, Op. Cit, hlm. 15.

⁵³ Taqiyuddin an Nabhani, *An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam*, terj. M Nashir dkk., *Sistem Pergaulan dalam Islam*, HTI Press, Jakarta, cet IV, 2009, hlm.12.

⁵⁴ Menurut Taqiyuddin an Nabhani, pemikiran adalah aktifitas berfikir pada diri umat tentang realitas kehidupan yang mereka hadapi. Umat secara keseluruhan senantiasa

Oleh karena itu, menurut pemikir politik Islam kontemporer ini, jika kekayaan sebuah bangsa yang bersifat materi hancur, maka dengan segera akan bisa dipulihkan kembali, selama bangsa itu melestarikan kekayaan berfikir mereka yang kreatif dan inovatif. Namun, bila kekayaan berfikir mereka telah terabaikan dan sebaliknya, mereka malah melestarikan kekayaan materi, maka kekayaan itu akan segera sirna dan mereka akan kembali miskin. Penemuan-penemuan inilah yang telah ditemukan oleh suatu bangsa, mungkin saja terulang kembali, bila bangsa tersebut telah meninggalkan penemuan-penemuan itu, dengan tidak meninggalkan metode berfikirnya. Sebaliknya, bila bangsa itu telah meninggalkan metode berfikirnya, maka pasti mereka akan terbelakang lagi. Oleh karena itu, yang harus dijaga pertama kali adalah pemikiran. Dengan dasar pemikiran dan metode berfikirnya yang inovatif itu, mereka akan bisa meraih sukses dalam bidang materi serta berhasil menemukan penemuan-penemuan ilmiah dan perekayasaan industri (yang demikian maju) maupun hal-hal yang serupa lainnya.⁵⁵

Menurut Taqiyuddin an Nabhani bahwa umat Islam saat ini bisa dianggap sebagai umat yang telah kehilangan pemikirannya yang tinggi. Mereka telah kehilangan metode berfikirnya yang inovatif. Saat ini generasi Islam tidak berhak mewarisi pemikiran Islam, karena pemikiran mereka telah terkontaminasi dengan pemikiran non-Islam. Sebab, mereka tidak memiliki

mempergunakan informasi (pengetahuan) yang mereka miliki, ketika mengindera berbagai fakta ataupun fenomena untuk menentukan hakikat fakta atau fenomena tersebut. Dengan kata lain, umat harus senantiasa memiliki pemikiran yang mereka gunakan dalam menata kehidupan mereka. Disebabkan seringnya umat mempergunakan pemikiran yang cemerlang, maka muncul berpikir yang inovatif pada diri umat. Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhamul al-Iqtishadi fi al-Islam*, terj, Dar Ummah, Bairut, 1991, hlm. 1

⁵⁵. *Ibid.*

pemikiran berfikir yang inovatif, sehingga pasti umat ini nampak menderita kemiskinan, sekalipun kekayaan materi di negara mereka sangat berlimpah. Mereka juga tampak telah kehilangan kreatifitasnya, sehingga tidak bisa menemukan penemuan-penemuan ilmiah, maupun melakukan perekayasaan industri, meskipun secara teoritis mereka mempelajari, mendengarkan dan menyaksikan penemuan-penemuan itu. Hal ini disebabkan mereka tidak akan terdorong untuk melakukannya, kecuali mereka memiliki metode berfikir yang kreatif dan inovatif tersebut, yaitu mereka memiliki pemikiran yang produktif yang mereka pergunakan dalam kehidupan.⁵⁶ Berdasarkan hal ini, menurut Taqiyuddin an Nabhani bahwa kaum muslimin harus membangun pemikiran dan metode berfikir yang inovatif itu dalam diri mereka. Kemudian dengan landasan pemikiran itu, mereka bisa meraih kekayaan yang bersifat materi. Mereka juga akan bisa menemukan realitas-realitas ilmiah. Setelah itu, baru mereka bisa melakukan perekayasaan industri. Selama mereka tidak melakukannya, niscaya mereka tetap mundur. Memang saat ini cukup banyak kaum Muslimin yang pintar dan memiliki keahlian dalam bidang teknologi, tetapi karena mereka tidak memiliki pemikiran yang tinggi, kreatif dan inovatif, maka mereka belum bisa melakukan perekayasaan ilmiah.

Dalam pandangan Taqiyuddin an Nabhani bahwa generasi umat Islam dewasa ini tidak lagi memiliki pemikiran-pemikiran yang berlawanan dengan pemikiran yang ingin diwujudkan pada dirinya, sehingga generasi itu mampu menyadari hakikat pemikiran yang akan disampaikannya. Dengan begitu, akan

⁵⁶. Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi..... Op Cit.*

terjadi pertarungan antara dua pemikiran, lalu ia mampu menemukan pemikiran yang benar. Kenyataannya tidaklah demikian, justru generasi Islam telah kehilangan semua pemikiran beserta seluruh metode berfikirnya yang inovatif. Menurut Taqiyuddin an Nabhani, saat ini generasi Islam telah mewarisi pemikiran-pemikiran Islam sebagai filsafat yang bersifat *Utopis*, sebagaimana bangsa Yunani yang telah mewarisi filsafat Plato dan Aristoteles. Menurutnya, generasi Islam memahami Islam sebagai sebuah upacara dan simbol-simbol keagamaan, seperti halnya orang-orang Nasrani yang telah mewarisi agama Nasraninya.⁵⁷

Taqiyuddin an Nabhani menyatakan bahwa generasi Islam mengadopsi pemikiran kapitalis, karena melihat keberhasilannya, bukan karena memahami betul realitas pemikirannya. Generasi ini telah juga mengadopsi sistem dan hukum kapitalis, bukan karena menyadari bahwa peraturan-peraturan itu sebenarnya muncul dari pandang hidup kapitalis. Oleh karena itu, mereka sendiri tetap jauh dari pemikiran-pemikiran kapitalis dilihat dari segi konsepsi pemikirannya, sekalipun mereka menatap kehidupan mereka dengan gaya hidup kapitalis. Begitu pula, mereka jauh dari pemikiran-pemikiran kapitalis dilihat dari segi praktiknya, sekalipun mereka beragama Islam dan mengkaji pemikiran-pemikirannya.⁵⁸

⁵⁷. *Ibid*

⁵⁸ Dalam perspektif Taqiyuddin An-Nabhani, kecenderungan generasi Islam terhadap pemikiran-pemikiran tersebut telah melampaui batas, tidak lagi pada usaha untuk mengkompromikan antara Islam dan hukum serta solusi kapitalis, bahkan sampai pada perasaan *inferior* (rendah diri) terhadap kemampuan Islam untuk melahirkan solusi bagi problema kehidupan yang senantiasa silih berganti. Selanjutnya melahirkan ketergantungan pada hukum dan solusi kapitalis. Bahkan, tanpa upaya kompromi lagi, sehingga tidak merasa riskan untuk meninggalkan hukum Islam dan mengadopsi hukum non-Islam. Tujuannya adalah agar bisa meraih kemajuan hidup dalam percaturan kehidupan, sejajar dengan dunia yang

Dalam kerangka berfikir Taqiyuddin an Nabhani bahwa memberikan pemikiran Islam dan hukum syara' sebagai solusi kehidupan jelas akan mengalami benturan dengan manusia yang kosong dari pemikiran dan metode berfikir. Juga akan berbenturan dengan kecenderungan terhadap pemikiran kapitalis dan sosialis, termasuk dengan realitas kehidupan sehari-hari yang dikendalikan oleh sistem kapitalis. Oleh karena itu, selama pemikiran itu tidak kokoh hingga betul-betul menancap kuat dalam benak dan akal mereka, tidak mungkin pemikiran itu akan menggoncang orang-orang tersebut, bahkan rasanya sulit memalingkan perhatian mereka. Sebab dengan pemikiran mereka ini, ia akan mampu membawa logika-logika yang lemah plus dangkal itu ke dalam proses berfikir yang mendalam. Ia juga mampu menggugah kecenderungan yang menyimpang serta perasaan yang kacau hingga lahir kecenderungan yang benar, yaitu kepada pemikiran dan hukum Islam. Jadi, sejatinya, generasi Islam senantiasa memaparkan asas-asas yang menjadi pijakan hukum dan solusi kapitalis dan sosialis. Kemudian menghancurkannya. Sejatinya, ia juga senantiasa mendalami realitas kehidupan yang silih berganti, kemudian menjelaskan solusi Islam terhadap realitas itu. Ia harus mendalami bahwa hukum syara' yang wajib diambil dan diterapkan, karena hukum syara' yang digali berdasarkan al Qur'an dan Sunnah atau dalil yang ditunjukkan oleh

berperadaban tinggi. Juga agar bisa menyusul bangsa kapitalis dan sosialis dengan menganggap bangsa sosialis dan kapitalis sebagai bangsa yang maju. Sedangkan golongan yang amat sedikit dari generasi Islam yang masih memegang Islam, mereka juga memiliki kecenderungan terhadap pemikiran kapitalis. Namun, mereka masih mempunyai obsesi tentang kemungkinan untuk mengkompromikan antara Islam, kapitalis dan sosialis. Hanya sayang sekali, bahwa mereka yang berupaya untuk mengkompromikan antara Islam dan ideologi non-Islam itu tidak memiliki pengaruh (peranan) sama sekali dalam kehidupan masyarakat, dilihat dari segi interaksinya ditengah-tengah kehidupan manusia. *Ibid.*, hlm. 3.

keduanya. Bukan dari sesuai atau tidak sesuainya untuk masa sekarang. Dengan kata lain, ia harus menjelaskan bahwa hukum syara' wajib diterapkan, dilihat dari segi akidah, bukan karena maslahat. Untuk menyampaikannya harus dilandasi dengan penjelasan dalil syara'nya yang menjadi pijakan *istinbathnya*, atau penjelasan *illatnya* dengan *illat syar'iyah*, yang telah dinyatakan, maupun yang telah ditunjukkan oleh nash syara' yang serupa.⁵⁹

Menurut Taqiyuddin an Nabhani bahwa masalah yang berat yang telah memalingkan kaum Muslimin, dan penyakit yang paling parah yang telah mereka derita dalam kehidupan mereka ini adalah masalah pemikiran yang diadopsi dari non-Islam, baik yang menyangkut persoalan pemerintahan maupun ekonomi. Sebab, pemikiran non-Islam inilah yang paling banyak diterima dan disebut dengan penuh kebanggaan oleh kaum Muslimin. Pemikiran inilah yang paling banyak direkayasa oleh Barat untuk diterapkan secara praktis, bahkan mereka senantiasa mengawasi upaya penerapannya dengan gigih dan terus-menerus. Umat Islam dipimpin dengan mempergunakan sistem demokrasi secara *de jure*- dan ini merupakan usaha Negara Imperialis Barat untuk mempertahankan sistem mereka. Maka umat Islam secara *de facto* dipimpin dengan mempergunakan sistem ekonomi kapitalis pada semua sektor perekonomiannya.⁶⁰

Secara umum Taqiyuddin an Nabhani melihat bahwa realita kemunduran Islam disebabkan Barat masih mencengkeram politik

⁵⁹. *Ibid.*

⁶⁰. *Ibid.*, hal 5

penjajahannya ke dunia Islam. Mencermati strategi *Isti'mar* (penjajahan),

Taqiyuddin an Nabhani menganalisa sebagai berikut:

*“Metode yang dipakai oleh pengusung kapitalisme untuk menerapkan konsep-konsepnya adalah penjajahan (isti'mar). maksudnya menggunakan kekuatan politik, militer, ilmu pengetahuan, dan ekonomi terhadap bangsa-bangsa yang dikalahkan untuk menghisap kekayaannya adalah suatu hal yang niscaya. Metode penjajahan ini masih tetap dan tidak berubah. Sekalipun pemerintahannya berganti dan undang-undangnya berubah. Sebab imperialisme bukanlah sebagaimana yang dikatakan Lenin, yaitu sebagai tahap akhir kapitalisme. Imperialisme adalah metode penyebaran ideologi Kapitalisme pada umat dan bangsa-bangsa lain”.*⁶¹

Analisa Taqiyuddin an Nabhani tersebut menjadi kenyataan. Berakhirnya imperialisme secara fisik, tidak secara otomatis mengakhiri dan menghapus Imperialisme dalam bidang pemikiran. Imperialisme secara fisik itu bermetamorfosis menjadi Imperialisme dalam bidang pemikiran, ekonomi, politik dan budaya, atau yang biasa disebut Imperialisme modern. Secara fisik tidak nampak, tetapi secara non-fisik sangat terasa. Bahkan tidak jarang Imperialisme kedua ini diyakini, diemban, dan dilaksanakan secara patuh oleh orang yang dijajahnya. Bahaya Imperialisme di bidang pemikiran lebih besar jika dibandingkan dengan Imperialisme secara fisik. Imperialisme dalam bidang pemikiran menerapkan strategi memberi bantuan kepada suatu negara. Bantuan tersebut cenderung mengikatkan suatu negara dan negara penerima bantuan tidak bebas menentukan kebijakan dalam negerinya.

Imperialisme dalam bidang pemikiran inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Taqiyuddin an Nabhani. Ia sangat keras menentang

⁶¹.Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim siyasah li Hizbut at-tahrir*, tpHizbut at-Tahrir, 1969, hlm .14.

konsep-konsep pengaturan kehidupan yang lahir dari sekularisme dan sosialisme tersebut. Dari buku-buku yang ditulisnya, nampak jelas ketidaksukaannya terhadap sekularisme dan sosialisme serta ideologi turunannya.

Lebih jelasnya menurut Taqiyuddin, apabila kita telusuri di dunia ini, kita hanya menjumpai tiga *mabda* (Ideologi). Yaitu Kapitalisme, Sosialisme, termasuk Komunisme dan Islam. Dua *mabda* (Ideologi) pertama masing-masing diemban oleh satu atau beberapa negara. Sedangkan *mabda* yang ketiga yaitu Islam, tidak diemban oleh satu negarapun. Islam diemban oleh individu-individu dalam masyarakat sejak keruntuhannya tahun 1924. Sekalipun demikian, *mabda* ini tetap ada di seluruh penjuru dunia. Kapitalisme tegak atas dasar pemisahan agama dengan kehidupan (Sekularisme).⁶² Ide ini menjadi aqidahnya (sebagai asas) sekaligus sebagai *qiyadah fikriyah* (kepemimpinan ideologis) serta *qaidah fikriyah* (kaedah berfikirnya). Berlandaskan *qiyadah fikriyah* ini mereka beranggapan bahwa manusia berhak membuat aturan hidupnya. Mereka pertahankan kebebasan manusia yang terdiri dari kebebasan berakidah, berpendapat, hak milik dan kebebasan pribadi. Dari kebebasan hak milik inilah lahir sistem ekonomi kapitalis, yang termasuk perkara paling menonjol dalam *mabda* ini atau yang

⁶²Namun tatkala ditetapkan agama harus dipisahkan dengan kehidupan, aka pengakuan itu akhirnya hanya sekedar formalita belaka, karena sekalipun mereka mengetahui eksistensinya, tetapi pada dasarnya mereka menganggap bahwa kehidupan di dunia ini tak ada hubungannya dengan apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Anggapan ini muncul ketika dinyatakan adanya pemisahan agama dari kehidupan, dan bahwasanya agama hanyalah hubungan antara individu dan pencipta. Lihat, Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham al Islam...*, *Op. Cit.*, hlm. 41.

dihasilkan oleh aqidah mabda ini. Oleh karna itu mabda ini dinamakan mabda kapitalisme.⁶³

Taqiyuddin an Nabhani membandingkan antara Islam, Kapitalisme dan Sosialisme sebagai sebuah ideologi (*mabda'*). Tujuannya untuk menjelaskan ideologi yang benar dan yang batil. ⁶⁴Untuk menilai benar salah ketiga ideologi tersebut, Taqiyuddin an Nabhani mempergunakan standar atau parameter yang netral. Standar benar salahnya bukan berasal dari salah satu ideologi itu, tetapi standar yang diterima oleh ketiganya. Adapun standar itu adalah *Pertama*, sesuai dengan fitrah manusia. *Kedua*, sesuai dengan akal sehat. Fitrah yang dimaksud ialah kelemahan dan keterbatasan manusia, sehingga membutuhkan Yang Maha Pencipta lagi Maha Pengatur, dengan ungkapan lain sesuai dengan naluri agama yang ada pada setiap orang. Akal

⁶³Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham al Islam...*, *Op. Cit.*, hlm 39.

⁶⁴Menurut Taqiyuddin, aqidah yang dianut oleh Barat, kapitalisme secara keseluruhan adalah Aqidah Sekularisme. Aqidah ini merupakan Qiyadah Fikriyah bagi setiap pemikiran. Diatas dasar inilah ditentukan setiap arah pemikiran manusia dan cara pandangannya...mereka percaya akan adanya sang Pencipta, namun memisahkan sang Pencipta dari kehidupan.

Sosialisme termasuk komunisme memandang bahwa manusia, alam semesta, dan kehidupan adalah materi. Dibalik alam materi tidak ada alam lainnya. Penganut mabda ini mengingkari adanya alam penciptaan dan sang pencipta . Mereka mengingkari aspek kerohanian dan beranggapan bahwa pengakuan adanya aspek rohani merupakan sesuatu yang berbahaya bagi aspek kehidupan.. materi adalah pangkal berpikir dan pangkal dari segala sesuatu. Namun pada intinya, mereka mengingkari adanya sang pencipta.

Kedua mabda ini walaupun berbeda pendapat mengenai ide dasar tentang manusia dan hidup, tetap mereka sepakat bahwa nilai-nilai yang paling teruji adalah nilai-nilai yang ditetapkan oleh manusia itu sendiri dan bahwasanya kesenangan sebenarnya adalah kesenangan bersifat jasmaniah. kedua mabda ini juga berpendapat, bahwa untuk memberikan kebebasan pribadi bagi manusia, manusia bebas berbuat semauanya menurut apa yang diinginkannya selama ia melihat dalam perbuatan itu terdapat kebahagiaan.

Sedangkan Islam menerangkan bahwa dibalik alam semesta, manusia hidup, terdapat Khalik yang menciptakan segala sesuatu yaitu Allah, asas mabda ini adalah keyakinan akan adanya Allah. Nampak bahwa hubungan alam sebagai makhluk, dengan Allah sebagai pencipta dalam aspek rohani yang ada pada alam. Mengenai kebahagiaan, kebahagiaan dalam mabda ini bukan sekedar memuaskan kebutuhan jasmani, dan mencari kenikmatan, melainkan mendapat ridha Allah. Segala sesuatu kehidupannya selalu terpaut dengan Islam sehingga tidak memiliki kebebasan mutlak. Aqidah seorang muslim terdiri dari batas Batas Islam dan tidak bebas. Lihat Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham al Islam...*, *Op. Cit.*, hlm.39-48.

sehat yang dimaksud kaidah berfikirnya tidak berlandaskan materi atau kompromi.⁶⁵

Dengan kedua kriteria tersebut Taqiyuddin an Nabhani menguraikan satu persatu segi perbedaan masing-masing dan sesuai tidaknya dengan kedua kriteria tersebut, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Islamlah ideologi yang benar, sedangkan kapitalisme dan sosialisme yang salah.⁶⁶ Kendati Taqiyuddin an Nabhani menolak dengan tegas ide-ide atau konsep-konsep yang kebetulan kebanyakan besar dari Barat, namun ia tidak bisa digolongkan atau dikategorikan sebagai “*escapist*”.⁶⁷ Menolak semua yang datang dari Barat. Taqiyuddin an Nabhani hanya menolak konsep-konsep mengenai peraturan masyarakat yang lahir dari sebuah ideologi, dalam hal ini ideologi kapitalisme dan sosialisme. Alasannya, sebuah konsep mengenai pengaturan masyarakat pasti terkait dengan cara pandang seseorang atau masyarakat terhadap dunia (*aqidah*).⁶⁸ Oleh karena itu, ketika aqidahnya salah dan

⁶⁵.Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham al-Islam... Op, Cit.*, hlm. 22-39

⁶⁶.Dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani bahwa mabda' (ideologi) muncul dari pemikiran seseorang, baik melalui wahyu Allah yang diperintahkan untuk mendakwahnya, misalnya Islam atau dari kejeniusan seseorang, misalnya ideologi kapitalis dan sosialis. Ia mengemukakan bahwa ideologi yang muncul dari pemikiran manusia melalui wahyu Allah adalah ideologi yang benar. Sebab, bersumber dari Al-Khaliq (Allah SWT), yaitu pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan. Ideologi ini pasti kebenarannya (qath'i). sedangkan ideologi yang muncul dari pemikiran manusia karena kejeniusannya adalah ideologi yang salah (batil). Sebab, berasal dari akal manusia yang terbatas, yang tidak mampu menjangkau segala sesuatu yang nyata. Di samping itu, pemahaman manusia terhadap proses lahirnya peraturan selalu menimbulkan peraturan yang saling bertentangan, yang mendatangkan kesengsaraan manusia. Oleh karena itu, ideologi yang muncul dari pemikiran seseorang adalah ideologi yang salah, baik dilihat dari segi aqidah maupun peraturan yang lahir dari aqidah tersebut. Lihat *Ibid.*, hlm. 25.

⁶⁷.Kata *escapist* tersebut bermakna orang yang suka memasuki alam khayal atau lari dari kenyataan. Lihat Jhon.M.Echols dan Hasan sabhily, *Kamus Inggris-Indonesia*, tp Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1976, hlm. 218

⁶⁸ Dari segi aqidah, ideologi komunis memandang bahwa segala sesuatu berasal dari materi yang berkembang mewujudkan benda-benda lainnya berdasarkan evolusi materi.

Sedangkan ideologi kapitalis mengharuskan pemisahan agama dari kehidupan. Akibatnya lahirlah ideologi sekuler, yang memisahkan Agama dan Negara.

bertentangan dengan Islam, bisa dipastikan aturan-aturan yang lahir dari aqidah tersebut juga salah.

Demokrasi yang dianut oleh mabda ini (Kapitalisme) berasal dari pandangannya bahwa manusia berhak membuat peraturan (Undang-Undang), menurut mereka, rakyat adalah sumber kekuasaan. Rakyatlah yang membuat peraturan perundang-undangan, Rakyat berhak mencabut kembali kekuasaan itu dari Kepala Negara, sekaligus menggantinya, termasuk merubah Undang-Undang sesuai dengan kehendaknya. Awal kemunculan demokrasipun terlihat bahwa ide ini dianggap sebagai kompromi (jalan tengah) antara pemuka agama yang menghendaki segala sesuatunya harus tunduk kepada mereka-dengan mengatasnamakan agama, dengan para filosof dan cendikiawanyang mengingkari adanya agama dan dominasi para pemuka agama, jadi ide sekularisme sama sekali tidak mengingkari adanya agama, tetapi juga tidak memberikan peranan agama dalam kehidupan. Berdasarkan hal ini maka jelas aqidah yang dianut oleh barat secara keseluruhan adalah aqidah sekularisme,

Sedangkan Islam ,memandang bahwa Allah adalah Pencipta segala sesuatu. Dialah yang mengurus para Nabi dan Rasul dengan membawa agama untuk seluruh ummat manusia. Dan bahwa kelak manusia akan dihisab perbuatannya di hari kiamat.

Dari segi bagaimana lahirnya peraturan dari Aqidah, ideology komunis memandang bahwa peraturan diambil dari alat-alat produksi. Pada masyarakat feodal, misalnya kapak menjadi alat produksi. Dengan penggunaan kapak ini lalu ditetapkan sistem feodalisme. Jika masyarakat berkembang menjadi masyarakat Kapitalis, maka alat-alat mesin menjadi sarana produksi. Dengan penggunaan mesin ini terbentuklah sistem kapitalisme. Jadi, peraturan mabda itu diambil dari evolusi materi.

Lain halnya dengan ideologi Kapitalis, yang memandang bahwa karna manusia telah memisahkan agama dengan kehidupan, maka mau tidak mau harus membuat peraturan sendiri tentang kehidupan. Karenanya, peraturan dalam sistem kapitalis diambil dari realita kehidupan manusia, dan dibuatlah aturannya sendiri.

Sedangkan Islam memandang bahwa Allah telah menentukan bagi manusia aturan hidup untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Dia mengutus nabi Muhammagma membawa aturannya untuk disampaikan kepada manusia. Manusia harus berjalan sesuai aturannya. Oleh karnanya jika seseorang menemui problematika, maka ia harus menggali (berijtihad guna menemukan) pemecahannya dari kitab(Al qur'an)dan sunnah. Lihat. Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham al Islam...*, Op. Cit., hlm. 50-51.

peisahan agama dari kehidupan. Akan tetapi sekalipun demokrasi berasal dari ideologi mabda ini, akan tetapi kurang menonjol dibandingkan dengan sistem ekonominya. Buktinya sistem kapitalisme di Barat ternyata sangat mempengaruhi elite kekuasaan sehingga mereka tunduk kepada (pemilik modal) Kapitalis. Bahkan hampir-hampir dapat dikatakan, bahwa kapitalislah yang menjadi penguasa sebenarnya di negara-negara yang menganur mabda ini. Di samping itu, demokrasi bukanlah ciri khas mabda ini, sebab komunis juga menyuarakan dan menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, jadi lebih tepat mabda ini dinamakan mabda kapitalisme.⁶⁹

Adapun terhadap teknologi, Taqiyuddin an Nabhani mengaggapnya sebagai sesuatu yang netral, sepanjang tidak tampak pengaruh pandangan hidup (*hadharah*)⁷⁰ dalam teknologi yang dihasilkan. Oleh karena itu, umat Islam boleh mempelajari dan mengambilnya. Teknologi semacam ini diistilahkan oleh Taqiyuddin an Nabhani sebagai *madaniyah 'amm*. *Madaniyah 'amm* didefinisikan oleh Taqiyuddin an Nabhani sebagai “*Bentuk-bentuk fisik bagi benda-benda yang terindra yang digunakan dalam berbagai urusan kehidupan dan tidak dipengaruhi oleh hadharah*”.⁷¹ Untuk memperjelas pendapatnya, Taqiyuddin an Nabhani membedakan antara ilmu (sains) dan *tsaqafah*. Ilmu adalah “*Pengetahuan yang diperoleh melalui*

⁶⁹Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham al Islam...*, *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁷⁰*Hadharah* adalah “Sekumpulan Mafahim (ide yang dianut dan mempunyai fakta) tentang kehidupan”. Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham al-Islam...*, *Op. Cit.*, hlm 92.

⁷¹Contoh *madaniyah 'amm* tersebut; teknologi pesawat terbang, teknologi informasi, teknologi nuklir, dan lain-lain. Kebalikan dari *madaniyah 'amm* adalah *madaniyah khas*. *Madaniyah khas* didefinisikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani sebagai *madaniyah* yang telah dipengaruhi *hadharah*. Misalnya, patung, lukisan makhluk hidup, salib, dan sebagainya. Lihat *Ibid*.

metode eksprimen dan percobaan-percobaan” (secara fisik). Sedangkan tsaqafah diartikan sebagai “Pengatahuan yang diperoleh melalui metode pemberitaan (ikhbar), pertemuan (talaqqi) dan istinbath”. Misalnya, tsaqafah adalah sejarah, bahasa, dan semua pengetahuan yang tidak diperoleh melalui eksprimen. Perbedaannya menurut Taqiyuddin an Nabhani ilmu bersifat netral atau alami. Artinya, ilmu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia (bangsa) dan tidak khusus untuk umat tertentu saja. Sedangkan tsaqafah, ada yang khusus dan ada yang umum. Yang khusus disandarkan kepada umat tertentu yang menghasilkan atau sesuatu yang menjadi kekhasan dan perbedaan tsaqafahnya dengan tsaqofah umat-umat yang lain, sehingga berlakunya pun khusus untuk umat manusia yang melahirkannya. Misalnya, pergaulan pria dan wanita, etika, sejarah kepahlawanan, dan falsafah hidup. Sedangkan tsaqafah yang umum, berlaku umum, sekalipun yang menghasilkan orang atau umat tertentu. Misalnya perdagangan, pelayaran, dan lain-lain.⁷²

⁷²Taqiyuddin An-Nabhani, *Assyahsiyah al-Islamiyah...*, Op. Cit., hlm., 372-374

BAB III

DEMOKRASI DAN TELAAH KRITIS TAQIYUDDIN AN-NABHANI

A. Pengertian dan Hakikat Demokrasi

Sebelum membahas bagaimana telaah Taqiyuddin An Nabhani terhadap konsep demokrasi, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu tentang pengertian, dan hakikat demokrasi.

Demokrasi tampaknya telah menjadi sistem yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia. Mungkin tidak ada satu negeri pun dibelahan bumi ini yang tidak mengenal demokrasi. Namun, kata demokrasi memiliki banyak penafsiran. Akibatnya, pada praktiknya demokrasi tidaklah seragam di berbagai negara, termasuk negara di Amerika dan Eropa sekalipun. Karena itu sampai saat ini perdebatan seputar negara mana yang dianggap paling demokratis menjadi tampak absurd¹. Pasalnya, standar yang digunakan untuk mengukur demokratis - tidaknya sebuah negara sering tidak sama. Tidak aneh jika seorang tokoh Muslim dan partai Islam di negeri ini pernah mengatakan, bahwa sesungguhnya Indonesia lebih demokratis daripada Amerika Serikat.

¹Absurd merupakan kata latin yang terbentuk dari *ab* (tidak) dan *surdus*(dengar). Arti harfiah, “*tidak enak di dengar*”. Absurd sering diartikan antara lain, “*tidak masuk akal*”, “*tidak sesuai dengan akal*”, “*tidak logis*”. Beberapa pengertian absurd diantaranya: 1. Bertentangan dengan rasio. Berlawanan dengan aturan-aturan logika, dengan apa yang jelas dengan akal sehat bagi kebenaran; 2. Dalam refleksi filosofis beberapa filsuf eksistensial, absurd mengacu pada kehidupan yang tidak berarti, tidak konsisten dan tidak mempunyai struktur. lihat: Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, cet. V, 2005, hlm. 9-10.

Alasannya sangat sederhana, Indonesia pernah memiliki presiden perempuan. Sedangkan Amerika Serikat belum pernah memiliki hingga hari ini.²

Hingga saat ini, *demo kratia* dianggap sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan yang paling baik. Setiap negara modern menerima mutlak perlunya demokrasi ditegakkan. Jika suatu negara gagal menerjemahkan substansi demokrasi dalam praktek politik, negara itu tetap berusaha mengambil format demokrasi bagi pemerintahannya, dan memberikan nama demokrasi secara jelas, walaupun diberi tambahan prediket-prediket tertentu. Misalnya: menjadi Demokrasi Liberal; Demokrasi Rakyat; Demokrasi Sentral; Demokrasi Terpimpin dan lain sebagainya.³ Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara terjamin. Oleh sebab itu hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat, walaupun secara operasional implikasinya diberbagai negara tidak selalu sama.⁴

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan hidup rakyat.⁵

²Farid Wadjiji & Shiddiq al Jawi, et.al., *Ilusi Negara Demokrasi: Negara Demokrasi memang Ilusi(sebuah pengantar)*, al Azhar Press, Bogor, 2009, hlm. 14.

³Kumpulan karangan majalah Prisma, Demokrasi dan proses politik,

⁴Moh. Mahfudh, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cet. II, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 19.

⁵*Ibid.*

Dari segi defenisi, pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*etimologis*), dan istilah (*terminologis*). Secara etimologis, *Demokrasi* terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan⁶. Jadi, secara bahasa *demoscratein* atau *demos cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.⁷ Dalam istilah dari Abraham Lincon (1809-1895), demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁸

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dimukakan para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Joseph A. Scmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan Institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh

⁶Kedaulatan (*siyadah*) juga didefenisikan sebagai upaya menangani dan menjalankan suatu kehendak atau aspirasi tertentu. Lihat, Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham al Hukum fi al Islam*, 1990, hlm 40.

⁷Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 110. Suatu negara dikatakan negara jika negara tersebut berdaulat. Suatu negara dikatakan berdaulat jika negara tersebut memiliki kekuasaan penuh dan eksklusif untuk membuat dan memaksakan hukum-hukum (Law Envircement) berlaku untuk seluruh rakyat yang hidup di bawah negara tersebut. Setiap negara yang berdaulat kekuasaan tertinggi atas keputusan-keputusan yang diambil terletak pada *somewhere* dalam struktur politik pemerintahan. Di dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi harus diletakkan pada tangan seluruh rakyat, bukan pada salah satu atau elite atau kelompok tertentu dalam negara tersebut. Lihat, Miftah Thoha, *Birokrasi dan politik di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007, hlm. 100.

⁸Buletin Dakwah, Al Islam: *Demokrasi Tinggalkan, Khilafah Tegakkan*, Edisi 445, Lihat juga: <http://www.HizbutTahriri.or.id>. Lihat juga, al Wa'ie, *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Demokrasi Sistem Kufur*, No 104 Tahun IX, 1- 30 April 2009, hlm. 14.

kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.⁹

b. Sydney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.¹⁰

c. Henry B. Mayo memberikan pengertian sebagai berikut:

*A Democratic Political system is one in which public policies are made on a majorit basis, by representative subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under condition of political freedom.*¹¹

(Sistem politik Demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.)

Walaupun banyak para ilmuwan dan pemikir yang mencoba mendefinisikan makna kata demokrasi, namun terlihat jelas bahwa dari berbagai macam pengertian yang telah diberikan, dapat dilihat bahwa pada intinya, makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960, hlm. 70.

masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan nasib hidup rakyat. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.¹²

Dari paparan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal: *Pertama*, Pemerintahan dari Rakyat (*goverment of the people*); *Kedua*, Pemerintahan oleh Rakyat (*goverment by people*); *Ketiga*, Pemerintahan untuk Rakyat (*goverment for people*). Jadi, hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal di atas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan.¹³

¹²*Ibid.* Dengan logika antithesis, lawan kata Demokrasi adalah totalitarianisme. Jika tidak demokratis, pasti totaliter. Totalitarianisme memiliki kesan buruk, kejam, dan bengis. Akibatnya negara-negara komunis sekalipun tidak ketinggalan ikut memakai istilah demokrasi, walaupun diberi tambahan dengan “Demokrasi Sosialis” atau “Demokrasi Kerakyatan”. Dalam kaitannya dengan ini, UNESCO pada tahun 1949 menyatakan”...*Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, Demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh..*” Gejala serupa juga melanda dunia Islam. Para Intelektual muslim berupaya mencari titik temu antara Demokrasi dan ajaran Islam. Partai-partai politik Islam, misalnya di negeri ini berlomba mengklaim diri sebagai paling “Demokratis” agar tidak terkena serangan panah beracun dari pihak Islam phobia yang mencap Islam sebagai agama Totaliter dan Dogmatis. Mereka bersusah payah “melindungi”nama baik agamanya dengan ungkapan-ngkapan bernada “defensif apologetic”(upaya pembelaan diri dengan menggunakan pola pikir pihak penyerang karena takut dianggap berbeda dengan orang lain. Misalnya: “Tidak, Islam Justru sangat Demokratis “ atau Islam tidak Dogmatis” dan lain-lain. Orang ang menggunakan *defensive apologetic* biasanya akan terseret untuk terjebak dalam alur pemikiran pihak penyerang.Lihat.al Wa’ie, *Media Politik dan Dakwah; membangun Kesadaran Ummat; Menggugat 56 Tahun PBB; Demokrasi Peradaban Sampah*, No 14 Tahun II, 1-31 Oktober 2001, hlm. 30.

¹³Pemerintahan dari rakyat (*Goverment of the People*) mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui dan pemerintahan yang tidak sah dan

Inilah yang menjadi prinsip pokok Demokrasi, suara rakyat dianggap sebagai sumber hukum (*Source of Law*) yang paling pokok dan tinggi. Rakyat adalah pemilik kekuasaan (*The voice of God is The voice of People*).¹⁴ Karena itu kebenaran harus didasarkan pada suara mayoritas rakyat. Rakyat mempunyai otoritas mengangkat dan memberhentikan pemimpin. Rakyat juga berhak membuat peraturan dan undang-undang karena mereka adalah pemilik kedaulatan. Berdasarkan prinsip penting ini perkara yang benar dan salah kemudian ditentukan oleh suara manusia atas nama suara rakyat, atau suara mayoritas.¹⁵

Menurut konsep dasar demokrasi, yaitu pemerintahan yang diatur sendiri oleh rakyat, seluruh rakyat harus berkumpul di tempat umum.¹⁶ Mereka kemudian membuat peraturan Undang- Undang yang akan mereka

diakui di mata rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan dari masyarakat dan sebaliknya.

Pemerintahan oleh rakyat (*Goverment by the People*) berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Bukan atas dorongan dan keinginan sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam kekuasaan rakyatnya. Karena itu pemerintah harus tunduk kepada pengawasan rakyat. Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung yaitu melalui perwakilannya di parlemen (DPR).

Pemerintahan untuk rakyat (*Goverment by the people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus di dahulukan dan diutamakan di atas segalanya. Untuk itu pemerintah harus mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan dan program-programnya. *Ibid.*

¹⁴Muhammad Imarah, *Perang terminologi Islam Versus Barat*, Rabbani Press, Jakarta, 1998, hlm.178.

¹⁵al Wa'ie, ...*Demokrasi Sistem Kufur*..., hlm. 3.

¹⁶Berkumpulnya masyarakat di tempat umum, terinspirasi fakta Negara Kota (polis) di kota Athena. Yunani pada sekitar tahun 40 SM yang mempraktikkan penglibatan seluruh anggota warga kota dalam proses pengambilan keputusan. lihat, al Wa'ie, ...*Demokrasi sistem Kufur; Islam Menolak Demokrasi*... hlm. 14.

terapkan, mengatur berbagai urusan serta memberikan keputusan terhadap masalah yang perlu diselesaikan.¹⁷

Namun demikian, karena seluruh rakyat tidak mungkin dikumpulkan di satu tempat hingga masing-masing memerankan diri sebagai lembaga legislatif, maka mereka kemudian memilih para wakilnya, sehingga para wakil inilah yang menduduki Lembaga Legislatif. Lembaga inilah yang disebut dengan Dewan Perwakilan.¹⁸ Dalam sistem demokrasi juga, dewan perwakilan ini diklaim merupakan representasi dari kehendak umum rakyat, dan sekaligus merupakan penjelmaan politis dan kehendak umum mayoritas rakyat. Dewan ini kemudian memilih pemerintah dan kepala negara yang akan menjadi penguasa sekaligus wakil rakyat dalam pelaksanaan kehendak umum rakyat. Kepala negara mengambil kekuasaan dari rakyat yang telah memilihnya. Ia lantas memerintah rakyat dengan peraturan dan undang-undang yang dibuat atas nama rakyat. Walhasil, rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara mutlak, rakyatlah yang berhak menetapkan undang-undang dan rakyat pula yang akan melaksanakan undang- undang tersebut.¹⁹

¹⁷ Abdul Qadim Zallum, *Ad-Dimuktatiah Nizham al Kufr*. Terj. Shiddiq al Jawi, *Demokrasi Sistem Kufur*, Pustaka Thariqul izzah, Bogor, cet. V, 2008, hlm. 4.

¹⁸ Rakyat dikatakan berdaulat sepanjang mereka- wakil rakyat masih mempunyai kekuasaan tertinggi (*Ultimate Power*) untuk memutuskan dimana kekuasaan membuat keputusan tetap berada di tangannya dan yang bisa didelegasikan kepada siapa saja yang bisa bertanggung jawab pada periode waktu tertentu. Lihat, Miftah Thoha, *Op. Cit.*, hlm. 100-101.

¹⁹ *Ibid.*

B. Latar Belakang Munculnya Demokrasi

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan Hukum di Yunani kuno dan dipraktikan dalam hidup bernegara antara abad ke 6 SM sampai abad ke 4 SM. Demokrasi yang dipraktikan pada masa itu berbentuk Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung itu berjalan secara efektif karena negara kota (*City State*) Yunani Kuno yang berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah yang hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Selain itu ketentuan untuk menikmati hak demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi, sedangkan bagi warga negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmatinya.²⁰

Gagasan Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada abad ini masyarakat dicirikan oleh struktur masyarakat feodal²¹, kehidupan spiritual dikuasai oleh Paus dan pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai dengan perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Dengan demikian, kehidupan sosial politik dan agama pada masa itu ditentukan oleh

²⁰ . IM ICCE UIN Jakarta, *Op.Cit.*, hlm. 125.

²¹ Feodalisme adalah bentuk masyarakat sosio-komunis dengan pola hubungan tuan-hamba yang menginginkan sistem pemilikan budak dan penumpukan kekayaan. Ciri khas feodal ini yakni, alat utama produksi berada dalam genggamannya dan kekuasaan kelompok tuan-tuan feodal yang berkuasa, sedangkan kegiatan ekonomi dijalankan oleh segelintir produsen. lihat, Lorens Bagus, *Op. Cit.*, hlm. 239.

elit-elit masyarakat yaitu kaum bangsawan dan kaum agamawan. Karena itu demokrasi tidak muncul pada abad pertengahan (abad kegelapan).²²

Namun demikian, menjelang akhir abad pertengahan, timbul kembali keinginan untuk menghidupkan demokrasi. Lahirnya *magna charta* sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan raja John Inggris merupakan tolak baru kemunculan demokrasi. Dalam *magna charta* itu ditegaskan bahwa raja , mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak *hudud* bawahannya. Selain itu piagam tersebut juga memuat prinsip dasar. *Pertama*, adanya pembatasan kekuasaan raja; *Kedua*, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.²³

Peristiwa lain yang mendorong timbulnya kembali demokrasi di Eropa yang sempat tenggelam pada abad pertengahan adalah reformasi yaitu suatu gerakan revolusi agama yang terjadi di Eropa abad ke 16 yang bertujuan memperbaiki keadaan gereja Katolik. Sebelum gerakan reformasi ini muncul kekuasaan gereja begitu dominan dalam menentukan tindakan warga negara pada masa itu. Karena segala hal ditentukan oleh gereja.²⁴

Pada masa itu terjadi perlawanan terhadap kekuasaan gereja dan kaisar yang sarat dengan penyimpangan dan penindasan terhadap rakyat dengan mengatasnamakan agama. Saat itu para raja dan kaisar memanfaatkan agama sebagai alat eksploitasi, menzalimi dan menghisap darah rakyat. Tindakan ini lebih disebabkan karena adanya suatu anggapan bahwa raja dan kaisar adalah wakil Tuhan di muka bumi. Para raja dan kaisar lalu

²² TIM ICCE UIN Jakarta, *Op. Cit.* hlm. 126.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

memanfaatkan para rohaniawan sebagai tunggangan untuk menzalimi rakyat. Akibatnya terjadi pergolakan sengit antara penguasa tersebut dengan rakyatnya sendiri.²⁵

Pada saat itulah para pemikir dan filosof bangkit dan muncullah gerakan reformasi gereja yang menentang dominasi gereja, dan menghendaki disingkirkannya agama dalam kehidupan dan menuntut kebebasan yang selama ini dikungkung oleh gereja. Sebagian dari mereka mengingkari keberadaan agama secara mutlak, sebagian lagi mengakui keberadaan agama, tetapi memprasyaratkan adanya pemisahan agama dari kehidupan.²⁶ Puncaknya adalah revolusi prancis tahun 1789 yang berujung pada sekularisasi, yaitu upaya kompromistik untuk memisahkan gereja dan masyarakat, negara dan politik.²⁷

Pada masa itu orang mencari suatu model agar kekuasaan tidak dimonopoli oleh satu orang, keluarga kerajaan, kaum bangsawan atau penguasa gereja.²⁸ Pergolakan ini berakhir dengan suatu jalan tengah yaitu pemisahan agama dari kehidupan yang dengan sendirinya akan menyebabkan pemisahan Agama dan Negara.²⁹ Satu-satunya bahan yang tersedia bagi para pemikir pada abad pertengahan adalah sejarah Yunani Kuno. Dari sejarah itu mereka belajar bahwa di kota Athena tempo dulu diterapkan satu sistem yaitu seluruh warga kota turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Sistem tersebut dianggap sistem yang baik bagi para pemikir abad pertengahan pada

²⁵ Abdul Qadim Zallum, *Op. Cit.*, hlm. 6.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ al Wa'ie, ... *Demokrasi Sitem Kufur...*, hlm. 10.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abdul Qadim Zallum, *Op. Cit.*

masa itu. Mereka yang sedang tertekan oleh kediktatoran para raja dan kaum bangsawan serta para penguasa gereja kemudian mengadopsi sistem Athena tersebut dan mempopulerkannya dengan nama “demokrasi”.³⁰

Dari latar belakang munculnya Demokrasi seperti yang telah tertera di atas terlihat bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia dalam rangka “membebaskan manusia” dari kezaliman dan penindasan penguasa atas nama agama.

C. Kriteria Demokrasi

1. Asas Demokrasi

Demokrasi dilandaskan pada dua gagasan besar :

1. Kedaulatan di tangan rakyat
2. Rakyat merupakan sumber kekuasaan

Kedua gagasan tersebut tentunya dicetuskan oleh para filosof dan pemikir Eropa ketika mereka melawan para kasar dan raja untuk menghapus ide tentang ke-Tuhanan (*Divine Rights*) yang menguasai Eropa pada waktu itu. Melalui gagasan ini pula, rakyat dianggap sebagai pihak yang harus diatur. Rakyat, dengan demikian berkedudukan sebagai budak yang tidak memiliki hak untuk berpendapat atau melontarkan kehendak. Mereka hanya memiliki kekuasaan untuk taat kepada penguasa dan melaksanakan perintahnya.³¹

³⁰al Wa'ie...*Demokrasi Sistem Kufur...*, Op. Cit. Dalam Demokrasi ini rakyat yang berdaulat adalah rakyat yang secara nyata bisa menentukan mulai dari siapapemimpin yang mereka kehendaki, dan pemerintahan yang bagaimana yang mereka kehendaki serta bagaimana program pembangunan bangsa yang diinginkan oleh rakyat.lihat.Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, Rosda, Bandung, 2000, hlm.115.

³¹*Ibid.*

Karena itu, muncullah dua gagasan tersebut untuk menyelamatkan rakyat dari penindasan. Kedua gagasan yang menjadi landasan demokrasi ini kemudian disebarluaskan dalam rangka menghancurkan ide tentang hak ketuhanan secara menyeluruh, sekaligus memiliki hak pembuatan peraturan dalam pemilihan penguasa kepada rakyat. Kedua ide tersebut didasarkan pada anggapan bahwa rakyat adalah tuan pemilik budak, bukan budak yang dikuasai tuannya. Artinya, rakyat adalah tuan bagi dirinya sendiri, tidak ada satu apapun yang dapat menguasainya. Rakyat memiliki kehendaknya sendiri dan melaksanakan sendiri kehendaknya itu. Jika tidak demikian, rakyat akan menjadi budak.³²

Untuk membebaskan rakyat, mereka harus dianggap sebagai satu-satunya pihak yang berhak menjalankan kehendaknya sendiri. Dengan begitu, rakyat memiliki hak untuk menetapkan peraturan yang dikehendaknya atau sebaliknya. Rakyat pula yang merupakan satu-satunya pihak yang berhak melaksanakan peraturan yang ditetapkannya, memilih penguasa (*badan eksekutif*) dan hakim (*badan yudikatif*) yang dikehendaknya untuk menetapkan peraturan yang dikehendaknya. Sebab, rakyat adalah sumber seluruh kekuasaan, sementara penguasa, hanya mengambil kekuasaanya dari rakyat.³³

³² Hakikat perbudakan itu sendiri terjadi ketika salah satu hak – yakni rakyat-dikendalikan oleh kehendak pihak lain. Dengan kata lain, jika rakyat tidak menjalankan kehendaknya sendiri, berarti mereka akan tetap merupakan budak. lihat. *Ibid.*, 9.

³³ *Ibid.*

Dengan berakhirnya pergolakan tersebut, maka kedua ide yang menjadi landasan demokrasi tersebut.-. Dua ide inilah yang menjadi asas dalam sitem demokrasi.³⁴

Walhasil, dalam sitem demokrasi yang bertindak sebagai *musyarri'* (pembuat hukum) dalam kedudukannya sebagai pemilik kekuasaan, sekaligus sebagai *munaffisdz* (pelaksana hukum) dalam kedudukannya sebagai sumber kekuasaan.³⁵ Dalam hal ini, lebih jelasnya, kekuasaan berada di tangan ummat, maksudnya rakyat memilih penguasa yang diinginkannya untuk menetapkan hukum- aturan dan sistem yang ditetapkan oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan, baik secara langsung ataupun melalui wakilnya di parlemen.³⁶ Rakyat juga berhak memberhentikan penguasa dan menggantinya dengan penguasa lain. Artinya rakyat yang memiliki kekuasaan, sedangkan penguasa mengambil kekuasaanya dari rakyat.

II. Demokrasi berdasarkan suara mayoritas.

Dalam Negara Demokrasi, apabila rakyat menyetujui secara bulat terhadap satu kebijakan publik sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka pemerintah harus mengikuti melaksanakan kebijakan publik tersebut, namun demikian di hampir setiap negara demokrasi secara bulat seperti itu jarang bisa diwujudkan. Namun demikian keputusan politik di dalam demokrasi akhirnya menjadi alternaf kebijakan politk yang ada. Masing-masing pilihan mempunyai pendukung dari orang-orang atau rakyat yang berdaulat tersebut.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ al Wa'ie; *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Penjajahan Melalui Undang-Undang*, No 70 Tahun VI, 1- 30 Juni, 2006.

Konsekwensinya dalam situasi tertentu ada kelompok yang menang dan ada pula kelompok yang kalah. Dan bagaimana seharusnya pemerintahan yang demokratis itu tetap berdiri di atas prinsip bahwa proses pengambilan keputusan berada pada tangan seluruh rakyat. Persoalan ini membawa pada suatu prinsip yakni “suara mayoritas.”³⁷

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan berdasarkan “suara mayoritas”. Dalam demokrasi, suara mayoritas selalu menjadi ukuran. Akan tetapi karna masyarakat tidak mungkin semuanya duduk di pemerintahan. Karena itu muncul konsep perwakilan rakyat.³⁸ Anggota-anggota lembaga legislatif dipilih berdasarkan suara mayoritas pemilih dari kalangan rakyat. Penetapan peraturan dan undang-undang serta pemberian mosi percaya atau tidak percaya kepada pemerintah dalam dewan perwakilan ditetapkan juga berdasarkan “suara mayoritas”. Demikian pula penetapan keputusan dalam dewan perwakilan, kabinet, bahkan dalam seluruh lembaga dan organisasi lainnya. Pemilihan penguasa oleh rakyat, baik langsung maupun melalui para wakilnya, ditetapkan pula berdasarkan “suara mayoritas” pemilih dari rakyat.³⁹ Dalam demokrasi juga, solusi terakhir ketika terjadi perselisihan adalah suara terbanyak, yang dijadikan sebagai pemutus adalah suara terbanyak. Ide, aspirasi atau kebijakan apapun yang mendapatkan dukungan

³⁷Adapun prosedur biasanya dipergunakan oleh setiap negara, untuk mencapai suara mayoritas, itu diwujudkan dengan persetujuan dari 50% plus satu suara rakyat. Sepanjang proporsi dari rakyat mejadi pertimbangan yang utama apapun wujudnya maka suara mayoritas rakyat sangat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Lihat, Miftah Thoha, *Op. Cit.* hlm. 105-106.

³⁸Buletin Dakwah AL ISLAM, *Demokrasi Tinggalkan, Khilafah Tegakkan!*, Edisi 445.

³⁹Abdul Qadim Zallum, *Op. Cit.*, hlm. 10.

suara terbanyak harus diterima sebagai keputusan terakhir yang ditaati oleh semua pihak.⁴⁰

Oleh karena itu, "suara mayoritas" adalah ciri menonjol dalam sistem demokrasi. Pendapat mayoritas, menurut demokrasi, merupakan tolak ukur hakiki yang dapat mengungkapkan pendapat rakyat sebenarnya.

III. Jaminan atas kebebasan umum

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas bahwa rakyat adalah penguasa bagi dirinya sendiri serta dapat melaksanakan kedaulatan dan menjalankan kehendaknya sendiri secara sempurna - baik dalam pembuatan undang-undang, peraturan hidup maupun dalam pemilihan penguasa-tanpa disertai tekanan atau paksaan, maka berbagai kebebasan yang bersifat umum atau universal merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam sistem demokrasi. Kebebasan umum ini berlaku pada setiap individu rakyat. Dengan begitu rakyat akan dapat mewujudkan kedaulatannya sekaligus merealisasikan dan menjalankan kehendaknya sendiri sebebaskan-bebasnya tanpa tekanan atau pasaaan.⁴¹ Kebebebasan individu ini merupakan prinsip dan parameter demokrasi.⁴² Dapat dikatakan bahwa dalam sistem demokrasi, kebebasan adalah faktor utama untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan kehendaknya, secara sempurna tanpa batasan atau tekanan.

⁴⁰Al Wa'ie; *Media Politik dan Dakwah ; Membangun Kesadaran Ummat; Aktualisasi Hijrah*, No. 89 Tahun. VIII, 1-31 Januari, 2008, hlm. 55.

⁴¹*Ibid.*, hlm.5.

⁴²TIIM ICCE UIN Jakarta, *Op. Cit.*, hlm. 122.

Kebebasan pertama, yakni kebebasan berakidah (*Freedom of Religion*).

Dalam demokrasi setiap individu mendapat kebebasan memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Tidak seorangpun memiliki kekuasaan untuk memaksakannya terikat dengan suatu aqidah tertentu, atau memaksanya untuk melepaskan aqidah tertentu.⁴³ Dalam hal ini, dalam demokrasi setiap individu juga mendapat kebebasan berganti-ganti agama dan aqidah sesuai kemauannya. Tidak seorangpun berhak memaksa untuk memeluk suatu agama tertentu dan tidak seorangpun berhak menghalangi seseorang yang bila awal hidupnya ia memeluk agama yang ia sukai, seperti Hindu, Budha Sekularisme dan lain sebagainya.⁴⁴ Tidak seorangpun berhak melakukan intervensi terhadap masalah ini. Setiap individu berhak untuk mengatur kehendaknya dan menikmati kebebasannya, dengan syarat tidak menghina Aqidah orang lain, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Seorang berhak beribadah menurut agama manapun. Ia juga berhak untuk mengingkari agama-agama dan mazhab-mazhab yang ada sesuai dengan yang diperbolehkan oleh undang-undang tempat ia tinggal.⁴⁵ Ia mempunyai hak mutlak untuk melakukan itu dan dilindungi undang-undang, ia wajib secara individu menghormati undang-undang sebagai implemementasi tanggung jawab dewan yudikatif yang memberlakukan hukum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dewan legislatif, tetapi pada saat yang sama

⁴³Hafizh Shalih, *Ad Dimuqrathiyah wa Hukm al Islam fi ha*, terj Yahya Abdurrahman, *Mengadili Demokrasi*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2005, hlm.59.

⁴⁴Syeikh Muhammad Aman, bin Ali al Jamie, *Haqiqatu al Dimiqratiyyati wa Annaha Laisat min al Islam*, terj Saiful Islam, *Demokrasi Murni Bukan ajaran dari Islam*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 29. lihat juga, al Wa'ie, *...Aktualisasi Hijrah...*, *Op. Cit.*, hlm. 26. Lihat juga, Abdul Qadim Zallum, *Op. Cit.*, hlm 80.

⁴⁵Hafidh Shaleh, *Op. Cit*

individu tidak dibenarkan bebas melanggar hukum selama ia hidup dalam aturan hukum demokrasi.⁴⁶

Kebebasan Kedua, Kebebasan berpendapat(*Freedom of Opinion*).

Kebebasan ini adalah kebebasan lebih banyak dan menonjol oleh penganut paham demokrasi, yang memandang bahwa manusia memiliki hak asasi sebagai seorang manusia, bukan sebagai unsur lain dalam hidup, merea menamakannya dengan hak-hak alamiah atau hak-hak asasi.⁴⁷

Berdasarkan kebebasan berpendapat, setiap orang berhak menyatakan dan mengembangkan pendapat atau ide dalam hal apapun tanpa terikat dengan batasan. Dia berhak menyatakan atau menyerukan ide atau pendapat itu dengan sebebaskan- bebasnya tanpa ada syarat dan bagaimanapun bentuknya. Dia berhak pula mengungkapkan ide atau pendapatnya itu dengan cara apapun, tanpa ada larangan baginya untuk mengungkapkan semua itu, baik dari negara ataupun pihak lain, selama ia tidak mrngganggu kebebasan orang lain. Oleh karena itu, setiap larangan untuk mengembangkan, mengungkapkan, menyebarluaskan pendapat akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan.⁴⁸ Artinya, setiap individu berhak mencela suatu pendapat asalkan tidak melanggar hal-hal yang bersifat pribadi dan

⁴⁶Syeikh Muhammad Aman, bin Ali al Jamie, *Op. Cit*, hlm. 29-30.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁸Dalam hal ini, ia berhak menulis, menyebarluaskan, memberi ceramah, dan berbicara sesuai yang dia inginkan. Baik perkara itu terkait dalam masalah Pemerintahan, Ekonomi, Sosial ataupun Keagamaan. Lihat, Hafizh Shalih, *Op. Cit.*, hlm. 60. Lihat juga, Abdul Qadim Zallum, *Op. Cit.*, hlm. 82., lihat juga, al Wa'ie, ...*Aktualisasi Hijrah...Op. Cit.*,

selama dalam batas-batas yang dibolehkan hukum perundang-undangan yang ada. Inilah makna kebebasan pendapat dalam demokrasi.⁴⁹

Kebebasan ketiga, Kebebasan Berkepribadian (*Personal Freedom*)

Yang dimaksudkan di sini adalah kebebasan bertindak laku, baik bertindak laku terhadap dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Ide tentang kebebasan berkepribadian memberikan kepada individu kebebasan untuk menjalankan kehendaknya secara total tanpa ada paksaan atau tekanan.⁵⁰

Dalam hal ini seseorang boleh menjalankan kehendaknya dan bebas memilih hidup bersama dengan orang yang diinginkan tanpa ada tekanan dan paksaan. Seorang juga boleh bersenda gurau, bermain, makan dan bersenang-senang dalam segala hal. Tidak ada seorangpun yang berhak mengekangnya dalam hal ini. Namun semuanya harus dalam batas-batas dijamin oleh perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.⁵¹

Kebebasan Keempat, Kebebasan kepemilikan (*Freedom of Ownership*)

Dalam hal ini demokrasi membolehkan individu untuk memiliki apapun yang ia inginkan, dengan cara apapun, dan dengan tingkat atau jumlah berapapun yang mampu ia miliki. Tetapi dalam batas-batas yang

⁴⁹Hafizh Shalih, *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁵⁰*Ibid.*, hlm 62.

⁵¹Masyarakat maupun negara, satu dengan yang lain berbeda-beda dalam menekankan batas-batas kebebasan ini, meski semuanya sesuai dengan perundang-undangan masing-masing. Diantaranya ada yang membolehkan homoseksual, sebaliknya ada juga yang melarangnya. Ada dua orang yang membolehkan antara dua orang laki-laki atau dua orang perempuan sejenis, sebaliknya ada yang mengharamkannya bahkan sekedar menyebutnya saja tidak mau. Pengadilan di Amerika telah memutuskan bolehnya perkawinan sesama jenis laki-laki. Parlemen di Inggris membolehkan homoseksual, dan menilainya sebagai aktivitas legal. Begitulah dalam pertarungan yang termasuk dalam urusan individu, seorang boleh menjalankannya tanpa ada tekanan atau paksaan sedikitpun. *Ibid.*, hlm 63.

dibolehkan oleh undang-undang dan hukum-hukum yang ada. Ia tidak boleh melanggarnya begitu juga seorang individu berhak membelanjakan apa saja yang ia miliki sesuai dengan keinginannya. Dibolehkan seorang individu untuk memiliki apapun yang ia inginkan dan hal itu dijamin oleh undang-undang. Itu berarti setiap individu berhak memiliki barang konsumtif dan produktif, apapun jenisnya.

Akan tetapi, kadar kebolehan ini berbeda antara satu negeri dengan negeri lain. Selain itu individu juga dilarang untuk memiliki beberapa jenis harta, meski berbeda antara satu negara dengan negara lain tentang jenisnya. Sama halnya dengan kebolehan memiliki jenis harta dan komoditas tertentu, begitu juga sarana yang bisa mewujudkan kepemilikan, termasuk cara-cara pengembangan kepemilikan atau cara-cara penguasaan harta, misalnya jual beli, hibah dan lain-lain. Disamping itu boleh untuk membelanjakan harta sesuai keinginannya. Seorang juga berhak menghibahkan hartanya kepada orang yang diinginkan dan boleh menghabiskan hartanya dengan cara apapun yang diinginkan⁵²

D. Telaah Kritis Taqiyuddin an Nabhani terhadap Demokrasi

Kritikan yang dilontarkan oleh Taqiyuddin an Nabhani sebenarnya telah banyak pula dilakukan oleh para ulama, cendekiawan, pemikir muslim dan para pengkaji keislaman.

⁵² Hafizh Shalih, *Op. Cit.*, hlm 61.

Menurut Taqiyuddin:

ونظام الحكم في الاسلام ليس ديمقراطيا بالمعنى الحقيقي لديمقراطية ومن حيث ان
ت لتشريع للشعب يحل و يحرمو يحسن و يقبح و من حيث عدم التقيد باللاء حكام الشر
عنه باسم الحريات و لكفار يد ركون ان المسلمين لن يقبلوا الديمقراطية بمعن

تلحقني هذا

لذلك فان للدول الكافر المستعمرت تحاول تسويقها في بلاد المسلمين بادخلها عليهم من

باب التزلزل بان الديمقراطية هي اليه انتخاب الحاكم

لاء عطاء صورة مضلولة للمسلمين كاءنا لاء كراء اساس في الديمقراطية هو انتخاب

ابحاکم

ولفود وداروا على الجزء الاعساس فيها و هو هن يصبح التشريع والتحليل ائتلتحريم

للشعر و ليس لرب البشر حتى ان بعض (الاعسلتميين يل مشايخ منهم) اخذو بهذه

تلخدعه بحسن نية او يسوء نية فاء

ذ ساءليم عن ديمقراطية ا جابو ك بجوا زها على اعتبرت انها هنتخبلحاكم

وسىيون النبة منهم يلفون ويدورون مبتعدبن عن معنى الحقيقي الذى وضعه لها اهلها

من كونها تعني السيادة للشعب يشرع ما يشاء براء الاء غلبه

Menurut Taqiyuddin – yang menginginkan berdirinya negara Islam -
sistem pemerintahan Islam bukan sistem demokrasi, baik dari segi bahwa
kekuasaan membuat hukum – menetapkan halal- haram, terpuji dan tercela-
ada di tangan rakyat, maupun dari segi tidak adanya keterikatan dengan
hukum-hukum syari'ah dengan dalih kebebasan yang ada dalam paham

demokrasi. Orang-orang kafir memahami betul bahwa kaum Muslim tidak akan pernah menerima demokrasi dalam pengertiannya yang hakiki. Karena itu, negara-negara kafir penjajah (khususnya AS saat ini) berusaha memasarkan demokrasi ke negeri-negeri Muslim. Mereka berupaya memasukkan demokrasi itu ke tengah-tengah kaum Muslim melalui upaya penyesatan (*tadhilil*), bahwa demokrasi merupakan alat untuk memilih penguasa. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyesatkan dan mengaburkan pandangan kaum Muslimin, yakni seakan-akan perkara mendasar dalam demokrasi adalah pemilihan penguasa. Mereka berupaya menyembunyikan dan menutupi bagian mendasar dari demokrasi itu sendiri yaitu tindakan menjadikan kewenangan membuat hukum serta menetapkan halal-haram berada ditangan manusia, bukan ditangan Tuhan manusia. Bahkan, menurut Taqiyuddin, sebagian aktivis Islam, termasuk diantaranya para *syaiikh* (guru besar) mengambil tipuan itu, baik dengan niat yang baik maupun yang buruk. Jika ada yang bertanya kepada mereka tentang demokrasi, mereka menjawab bahwa demokrasi hukumnya boleh dengan anggapan demokrasi adalah memilih penguasa. Adapun mereka yang memiliki niat buruk berupaya menutupi, menyembunyikan, menjauhkan pengertian hakiki demokrasi sebagaimana yang ditetapkan penggagas demokrasi itu sendiri.⁵³

Mengenai makna sebenarnya dan bagaimana kritik Taqiyuddin terhadap Demokrasi akan penulis paparkan pada halaman berikutnya.

⁵³Taqiyuddin an Nabhani, *Ajhizah ad Daulah al Khilafah*, terj Yahya A.R, *Struktur Negara Khilafah*, HTI Press, Jakarta, 2006, hlm. 25.

I. Kritik terhadap pengertian Demokrasi

Menurut Taqiyuddin an Nabhani, apabila ditelusuri kita hanya menjumpai tiga *mabda* (ideologi)⁵⁴. Yaitu Kapitalisme, Sosialisme, termasuk Komunisme dan Islam. Dua mabda pertama masing-masing diemban oleh satu atau beberapa negara. Sedangkan mabda yang ketiga yaitu Islam, tidak diemban oleh satu negarapun. Islam diemban oleh individu-individu dalam masyarakat. Sekalipun mabda ini tetap ada di seluruh penjuru dunia.⁵⁵

Kapitalisme tegak atas dasar pemisahan agama dan kehidupan (Sekularisme). Ini menjadi dasar *aqidah*nya (sebagai Asas), sekaligus sebagai *Qiyadah Fikriyah* (Kepemimpinan Ideologis), serta *Qaidah fikriyah* (Kaedah Berpikirnya). Berlandaskan qaidah fikriyah itu mereka berpendapat bahwa manusia berhak membuat peraturan hidupnya.⁵⁶ Dalam hal ini, manusia berhak membuat peraturan berdasarkan hawa nafsunya tanpa ada batasan apapun.⁵⁷

Menurut Taqiyuddin, demokrasi dianut oleh mabda ini (Kapitalisme)⁵⁸, berasal dari pandangannya bahwa manusia berhak membuat

⁵⁴Dalam halaman selanjutnya penulis akan menuliskan mabda dan ideologi secara bergantian.

⁵⁵Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham al Islam*, terj Abu Amin dkk, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2003, hlm. 39.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Pembuatan peraturan dalam mabda ini tanpa pertimbangan baik-buruk, halal-haram, kewenangan dalam hal ini diberikan kepada manusia sesuai dengan kemauannya. Sistem ini lahir dari akal manusia dan bersumber dari manusia. Lihat, Fahmi Husein al Fakri, *Islam mulai Akar ke Daunnya*, BKIM IPB Press, Bogor, 2002, hlm. 108.

⁵⁸Demokrasi dikatakan juga ideologi Kapitalisme karena dalam negara Demokrasi yang berkuasa adalah masyarakat pemilik modal bahkan bisa dikatakan kedaulatan bukan di tangan rakyat (Mayoritas) tetapi justru di tangan para pemilik modal (Pemilik modal). Oleh karenanya ideologi. Demokrasi dinamakan juga ideologi kapitalis. Lihat, Hafish Shalih, *Op.Cit.*, hlm 4. Akan tetapi sekalipun demokrasi berasal dari Ideologi (*mabda*) ini, tetapi kurang menonjol dibandingkan dengan sistem ekonominya. Buktinya, sistem Kapitalisme di Barat sangat mempengaruhi elite kekuasaan (pemilik modal). Bahkan hampir dapat dikatakan

peraturan (undang-undang). Menurut mereka, rakyat adalah sumber kekuasaan. Rakyatlah yang membuat perundang-undangan. Rakyat pula yang menggaji kepala negara untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuatnya. Rakyat berhak mencabut kembali kekuasaan itu dari kepala negara, sekaligus menggantinya termasuk merubah undang-undang sesuai dengan kehendaknya. Hal ini karena sistem kekuasaan dalam demokrasi adalah kontrak kerja antara rakyat dengan kepala negara, yang digaji untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh rakyat.⁵⁹ Menurut Taqiyuddin, dalam demokrasi, rakyatlah yang kemudian menetapkan baik-buruk, terpuji-tercela.⁶⁰

Ringkasnya, menurut Taqiyuddin, demokrasi yang bermakna kedaulatan di tangan rakyat- rakyat berwenang membuat hukum sesuai dengan kehendak rakyat berdasarkan suara mayoritas, menghalalkan, mengharamkan, serta menetapkan status terpuji dan tercela, individu memiliki kebebasan dalam prilakunya- bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Inilah realita, makna dan pengertian demokrasi.⁶¹

Dalam sistem Demokrasi, jika mayoritas rakyat menghendaki dihalalkannya riba dengan alasan bisa meningkatkan perekonomian Negara, maka hal ini harus dipatuhi oleh semua pihak. Karena kedaulatan di tangan rakyat, sekiranya seluruh ummat berkumpul, lalu menyepakati hal yang bertentangan dengan Islam-seperti membolehkan riba dalam rangka

bahwa para kapitalislah yang menjadi penguasa sebenarnya di negara yang menganut mabda ini(Demokrasi). Lihat, Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham...Op. Cit.*,

⁵⁹ *Ibid.*, 39-40.

⁶⁰ Taqiyuddin an Nabhani, *Ajhizah ...Op. Cit.*, hlm. 22.

⁶¹ Taqiyuddin an Nabhani, *Ajhizah...Op. Cit.*, hlm. 26.

meningkatkan kondisi perekonomian, membolehkan adanya lokalisasi perzinahan dengan dalih zina tidak tersebar luas di tengah masyarakat, menghapus puasa Ramadhan agar dapat meningkatkan efektivitas kerja dan lain sebagainya, jika semua ini merupakan suara mayoritas rakyat, maka hal ini akan dapat diwujudkan dalam negara yang menganut demokrasi dikarenakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan rakyat berhak membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya.

Dapat dikatakan, dalam demokrasi semua produk hukum diambil atas persetujuan rakyat, baik secara langsung (*Direct Democracy*) maupun secara tidak langsung (*Indirect Democracy*). Inilah cacat terbesar dalam demokrasi, manusia dengan segala kelemahannya dipaksa untuk menetapkan hukum atas dirinya sendiri. Pikiran manusia akan sangat dipengaruhi lingkungan dan pengalaman pribadinya. Pikiran manusia juga dibatasi ruang dan waktu. Atas pengaruh itulah manusia bisa memandang surga bagai neraka dan neraka bagai surga.⁶² Makanya tidak heran jika tolak ukur atas perbuatan adalah “kemanfaatan.”⁶³

⁶²Amien Rais, *Khilafah dan Kerajaan*(Kata penantar), Karya Abdul A’la al Mududi, Mizan, 1998, dikutip dari al Wa’ie, *Menggugat 56 tahun PBB...Op. Cit.*, hlm. 31.

⁶³Menurut Taqiyuddin, bahwa manusia memiliki *Gharizah Nau’*, yaitu keinginan mempertahankan diri dan keturunan, ini adalah fitrah manusia, selain itu, manusia juga memiliki *Gharizh Baqa’* berupa rasa lapar dan haus yang menuntutnya untuk harus berinteraksi dengan manusia lain agar dapat memenuhi kebutuhan itu. Naluri-naluri ini memiliki penampakan yang beraneka ragam. Adanya upaya pemenuhan kebutuhan inilah manusia menjadi beraneka ragam. Dengan memperhatikan fakta tentang individu ini, maka didapati adanya perbedaan, pertentangan dan perselisihan, keterpengaruhan lingkungan. Al hasil, perbedaan antara satu individu dengan individu lain adalah perkara yang pasti. Kekuatan dan ingatan manusia juga berbeda, latar belakang pemikiran juga berbeda, dan pandangan-pandangan yang dimiliki manusia juga berbeda. Pertentangan yang terjadi juga sesuatu yang alami karena berbagai tolak ukur dan keyakinan yang berbeda. Indikasi ini menunjukkan bahwa sekumpulan manusia tidak akan mampu membuat dan menetapkan hukum dengan berbagai macam problema yang ada.Lihat. Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham...Op. Cit.*, hlm. 26- 29. Lihat juga, Hafizh Shaleh, *Op. Cit.*, hlm. 37-44.

Menurut Taqiyuddin, *mabda* yang muncul dalam benak manusia melalui wahyu Allah adalah *mabda* yang benar (*Mabda Islam*). Karena bersumber dari sang Khalik, yaitu pencipta alam, manusia dan hidup, yakni Allah SWT. *Mabda* ini pasti kebenarannya (*Qath'i*). Sedangkan *mabda* yang muncul dalam benak manusia (*Demokrasi*) karena kejeniusan yang nampak pada dirinya adalah *mabda* yang salah (*Bathil*). Karena berasal dari akal manusia yang terbatas yang tidak mampu menjangkau segala sesuatu yang ada. Disamping itu, pemahaman manusia terhadap proses lahirnya peraturan selalu menimbulkan perbedaan, perselisihan dan pertentangan, yang mendatangkan kesengsaraan bagi manusia. Oleh karena itu *mabda* yang muncul dari benak seseorang (manusia) adalah *mabda* yang salah, baik dilihat dari segi Aqidahnya, maupun peraturan yang lahir dari Aqidah tersebut.⁶⁴

Taqiyuddin mengatakan:

ولهذا كانت السیّدات للشرع و لیست للدولة ولا للائمة و ائکاتب السلطة للامة
ومظهر في الدولة

Atas dasar inilah, menurut Taqiyuddin an Nabhani, dalam Islam, kedaulatan⁶⁵ hanya milik Syara', bukan milik negara atau

⁶⁴Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham...Op. Cit.*, hlm. 37.

⁶⁵Menurut Taqiyuddin an Nabhani, kedaulatan itu adalah kekuasaan yang mengelola dan mengendalikan kehendak (*al mumarisu wa al musayyiru li al iradah*). Kedaulatan (*Assiyadah/sovereignty*) yaitu kekuasaan yang tertinggi yang bersifat absuout, mutlak, yang memiliki hak mengeluarkan hukum atas perbuatan suatu benda. Istilah kedaulatan (*Asiyadah/sovereignty*) ini, meski berasal dari bahasa asing (Barat) namun boleh dipakai, karena maknanya sejak dulu ada dalam khasanah *tsaqafah* (kebudayaan) Islam. Para ulama sejak awal telah membahas masalah ini, terutama dalam bahasan *ushul fiki*h. Istilah yang dipakai adalah *al hakim*, yaitu pihak yang memiliki hak mengeluarkan hukum atas perbuatan suatu benda. Taqiyuddin an Nabhnai, dikutip dari al Wai'e, *Media Politik dan Dakwah; Membangun kesadaran Ummat; Penjajahan Melalui Undang-Undang*, No 70 Tahun VI, 1-30 Juni 2006, hlm 59.

nafsunya⁷⁴. Allah melarang kaum Muslimin mengambil hukum apapun selain hukum Islam. Dalam hal ini Allah berfirman:



“Siapa saja yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia telah kafir”⁷⁵

Disamping itu al Qur'an telah mencela orang-orang yang hendak berhukum pada hukum yang tidak dibawa oleh Rasulullah, yakni pada hukum kufur.

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? mereka hendak berhakim kepada thaghut(hukum dan undang-undang kufur), Padahal mereka telah diperintah mengingkari Thaghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.”⁷⁶

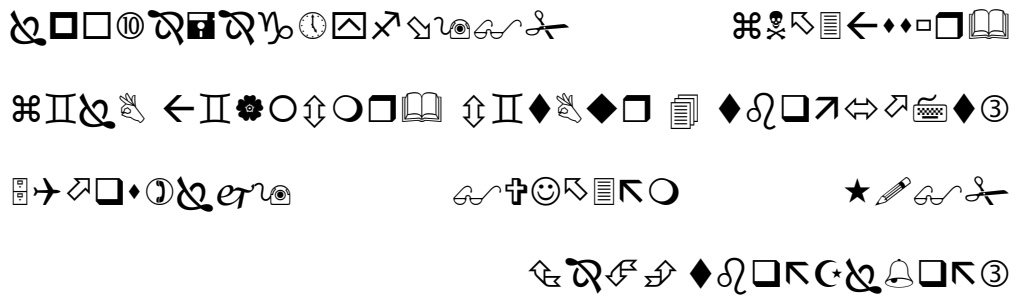
Berdasarkan penjelasan itu kepada *Taghut* artinya berhukum pada hukum yang tidak diturunkan Allah, atau dengan kata lain, berhakim pada hukum yang telah dibuat manusia.⁷⁷

⁷⁴ Bahaya dari sistem demokrasi adalah bahwa sistem ini telah menjadi agama baru bagi kaum Muslimin, demorkasi bisa membuat kaum Muslimin menjadi kufur kepada hukum Allah. Akibatnya juga, berdasarkan ide ini juga akan muncul bahwa semua agama adalah sama sehingga manusia tidak boleh membedakan atas dasar agamanya. Hal ini diperkuat dengan adanya kebebasan beragama. Lihat, al- Wa'ie...*Aktualisasi Hijrah...Op. Cit.*, hlm. 24.

⁷⁵ Q. S : al Maidah : 44.

⁷⁶ Q.S An Nisa' : 60.

⁷⁷ Abdul Qadim Zallum, *Ad Dimukratiyah...Op. Cit.*, hlm. 65.



“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?”

Masih banyak puluhan ayat dan hadist lain dengan pengertian yang *Qath’i* (pasti) yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan syari’at, yakni bahwa Allah sajalah sebagai *musyarri’*, manusia tidak boleh membuat hukum, dan manusia wajib untuk melaksanakan seluruh aktivitasnya dalam kehidupan ini sesuai dengan perintah dan larangan Allah.

Islam memandang tolak ukur suatu perbuatan dalam kehidupan adalah halal-haram, yakni perintah dan larangan Allah. Yang halal dikerjakan dan yang haram ditinggalkan. Prinsip ini tidak akan mengalami perubahan. Islam hanya menjadikan Syara’ sebagai tolak ukur, bukan manfaat.⁷⁸

Dalam Islam, seluruh kesepakatan yang dihasilkan berdasarkan pikiran manusia seperti yang telah penulis paparkan diatas, seperti dibolehkannya lokalisasi agar tidak tersebar luas pelaku pezina, membolehkan riba dalam rangka meningkatkan kondisi perekonomian dan lain sebagainya, tidak ada nilainya sama sekali dalam Islam sekalipun semua manusia berkumpul menetapkannya. Jika ada sekelompok kaum Muslim yang menyepakati hal yang bertentangan dengan Islam tersebut, maka mereka diperangi sampai

⁷⁸Taqiuddin an Nbahani, *Nizham...Op. Cit.*, hlm. 52.

mereka melepaskan diri dari ikatan tersebut.⁷⁹Demikianlah ketegasan Islam dalam menetapkan status hukum, hal ini tentunya berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia tanpa batasan nash yang jelas.

Tindakan demikian didasarkan bahwa kaum muslimin dalam seluruh aktifitas hidupnya wajib senantiasa terikat pada hukum Allah, bukan hukum buatan manusia (Demokrasi). Mereka haram melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam⁸⁰, sebagaimana mereka haram membuat satu hukumpun, karena memang Allah saja yang berhak sebagai *Musyarri'*(pembuat hukum).⁸¹

Sumber utama Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Islam adalah Alqur'an dan Sunnah. Bukan yang lain. Tempat lahirnya adalah ijtihad dan para mujtahid, bukan suara mayoritas seperti dalam demokrasi. Khalifah akan melegalisasi hukum-hukum tertentu dari hasil ijtihad tersebut dan akan memerintah rakyat untuk melaksanakannya. Kedaulatan menurut Islam hanya milik syara'. Sedangkan ijtihad untuk menggali hukum syara' adalah hak bagi seluruh Muslimin yang hukumnya Fadhu Kifayah. Akan tetapi hanya khalifah saja yang berhak melegalisasi hukum-hukum syara' tersebut.⁸²

⁷⁹Abdul Qadim Zallum, *Ad Dimukratiyah...Op.Cit.*, hlm 64.

⁸⁰Sekalipun hukum tersebut mendatangkan manfaat – menurut akal mereka-
 “Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.Q.S al Alqarah:216”

⁸¹Abdul Qadim Zallum, *Ad Dimukratiyah...Op. Cit.*

⁸²Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham...Op. Cit.*, hlm 125. Tatkala negara melegalisasikan hukum apapun, pertimbangannya adalah dalil syar'i yang kuat disertai pemahaman yang tepat mengenai peristiwa yang terjadi. Negara juga harus memahami hukum syari'at Islam yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapinya, disamping mengkaji dalil hukum syara'. Lihat *Ibid.*, hlm 27.

Dalam hal ini, Demokrasi dan Islam sangat bertolak belakang. Segala produk dalam hukum Islam harus merujuk pada Alqur'an dan Sunnah yang ditunjuk oleh keduanya, yakni Ijma' Sahabat dan Qiyas (*Ijtihad*).⁸³ Perbedaan secara mendasar demokrasi dan Islam dilihat dari sumber kedaulatan ini.

Dipandang dari segi kekuasaan, dalam Demokrasi kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat lalu “mengontrak” seorang penguasa untuk mengatur urusan dan kehendak mereka. Jika penguasa dipandang sudah tidak akomodatif terhadap kehendak rakyat, penguasa akan dipecat karena dia hanya sebagai “buruh” yang digaji oleh rakyat untuk mengatur negara, konsep inilah yang diperkenalkan oleh John Locke(1632- 1755) dan Montesquieu(1689-1755) yang dikenal dengan sebutan “kontrak Sosial.”⁸⁴

Menurut Taqiyuddin an Nabhani, dalam sistem Islam, kekuasaan memang di tangan rakyat. Atas dasar itu rakyat dapat memilih penguasa (Khalifah) sebagai pemimpin negara. Pengangkatan oleh Khalifah harus didahului dengan suatu pemilihan dan dilandasi sukarela tanpa paksaan (*Ridha wal Ikhtiar*). Akan tetapi berbeda dengan demokrasi, Khalifah di pilih rakyat bukan untuk melaksanakan kehendak rakyat, tetapi untuk melaksanakan dan menjaga hukum Islam. Khalifah dibutuhkan untuk mengadopsi hukum-hukum syari'at dari Kitabullah dan Sunnah.⁸⁵ Dalam hal ini tidak ada masa jabatan waktu yang ditentukan bagi kepemimpinan seorang

⁸³ Al Wa'ie,...*Menggugat 56 Tahun PBB...Op. Cit.*, hlm. 32.

⁸⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 55-56.

⁸⁵ Taqiyuddin an Nabhani, *Ajhizah...Op. Cit.*, hlm 63.

Khalifah. Seorang Khalifah tidak dapat dipecat jika rakyat sudah tidak suka lagi kepadanya.⁸⁶

II. Kritik terhadap Latar Belakang Kemunculan Demokrasi yang merupakan Aqidah Demokrasi.

Telah penulis paparkan di atas bahwa demokrasi bermula pada saat raja di Eropa dan Rusia menjadikan agama sebagai alat untuk memeras, menganiaya dan menghisap darah rakyat. Para pemuka agama dijadikan perisai untuk mencapai keinginan mereka. Maka terjadilah pergolakan dan konflik yang kemudian membawa kebangkitan bagi para filosof dan cendekiawan. Dan terjadilah kompromi (Jalan tengah) antara Tokoh gereja dan cendekiawan tersebut. Sebagian mereka mengingkari adanya agama secara mutlak, sedangkan yang lain mengakui adanya agama, tetapi menyerukan agar dipisahkan dari kehidupan dunia. Sampai akhirnya pendapat mayoritas lebih memilih untuk memisahkan agama dari kehidupan (sekularisme), yang kemudian menghasilkan usaha pemisahan agama dan negara. Disepakati juga pendapat untuk tidak mempermasalahkan agama, dilihat dari segi apakah diakui atau ditolak, sebab fokus masalahnya adalah pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme).⁸⁷ Dan protes yang mereka lakukan adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat sebagai wujud kemarahan rakyat. Dengan itu muncullah konsep kedaulatan rakyat.

⁸⁶Masa kepemimpinan Khalifah tidak mempunyai masa tertentu. Selama Khalifah masih tegak menjaga syari'ah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu untuk melaksanakan berbagai urusan negara dan tanggung jawab kekhalifahan, maka ia tetap sah menjadi Khalifah. Untuk memutuskan apakah Khalifah lalai dalam pelaksanaan hukum Islam, negara mempunyai *Mahkamah Mazhalim* yang berwenang melakukan hal ini. Selengkapnya, lihat: Taqiyuddin an Nabhani, *Ajhizah...Op. Cit.*, hlm 83-85

⁸⁷Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham...Op. Cit.*, hlm 40.

Menurut Taqiyuddin dapat dilihat bahwa usaha yang mereka lakukan adalah memilih jalan tengah atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikrian jalan tengah adalah hal yang mendasar bagi mereka. Padahal jalan tengah itu tidak ada faktanya. Persoalannya adalah tinggal memilih yang jelas. Apakah yang *haq* atau yang *batil*, *iman* atau *kufur*, cahaya atau kegelapan. Tetapi jalan tengah (kompromi) yang diatasnya terdapat bangunan aqidah mereka menjauhkan mereka dari kebenaran, keimanan dan cahaya.⁸⁸

Berdasarkan hal ini, menurut Taqiyuddin Aqidah yang dianut oleh Barat sepenuhnya ialah aqidah sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan.⁸⁹ Hal ini dapat dilihat dari sumber kemunculan dan penerapannya.

Dapat dilihat bahwa sumber kemunculan demokrasi sepenuhnya adalah di tangan manusia(kompromi). Dalam demokrasi, yang berwenang mengeluarkan hukum (*al Hakim*) atau berbagai perbuatan atau benda apakah (terpuji) ataupun buruk (tercela) adalah akal manusia, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan wahyu Allah. Para pencetus demokrasi ini muncul

⁸⁸ *Ibid.*, hlm 61.

⁸⁹ Aqidah ini merupakan *qiyadah fikryah* yang menjadi landasan bagi setiap pemikiran. Di atas dasar itulah ditentukan setiap dasar pemikiran manusia dan arah pandang hidupnya. Berdasarkan hal ini pula dipecahkan seluruh problematika hidup. Aqidah sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan pada hakikatnya merupakan pengakuan secara tidak langsung akan adanya agama. Mereka mengakui adanya Sang Pencipta alam, manusia dan hidup serta mengaku adanya hari kebangkitan. Sebab semua itu adalah dasar pokok agama, ditinjau dari keberadaan suatu agama. Dengan pengakuan ini berarti terdapat ide tentang alam semesta, manusia dan hidup serta apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia, sebab mereka tidak menolak eksistensi agama. Namun tatkala ditetapkan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan, maka akhirnya pengakuan itu hanya sekedar formalitas belaka, sekalipun mereka mengakuinya namun pada dasarnya mereka menganggap bahwa kehidupan dunia ini tidak ada hubungannya dengan apa yang ada dan sebelum kehidupan dunia. Anggapan ini muncul dengan anggapan bahwasanya agama hanya sekedar hubungan antara individu dengan penciptanya saja. Lihat. Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham...Op. Cit.*

tatkala berlangsung pertarungan konfrontasi sengit antara gerejawan dengan para cendekiawan. Jelas demokrasi merupakan produk manusia, dan yang berwenang menetapkan hukum atas segala hal adalah akal manusia. Mereka menyatakan bahwa nilai-nilai yang paling terpuji pada manusia adalah nilai-nilai yang ditetapkan oleh manusia itu sendiri.⁹⁰

Dalam hal ini Islam sangat bertolak belakang dengan demokrasi, . Islam berasal dari Allah yang telah diwahyukanNya kepada RasulNya, Muhammad Ibn Abdillah. Allah berfirman:

✂️⑧♦️◻️◻️●◻️=◻️✂️ ✂️✂️♦️✂️ ✂️◻️✂️✂️✂️✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️
 ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️✂️✂️
 ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️

“Tiadalah yang diucapkannya itu bersumber dari hawa nafsunya.

Ucapannya itu tidak lain hanya berupa wahyu Allah yang diwahyukan”.⁹¹

✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️
 ✂️✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️
 ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️
 ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️ ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️
 ✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️

⁹⁰Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham...Op, Cit.*, hlm 42., lihat juga Abdul Qadim Zallum, *Ad Dimukratyih, Op. Cit.* hlm. 3

⁹¹Q.S an Najm : 3-4.

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. “

Menurut Taqiyuddin, dalam Islam, untuk memutuskan perkara di tengah-tengah manusia sesuai dengan wahyu Allah. yang berwenang menetapkan hukum adalah Allah atau menetapkan berbagai hukum adalah Allah atau Syari’at Islam, bukan akal manusia. Aktivitas akal hanya terbatas untuk memahami nash-nash hukum yang diturunkan oleh Allah.⁹²

Dari sumber kemunculanya juga terlihat bahwa Aqidah Demokrasi adalah Aqidah Sekularisme. Yakni pemisahan agama dari kehidupan. Sebab manusia sendirilah yang membuat sistem kehidupan undang-undang bagi perilakunya. Sekularisme sama sekali tidak mengingkari adanya agama, tetapi juga tidak memberikan peran dalam kehidupan. Akidah ini tidak mengingkari eksistensi agama, ia hanya menghapuskan perannya untuk mengatur kehidupan bernegara.⁹³ Konsekwensinya, aqidah ini secara otomatis memberikan kewenangan kepada manusia untuk membuat peraturan kehidupannya sendiri. Aqidah inilah yang menjadi landasan pemikiran (*Qiadah Fikryah*) ide –ide Barat. Aqidah ini lantas melahirkan peraturan kehidupan manusia. Di atas dasar aqidah ini, orang-orang Barat kemudian

⁹² Abdul Qadim Zallum, *Ad Dimukratiah...Op. Cit.* hlm 60. Lihat, Taqiyuddin an Nabhani, *Ajhizah...Op. Cit.*, hlm. 15.

⁹³ Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham...Op. Cit.*, hlm. 41

menentukan orientasi pemikiran pandangan hidup. Dari aqidah ini pula selanjutnya lahir sistem demokrasi.⁹⁴

Sementara itu, Islam sangat berbeda secara diametral dengan Barat. Islam dibangun atas landasan Aqidah Islam. Aqidah ini mewajibkan pelaksanaan perintah dan larangan Allah- yakni hukum-hukum yang lahir dari Aqidah Islam- dalam seluruh kehidupan kenegarasn. Aqidah ini menerangkan bahwa manusia tidak berhak membuat peraturan kehidupannya sendiri. Manusia hanya berkewajiban menjalani kehidupannya menurut peraturan yang ditentukan oleh Allah untuk manusia.⁹⁵ Untuk mencapai tujuan-tujuan utama dan menjaga masyarakat bukan ditentukan oleh manusia, akan tetapi berasal dari perintah dan larangan Allah. Aturan ini selalu tetap adanya tidak akan pernah berubah dan berkembang. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi manusia, menjaga akal kehormatan, jiwa dan pemilikan individu, agama dan keamanan negara adalah tujuan –tujuan utama yang telah baku, tidak akan pernah berubah dan berkembang, untuk menjaganya ditetapkan saksi-saksi yang tegas. Maka dibuatlah hukum-hukum yang menyangkut *hudud* (bentuk pelanggaran dan saksianya ditentukan Allah) dan *uqubat* (saksi pidana) untuk menjaga tujuan-tujuan yang bersifat baku tadi. Pelaksanaan pemeliharaan tujuan-tujuan ini wajib adanya, karena termasuk dalam perintah dan larangan Allah.⁹⁶

Demikian hendaknya setiap muslim maupun negara dalam menjalankan seluruh aktifitasnya menyesuaikan diri dengan perintah-perintah dan larangan

⁹⁴ Abdul Qadim Zallum, *Ad dimukratyah ...Op. Cit*, hlm. 61

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham...Op. Cit*, hlm. 46

Allah.⁹⁷ Dengan demikian, bagi seorang muslim, segala sesuatunya harus terikat dengan hukum Islam. Aqidah Islam inilah yang menjadi asas peradaban (kultur) dan pandangan Islam.⁹⁸

III. Kritik terhadap Suara Mayoritas dalam Demokrasi.

Telah penulis paparkan juga di atas bahwa dalam Demokrasi suara mayoritas menjadi ukuran. Demokrasi dapat dianggap "pemerintahan mayoritas" dan "hukum mayoritas" baik melalui proses musyawarah maupun tidak. Pemilihan para penguasa, anggota dewan perwakilan, serta anggota berbagai lembaga, kekuasaan dan organisasi semuanya didasarkan pada pertimbangan suara (bulat) mayoritas. Demikian juga pembuatan hukum di dewan perwakilan, pengambilan keputusan di berbagai dewan, kekuasaan, lembaga dan organisasi seluruhnya dilaksanakan berdasarkan pendapat mayoritas.

Oleh karena itu dalam negara demokrasi pendapat mayoritas dapat mengikat semua pihak, baik penguasa atau bukan. Sebab pendapat mayoritas dianggap sebagai "ekspresi dari kehendak rakyat". Oleh karena itu, pihak minoritas tidak mempunyai pilihan selain tunduk dan mengikuti (pendapat mayoritas).

Menurut Taqiuddin, hal ini sangat berbeda dengan Islam. Dalam masalah penentuan hukum, kriterianya tidak tergantung pada pendapat minoritas atau mayoritas melainkan pada nash-nash syari'at. Sebab yang menjadi *musyarri'* hanyalah Allah, bukan ummat. Untuk menyelesaikan

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Abdul Qadim Zallum, *Addimukratyah...Op. Cit.* hlm. 61

benar.¹⁰¹ Hal semacam ini didasarkan pada realitas bahwa Rasulullah pernah mengesampingkan pendapat kaum Muslim yang menolak penetapan perjanjian Hudaibiyah, padahal pendapat kaum Muslim waktu, termasuk Abu Bakar dan Umar, merupakan pendapat mayoritas. Akan tetapi kendati demikian Rasulullah sangat menolak pendapat mereka, dan tetap menyepakati perjanjian Hudaibiyah. Dan kaum Muslim dengan terpaksa mengikuti pendapat itu, maka nabipun bersabda kepada mereka.¹⁰²

*“Sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah, dan aku sekali-kali tidak melakukan maksiat terhadapnya dan di adalah penolongku”*¹⁰³

Disamping itu, menurut Taqiyuddin, dalam masalah yang berhubungan dengan aspek-aspek profesi dan ide serta pemikiran yang membutuhkan keahlian, yang dijadikan ketetapan adalah ketepatan atau kebenarannya, bukan berlandaskan suara mayoritas atau minoritas. Artinya, masalah yang ada harus dikembalikan kepada ahlinya. Merekalah yang dapat memahami permasalahan yang ada dengan tepat. Dengan demikian, yang menjadi patokan adalah ketepatan bukan suara mayoritas. Pendapat yang tepat ini diambil dari pihak yang berkompeten, bukan berdasarkan suara mayoritas.

¹⁰¹Dalam pengambilan Ijtihad juga, khalifah tidak wajib meminta pendapat ke *Majlis Ummat* mengenai hukum-hukum yang akan didelegasikannya, meskipun hal ini boleh saja dilakukan. Khalifahurrasyidin pada masa lalu pernah meminta pendapat para sahabat ketika mereka hendak mengadopsi satu hukum syari'at. Hal ini pernah dilakukan Umar bin al-Khattab. Ia, misalnya pernah meminta pendapat kaum Muslim tatkala hendak mengadopsi hukum syari'at mengenai masalah tanah taklukan Syam, Mesir, Irak. Kalaupun Khalifah meminta pendapat *Majlis Ummat* mengenai hukum-hukum syari'at yang hendak diadopsinya, maka pendapat *Majlis Ummat* ini tidak mengikat Khalifah, meskipun pendapat itu diputuskan berdasarkan suara bulat atau suara mayoritas.. Lihat, Abdul Qadim Zallum, *Addimukatiyah...Op. Cit*, hlm. 73-74.

¹⁰²Taqiyuddin an Nabhani, *Al Syakhsiah al Islamiah*, terj Zakia Ahmad, *Kepribadian Islam*, HTI Press, Jakarta, 2008, hlm.367

¹⁰³HR. Al Bukhari.

Hal ini terbukti dengan realitas Rasulullah pernah mengikuti pendapat al *Hubab ibn al mundzir* pada perang Badar - ia pakar yang memahami benar tempat-tempat yang strategis – yang mengusulkan kepada nabi agar meninggalkan tempat yang dipilih nabi sekiranya ketentuan tersebut bukan dari wahyu. *Hubab* mengatakan : “Wahai Rasulullah, *sesungguhnya tempat ini bukan tempat yang layak. Kemudian ia menunjukkan suatu tempat. Rasulullah tidak lagi berdiam diri dan langsung berdiri bergegas bersama-sama yang lain mengikuti pendapat Hubab.*” *Hubab* pada saat itu menganggap tempat itu tidak layak dijadikan tempat pertempuran. Rasulullah mengikuti pendapat *Hubab* dan berpindah ke suatu tempat yang ditunjukkan oleh *Hubab*. Dengan demikian Rasulullah telah meninggalkan pendapatnya sendiri dan juga tidak kembali kepada pendapat *jama'ah* (mayoritas) melainkan mengikuti pendapat yang benar.¹⁰⁴

Sementara itu, menurut Taqiyuddin an Nabhani – masalah yang berkaitan dalam amalan praktis yang tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan mendalam, yang menjadi patokan adalah suara mayoritas. Sebab, mayoritas orang dipandang memahaminya dan dapat memberikan pendapatnya dengan mudah sesuai dengan kemaslahatan dan pertimbangan yang ada. Contoh dalam masalah ini antara lain apakah kita akan keluar kota atau tidak, apakah melakukan perjalanan pagi atau malam, apakah naik pesawat atau kapal. Dalam masalah ini barulah suara mayoritas dapat dijadikan suatu yang bersifat mengikat. Dalil untuk ketentuan ini adalah

¹⁰⁴Taqiyuddin an Nabhani, *Al Syakhsiah...Op. Cit...* hlm.366

dalam peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah ketika perang uhud. Pada saat itu Rasul mengumpulkan para pemuka kaum Muslim termasuk orang yang menampakkan ke Islamannya pada perang Uhud dan mereka saling bermusyawarah). Lalu nabi berpendapat bahwa lebih baik berjaga-jaga (bertahan di kota Madinah) dan membiarkan pasukan Quraisy berada di luar Madinah. Sedangkan, mayoritas sahabat - kalangan pemuda yang memiliki semangat pembelaan yang kuat yang belum memperoleh syahid pada perang Badar - berpendapat bahwa kaum Muslim hendaknya keluar dari kota Madinah guna menghadapi kaum Quraisy. Artinya pada saat itu pendapat yang ada berkisar di dua pilihan, keluar dari kota Madinah atau tidak, maka nabi mengikuti pendapat mereka (mayoritas) dan mengabaikan pendapat para senior.¹⁰⁵

Dari paparan diatas kita menemukan bahwa Rasul pernah berpegang teguh pada pendapatnya sendiri, dan mengabaikan seluruh pendapat yang ada. Kita juga mendapati beliau kembali kepada pendapat yang benar dan cukup mengambilnya dari satu orang saja seraya meninggalkan pendapatnya sendiri dan tidak kembali kepada pendapat mayoritas. Kita juga mendapati bahwa beliau menyetujui pendapat mayoritas dan tidak menentang pendapat tersebut.¹⁰⁶

¹⁰⁵Lihat, Taqiyuddin an Nabhani, *Al syakhsiah...Op. Cit*, hlm 366. Ketika itu golongan minoritas sahabat merasa menyesal terhadap perbuatan Rasul. Lalu mereka pergi kepada Rasulullah dan berkata "*Kami merasa menyesal kepadamu, tidak ada bagian untuk kami dalam perkara itu, jika Engkau bersedia, duduklah, niscaya Allah akan memberikan rahmat kepadamu.*" (dikeluarkan oleh al hakim dalam Mustadrak). Akan tetapi nabi tetap menolak mereka untuk kembali pada pendapat para pemuka sahabat. Beliau tetap berjalan pada pendapat mayoritas. Lihat. *Ibid*.

¹⁰⁶Taqiyuddin an Nabhani, *Al syakhsiah...Op. Cit...* hlm 367.

Ringkasnya, menurut Taqiyuddin, dalam perkara hukum syara' cukup dengan memperhatikan kekuatan suatu dalil. Dalam perkara yang membutuhkan keahlian tidak perlu memperhatikan suara mayoritas, akan tetapi diserahkan kepada ahlinya. Sedangkan dalam perkara amalan praktis yang tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan mendalam, yang menjadi patokan adalah suara mayoritas.¹⁰⁷ Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa dalam demokrasi menganggap bahwa pengambilan suara rakyat itu wajib, sementara Islam menyatakannya mubah, dan dalam konteks *Syuro* hukumnya hanya sunnah, bukan wajib.¹⁰⁸

Terkait dengan *Syuro*- kebanyakan orang mengaitkannya dengan demokrasi dan menjadi alasan bahwa demokrasi sejalan dengan Islam-, dalam hal ini Taqiyuddin menyatakan bahwa *Syuro* atau musyawarah merupakan salah satu hak rakyat terhadap penguasa. Apabila penguasa tidak meminta pendapat dari rakyat, berarti penguasa telah melakukan kelalaian. Meskipun demikian, pemerintahan ini tetap merupakan pemerintahan Islam, sebab *syura* adalah media pengambilan pendapat, bukan menetapkan kebijakan negara. Hal ini berbeda dengan peranan parlemen pada sistem demokrasi. Dalam demokrasi, Parlemen merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Dan ini menjadi pilar dalam sistem tersebut. Lain halnya dengan sistem Islam yang meletakkan kedaulatan itu hanya pada syara'.¹⁰⁹

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm 371.

¹⁰⁸al Wa'ie, *Demokrasi Sistem Kufur...Op. Cit.*, hlm 33. Lihat juga Mahmud al Khalidi, *Zawaid Nizham al Hukm Fil Islam*, Dar al Buhuts al 'ilmiyyah, Kuwait, 1980. Hlm 152.

¹⁰⁹Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham...Op. Cit.*, hlm. 69. Sistem pemerintahan Islam bukan sistem parlementer yang pemerintahannya berada di tangan president dan para mentrinya

Dengan demikian, menurut Taqiyuddin an Nabhani hukum Allah adalah satu-satunya *haq* (benar) yang menjadi prinsip pengambilan pendapat (*Syura*). Sedangkan yang lainnya dan tergolong kepada prinsip demokrasi yang batil, tidak boleh diambil.¹¹⁰

D.IV. Kritik terhadap Ide Kebebasan dalam Demokrasi.

Seperti yang telah penulis paparkan di atas bahwa salah satu kriteria demokrasi adalah terjaminnya kebebasan umum (*Freedom*). Dan jaminan atas kebebasan umum ini adalah salah satu ide paling menonjol dalam demokrasi. Ide ini dianggap sebagai salah satu pilar paling penting dalam demokrasi. Dengan ide ini tiap- tiap individu akan dapat melaksanakan dan menjalankan kehendaknya sendiri seperti yang diinginkannya tanpa tekanan dan paksaan. Rakyat dianggap tidak akan dapat mengekspresikan kehendak umumnya kecuali dengan terpenuhnya kebebasan individu yang berlaku umum bagi seluruh rakyat. Kebebasan individu merupakan salah satu ajaran dalam sistem demokrasi yang negara ataupun individu tidak dibenarkan melanggarnya.¹¹¹ Jaminan kebebasan ini dilindungi oleh undang-undang.¹¹²

dalam Republik Presidensial dan di tangan Kabinet dalam sistem Republik parlementer. Dalam Sistem pemerintahan Islam penetapan hukum tidak di tangan president ataupun kabinet yang merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, akan tetapi berada pada Allah. Lihat: Taqiyuddin...*Ajhizah..Op. Cit.*, hlm 23.

¹¹⁰*Ibid.*, hlm 381.

¹¹¹Perlu di catat bahwa kebebasan umum yang berlaku bagi setiap individu yang dibawa demokrasi tidak dapat diartikan sebagai pembebasan bangsa-bangsa terjajah dari negara penjajahnya yang telah mengeksploitasi dan merampas kekayaan alamnya. Alasannya ide penjajahan tidak lain merupakan salah satu buah dari ide kebebasan kepemilikan yang justru dibawa oleh demokrasi itu sendiri. Kebebasan ini juga tidak berarti pembebasan perbudakan, sebab budak saat ini sudah tidak ada lagi.lihat. Abdul Qadim Zallum, *Ad Dimukratiyah...Op. Cit.*, hlm 79.

Kebebasan dalam hal ini mencakup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, kebebasan berperilaku.

Dalam hal ini, Taqiyuddin juga mengungkapkan hal yang senada bahwa dalam Demokrasi diakuinya Kebebasan Pribadi (*Personal Freedom*), Kebebasan Beragama (*Freedom of Religion*), Kebebasan Kepemilikan (*Freedom of Ownership*), Kebebasan berpendapat (*Freedom of Opinion*).¹¹³

Menurut Taqiyuddin, keempat macam kebebasan yang dianut oleh para pengemban demokrasi ini tidak ada dalam Islam. Bagi seorang Muslim segala sesuatu dalam kehidupannya selalu terikat dengan hukum syari'at Islam dan tidak memiliki kebebasan Mutlak. Menurutnya, Aqidah seorang Muslim terikat dengan batas- batas Islam dan tidak bebas.¹¹⁴ Seorang muslim tidak dibenarkan berbuat sekehendaknya. Dalam Islam tidak ada yang disebut kebebasan, kecuali kebebasan budak dari perbudakan, sedangkan perbudakan

¹¹²Kata *al Hurriyah* (Kebebasan) merupakan kata bahasa Arab. Dalam bahasa asing, *al Hurriyah* diungkapkan dengan kata *Free* atau *liberty*. Dan mereka membangun pengertian yang berbeda-beda terhadap lafadh tersebut. Kebebasan Berkumpul (*al Hurriyah an Niqabyah* atau *Freedom Assosiation*), Kebebasan Seksual (*al Hurriyah al jinsiah* atau *free love*), Kebebasan Berkehendak (*al Hurriyah Al Iradah* atau *Free Will*) Kebebasan (*Freedom* atau *Huryah*), dan lain lain. Itu adalah berupa ungkapan yang dikaitkan dengan kebebasan baik dalam bahasa arab maupun bahasa asing. Semuanya berporos pada satu makna, yaitu kemampuan diri sendiri untuk memilih, tanpa ada sedikitpun paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Artinya terbebasnya individu dari seluruh batasan dan ikatan dan bertindak sesuai dengan keinginannya. Hanya saja hal mustahil menerapkan istilah tersebut pada fakta manusia. Karena tidak mungkin manusia menganut kebebasan tanpa batasan layaknya hukum rimba. Maka dibuatlah kebebasan dalam batas-batas minimal untuk kelangsungan hidup. Misalnya saja selama tidak mengganggu kebebasan orang lain atau selama tidak ada pelanggaran. Setelah itu diikuti kewajiban para pengikut aliran kebebasan untuk terikat dengan sistem dan aturan undang-undang yang ditetapkan oleh negara, meski sebenarnya batasan apapun bertentangan dengan kebebasan. Lihat Hafizh Shalih, *Op. Cit.*, hlm. 49.

¹¹³Taqiyuddin an Nabhani, *Ajnizah...Op. Cit.*, hlm. 28.

¹¹⁴Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham...Op. Cit.*, hlm. 48.

itu sendiri sudah lenyap sejak lama.¹¹⁵ Hal ini dikarenakan ke empat macam kebebasan itu sangat bertentangan dengan Islam.

Kebebasan beragama berarti bahwa orang berhak meyakini Akidah atau memeluk agama yang diyakininya tanpa tekanan atau paksaan. Dia berhak meninggalkan Aqidahnya dan berpindah pada Akidah dan agama yang baru. Dia berhak melakukan semua itu sebebas-bebasnya tanpa ada tekanan atau paksaan. Hal ini, menurut Taqiyuddin an Nabhani sangat bertentangan dengan Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam diberi kebebasan untuk memeluk agama yang diyakini. Akan tetapi jika seorang manusia telah Muslim, maka tidak boleh keluar dari Islam. Murtadnya seorang Muslim merupakan tindak pidana besar yang pantas dibunuh apabila tidak segera kembali bertaubat kepada Islam.¹¹⁶ Dalam konteks ini Rasulullah bersabda:

*“ Siapa saja yang mengganti agamanya(Islam) jatuhkanlah hukuman mati atasnya ”*¹¹⁷

Jika yang murtad adalah sekelompok orang sementara mereka bersikeras untuk murtad, maka mereka akan diperangi hingga mereka kembali pada Islam atau dibinasakan, realitas semacam ini pernah terjadi pada orang-orang murtad setelah wafatnya Rasul yakni tatkala Abu Bakar

¹¹⁵Abdul Qadim Zallum, *Ad Dimukratiyah...Op. Cit.*, hlm 80.

¹¹⁶Taqiyuddin an Nabhain, *Nizham...Op. Cit.*, Lihat juga, *Ibid.* Memang dalam Islam tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, akan tetapi jika seorang telah memeluk agama Islam, maka dia berkewajiban untuk tunduk dan patuh. Islam sangat menjaga kesucian agamanya, tidak bisa keluar masuk sebebas-bebasnya. lihat al Wa'ie...*Aktualisasi Hijrah...Op. Cit.*, hlm 26

¹¹⁷HR Muslim dan Ashhab as Sunan.

memerangi mereka dengan sengit sampai sebagian orang yang tidak terbunuh kecuali kembali pada Islam.¹¹⁸

Sementara itu kebebasan berpendapat dalam sistem Demokrasi mempunyai arti bahwa setiap individu berhak mengembangkan pendapat atau ide apapun dan bagaimanapun bentuknya. Dia berhak menyatakan atau menyerukan ide atau pendapat itu dengan sebebaskan-bebasnya tanpa ada syarat dan batasan apapun. Dia berhak mengungkapkan ide atau pendapat itu dengan cara apapun tanpa ada larangan baginya untuk melakukan semua itu, baik dari negara ataupun pihak lain. Oleh karena itu setiap larangan mengembangkan dan menyebarkan pendapat akan dianggap sebagai pelanggaran kebebasan. Akibat kebebasan pendapat inilah, ide liberal menyerang Islam, maraknya sekularisme dan hal lain yang bertentangan dengan Islam.

Ketentuan dalam Islam dalam masalah ini sangatlah berbeda. Setiap Muslim dalam seluruh perbuatannya wajib terikat dengan apa yang terkandung dalam nash- syari'at. Dengan demikian dia tidak boleh mengucapkan suatu perkataan kecuali dalil-dalil syari'at membolehkannya. Apabila syari'at tidak membolehkan menyatakan pendapat tersebut, tetapi tetap dilakukan, maka dia akan dikenai sanksi. Dengan demikian, untuk mengembangkan pendapatnya Muslim wajib terikat dengan hukum syari'at dan tidak bebas melakukan semuanya. Setiap Muslim maupun negara dalam

¹¹⁸ Abdul Qadim Zallum, *Ad Dimukratiyah...Op. Cit.*

menjalankan seluruh aktivitasnya menyesuaikan diri dengan perintah Allah dan larangannya.¹¹⁹

Dalam Islam, diwajibkannya menyampaikan pendapat kepada penguasa sekaligus mengawasi dan mengoreksi tindakan mereka. *Ummu Athiya* menuturkan riwayat *Abu Sa'id*, Bahwa Rasulullah pernah bersabda: *“Jihad paling utama adalah menyampaikan perkataan yang hak kepada penguasa zalim”*.

Abu umamah juga menuturkan bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang saat melempar jamrah aqabah, *“Jihad apa yang paling benar ya Rasul? Rasul menjawabnya” menyampaikan perkara hak kepada penguasa yang zalim”*

Tindakan semacam ini tidak dipandang sebagai bagian kebebasan pendapat melainkan justru realisasi keterikatan dengan syari'at yakni kebolehan menyampaikan pendapat dalam satu keadaan dan kewajiban menyampaikan pendapat dalam suatu keadaan lain.¹²⁰

Sementara itu kebebasan berperilaku artinya kebebasan untuk lepas dari segala macam ikatan kebebasan untuk melepaskan diri dari setiap nilai keruhanian, akhlak. Pada faktanya kebebasan inilah yang menimbulkan segala macam kebinasaan. Kebebasan ini menyatakan bahwa setiap orang berperilaku dalam kehidupan berhak berbuat apa saja sesuai kehendaknya sebebaskan-bebasnya tanpa boleh ada larangan baik negara ataupun pihak lain.

¹¹⁹ Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham...Op. Cit.* 46.

¹²⁰ Abdul Qadim Zallum, *Ad Dimukratyah...Op. Cit.*, hlm. 84.

Ide kebebasan telah menyebabkan laki-laki dan perempuan bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa memperhatikan halal-haram.

Menurut Taqiyuddin , Islam sangat berbeda dalam hal ini. Tidak ada kebebasan bertingkah laku dalam Islam dan seorang muslim wajib terikat dengan hukum Syari'at dalam tingkah lakunya. Berdasarkan hal ini zina tergolong tindak pidana dan terhadap pelakunya berhak diberikan sanksi tanpa ada perasaan belas kasihan. Begitu pula dengan minuman khamar, dalam Islam termasuk tindakan kriminal, pelakunya pantas mendapat hukuman. Penganiayaan terhadap orang lain juga termasuk pidana yang hukumnya tergantung jenis pelanggaran yang dilakukannya.¹²¹ Atas pelanggaran itu Islam telah menetapkan saknsi tegas yang membuat pelakunya jera.

Kebebasan kepemilikan- yang telah melahirkan ekonomi Kapitalisme- yang selanjutnya melahirkan ide penjajahan terhadap bangsa-bangsa di dunia serta perampokan kekayaan alamnya-bermakna seorang boleh memiliki modal dan harta dengan cara apapun. Seorang dianggap pula berhak memiliki penimbunan, mengambil riba, menyembunyikan cacat barang dagangan, menetapkan harga tinggi secara tidak wajar, dan melakukan hal serupa dengan sebeb- bebasnya.

Segala aspek ini- aspek ekonomi menurut Taqiyudin juga terkait dengan syari'at Islam dan sebab-sebab kepemilikan haruslah dibolehkan oleh syari'at untuk individu serta realitas pemilikan yang merupakan izin syar'i.

¹²¹Taqiyuddin an Nbahnai, *Nizham...Op. Cit.*, hlm 48-49.

Penyimpangan dari batasan ini merupakan tindak pidana yang hukumnya berbeda tergantung jenis penyimpangannya.¹²² Dalam hal ini, Islam juga menentang praktik riba. Seluruh macam riba dilarang, sebab-sebab pengembangannya dan cara-cara pengelolaannya. Islam mewajibkan untuk terikat kepada hukum Islam untuk memiliki, mengembangkan dan mengelola harta. Tidak dibolehkan mengelola harta sekehendaknya, tetapi Islam mengikatnya dengan hukum syari'at. Seperti riba dan lain-lain. Semua itu adalah bentuk penimbunan harta yang dilarang dalam Islam dan juga hal itu dilakukan, pelakunya akan dikenai sanksi.

Dengan demikian jelaslah bahwa kebebasan kepemilikan harta tidak ada dalam ajaran Islam. Bahkan sebaiknya Islam mewajibkan setiap Muslim wajib terikat kepada hukum-hukum syari'at dalam hal kepemilikan, pengembangan dan pengelolaan harta, dia tidak boleh melanggar hukum itu.

Dengan demikian, dapat dikatakan kesalahan fatal dalam sistem demokrasi adalah menyamakan pendapat manusia sebagai pembuat hukum dengan Allah. Bahkan menjadikan kedudukan manusia lebih tinggi dari Allah.¹²³

Dari seluruh penjelasan di atas, Menurut Taqiyuddin an Nabhani, tampak jelas bahwa peradaban, nilai-nilai, pandangan hidup, dan Demokrasi Barat serta kebebasan umum bagi setiap individu bertentangan secara total dengan hukum Islam. Menurut Taqiyuddin Demokrasi merupakan upaya Barat untuk menyesatkan negeri-negeri Kaum Muslim karena negeri Islam

¹²²*Ibid.*, hlm 49.

¹²³Media Ummat; *Memperjuangkan Kehidupan Islam, Kabinet Baru, Derita Rakyat*, Edisi 22, 18 Dzulqaidah 1430 H/ 23 Oktober- 5 November 2009, hlm. 17.

mengalami kesengsaraan, penindasan dan kezaliman, mereka berupaya memasarkan ide demokrasi dan berupaya memberikan penyesatan (*Thadlil*) bahwa demokrasi merupakan alat pemilihan penguasa, mereka berusaha menyembunyikan bagian mendasar dalam demokrasi yang telah penulis paparkan di atas.

ولخلاصه ان للطمقراطيه نظم لكفور ليس نها تقول باءنتخاب الخكم فلبس هو موضوع
ع اساس بل لاءن لاءمر الاءساس في ديمقراطيه هو جعل التشريع للبشر و لبس الله ر
ب العالمين

Ringkasnya, menurut Taqiuddin demokrasi adalah sistem Kufur. Bukan karena demokrasi berbicara mengenai pemilihan penguasa, karena hal itu adalah perkara yang mendasar. Tetapi karena seluruh kriteria dan aspek demokrasi sangat bertolak belakang dengan Islam.¹²⁴

¹²⁴Taqiuddin an Nabhani, *Ajhizah...Op. Cit.*, hlm 25-27.

BAB IV

ANALISIS

Islam adalah Agama yang unik dan unggul dibandingkan dengan Agama lain. Keunikannya dari Agama lain terlihat dari ajarannya. Islam bukan saja Agama yang mengurus masalah *Ruhiah* (Spiritual), tetapi juga meliputi wilayah *Siyasah* (Politik). Islam adalah Agama yang mengatur Spiritual dan Politik.¹

Kesempurnaan Islam ini, menurut penulis hanya akan menjadi sebuah konsep jika konsep ini berdiri sendiri tanpa ada yang merealisasikannya dalam bentuk sebuah Negara, sehingga jika Islam direalisasikan kedalam bentuk sebuah Negara, maka Islam dan seluruh syari'atnya akan terealisasi sehingga Islam benar-benar dapat dirasakan dalam kehidupan nyata. Artinya keberadaan sebuah Negara Islam yang akan menjadi satu-satunya institusi pelaksanaan syariat secara kaffah menjadi sebuah keniscayaan, yang harus segera diwujudkan. Seperti yang pernah diperjuangkan oleh Rasulullah ketika mendirikan Khilafah di Madinah dan diteruskan oleh para Khalifah hingga keruntuhannya pada tahun 1924. Akan tetapi pada masa sekarang ini, meskipun di Negara Muslim yang mayoritas pendudukannya Islam, tapi belum menggunakan sistem Islam secara menyeluruh. Dengan demikian negeri tersebut tidak bisa dikatakan Negara Islam, dikarenakan masih menggunakan sistem selain Islam.

¹Hafidh Abdurrahman, *Islam Politik dan Spiritual*, Lisan al Haq, Singapore, 1998, hlm, 17.

Taqiuddin an Nabhani, dengan kekuatan yang dimilikinya dan semangat revolusiner berkeinginan keras untuk mengubah masyarakat dari ketertindasan pemikiran yang dikebiri oleh Barat di bawah naungan Khilafah Rasyidah. Hal ini tentunya dilatarbelakangi karena kehidupan dan pengalaman keagamaan yang beliau miliki dan situasi sosial politik pada masa itu yang mendorong beliau untuk mengadakan suatu perubahan di tengah-tengah kemelut ummat pada masa itu . Runtuhnya Khilafah Islamiah adalah salah satu yang memotivasi Taqiuddin an Nabhani untuk merumuskan pemikirannya sekaligus keputusannya untuk mendirikan sebuah partai politik yang diberi nama Hizbut Tahrir.²

Peristiwa kedua yang ikut mempengaruhi Taqiuddin an Nabhani adalah dirampasnya tanah suci Palestina, lalu berdirinya negara Yahudi Israil, pada Tahun 1948M.³ Inilah yang menyebabkan Taqiyuddin berusaha keras mengemukakan ide *Khilafah Islamiah alaa Minhaj an Nubuwwah* yang berbeda dan unik dibandingkan dengan bentuk pemerintahan lainnya. Dan Khilafah Islamiah itu tentunya mempunyai dasar nash sehingga beliau mampu merumuskan dan memberi gamabaran yang jelas bagaimana konsep Khilafah Islamiah melalui karya-karya beliau.

²Dale F Eickelman berpandangan bahwa ketika sebagian besar kelompok-kelompok Islamis tidak pernah menyerukan Kekhilafahan, maka Hizbut Tahrir adalah pengecualian utama, maksud Dale, Hizbut Tahrirh yang getol menyerukan tegaknya kembali kekhilafahan. Lihat Dale F Eickelman dan James Picatori, *Ekspresi Politik*, terj Rofik Suhud, Mizan, Bandung, 1998, hlm, 61.

³Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Logos, Jakarta, 1997, hlm, 135-136.

Setelah penulis mengkaji dan meneliti tentang bagaimana telaah Taqiyuddin an Nabhani terhadap konsep demokrasi, ternyata apa yang beliau kemukakan pada prinsipnya sangat relevan dengan ajaran Islam dan Taqiyuddin berusaha mendobrak kebekuan yang melanda ummat manusia khususnya ummat Islam agar tidak diam membisu, serta menjadi budak bagi pemikiran bangsa Barat. Hal ini perlu dan penulis anggap penting untuk diketengahkan dan didiskusikan di tengah-tengah kemelut Ummat dan ditengah kontroversi mengenai wacana demokrasi dan Islam, khususnya di negara yang sedang terlena dengan budaya Barat yang ingin menjajah Islam supaya tunduk dan patuh pada semua perintah yang dikeluarkan oleh Imperialisme Barat. Mereka seakan-akan berusaha memberikan pedang kepada kaum Muslimin -khususnya di negara-negara Islam- namun akhirnya pedang itu sendirilah yang akan membunuh ummat Muslim sendiri, pedang itu ialah pemikiran yang di import dari Barat.

Dengan kekuatan pemikiran yang dimilikinya dan semangat revolusioner untuk mengubah masyarakat dari ketertindasan, Taqiyuddin mencoba membuka mata ummat agar tidak terlena dengan Ideologi yang datang dari Barat. Usaha yang beliau lakukan walaupun belum begitu nampak hasilnya hingga saat ini, namun beliau banyak mewariskan pemikirannya yang anti Barat dalam berbagai karyanya dan beliau berhasil mendirikan sebuah partai politik yang berskala Internasional. Partai yang berasaskan Islam dinamakan Hizbut Tahrir yang hingga kini masih menjalankan

dakwahnya demi mewujudkan impian Ummat Islam untuk mendirikan sebuah institusi Khilafah pelaksana Syari'ah.⁴

Telaah yang dilakukannya terhadap konsep demokrasi sudah barang tentu memiliki tujuan, karena beliau hendak mendirikan negara Islam yang -menurutnya- sangat jauh berbeda dengan konsep demokrasi. Taqiyuddin mengungkapkan bahwa orang-orang Barat berupaya memasarkan demokrasi ke suluruh negeri-negeri kaum Muslim dengan upaya penyesatan (*Tadhliil*), bahwa demokrasi merupakan alat untuk memilih penguasa. Menurut Taqiyuddin mereka mamppu menghancurkan perasaan Kaum Muslimin dengan seruan demokrasi dan memfokuskan diri pada seruan demokrasi sebagai pemilihan penguasa. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyesatkan kaum Muslimin yakni seakan-akan perkara mendasar dalam demokrasi adalah pemilihan penguasa. Taqiyuddin juga berusaha menyerukan bahwa kaum Muslim sedang ditmpa penindasan dan kesengsaraan, maka kaum kafir dengan mudah memasarkan demokrasi ke negeri-negeri kaum Muslimin sebagai aktifitas memilih penguasa. Mereka berupaya menutupi dan menyembunyikan bagian mendasar dari demokrasi itu sendiri, yaitu menjadikan kewenangan membuat hukum serta menetapkan halal haram berada di tangan manusia, bukan syaria'at. Akibatnya, banyak pandangan ulama yang pada akhirnya berusaha menyelaraskan Islam dengan demokrasi. Atau berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelaraskan antara

⁴Hizbut Tahrir bertujuan, *Pertama*: Berupaya melangsungkan kembali kehidupan Islam. *Kedua*, mengemban dakwah Islamiah keseluruh dunia. *Ketiga*, Menjaga pemikiran, perasaan masyarakat agar tetap Islami. Untuk merealisasikan itu, menurut Taqiyuddin hanya ada satu jalan yaitu teganya Khilafah Islamiah. lihat, Dale F Eickelman, *Op. Cit.*

Islam dengan demokrasi, Islam adalah agama demokratis dan lain sebagainya. Seperti ungkapan bahwa demokrasi cocok dengan Islam karna demokrasi adalah musyawarah. Hal senada diungkapkan oleh Muhamamd Imarah yang mengungkapkan bahwa antara demokrasi dan *Syuro* menemukan titik pisah dan titik temu sekaligus. Dilihat dari pencapaian tujuan dan sistem yang mengantarkan antara demokrasi dan *Syuro* adalah sama, ia merupakan pengalaman empirik manusia. Pengalaman yang diperoleh demokrasi dengan menciptakan lembaga perwakilan melalui pemilihan juga merupakan perbuatan manusia, hal tersebut juga telah terjadi sejak masa awal berupa berangkat bai'at dan pengamalannya. Demokrasi mempunyai titik pisah sekaligus dengan *Syuro*, demokrasi merupakan kedaulatan prinsip legislatif kepada rakyat, kekuasaan dan begitu juga kedaulatan dalam sistem demokrasi merupakan hak dan wewenang rakyat, sedangkan dalam *Syuro* kedaulatan hukum pada prinsipnya hanya wewenang Allah yang termanifestasikan dalam syari'ah, yang merupakan buatan Allah yang termanifestasi dalam syari'at, bukan hasil upaya manusia. Oleh sebab itu syari'at adalah otoritas hukum sedangkan manusia adalah yang memahami hukum itu. Pembuatan hukum adalah wewenang manusia yang dibatasi dengan hukum Allah.⁵

Menurut penulis, terlihat bahwa Imarah tidak mampu mengambil satu ketetapan apakah demokrasi sama dengan *Syuro* atau tidak, ataupun menetapkan demokrasi adalah *syuro* dan *syuro* adalah demokrasi. Satu hal lagi, menurut penulis, menyamakan antara demokrasi dan *syuro* hanya pada

⁵Muhammad Imarah, *Ma'rakatul baina al Gharbi wal Islami*, terj Musthalah Maufur, *Perang Terminology Islam versus Barat*, Rabbani Press, Jakarta, 1998, hlm 178-183

tatanan konsep saja tidak cukup dan tidak mampu untuk menjawab semua problematika yang ada tanpa melihat bagaimana ralitas dan fakta yang ada di dalam demokrasi, apakah musyawarah dalam demokrasi sama dengan musyawarah Islam? Hal ini jelas berbeda, dan menyelaraskan antara satu wilayah yang berbeda hanya dalam tatanan dan istilah “musyawarah” saja tanpa mempertimbangkan makna mendasar yang ada dibalik kata itu tentu merupakan hal yang tidak benar.

Menurut penulis, *syuro* dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda. *Syuro* artinya meminta pendapat (*Thalab ar ra'y*). Sebaliknya demokrasi adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi undang-undang dan sistem (pemerintahan). Hal ini diperkuat dengan apa yang telah diungkapkan oleh Abdul Qadim Zallum bahwa demokrasi bukanlah *syuro*, karena *syuro* artinya memberikan pendapat, sebaliknya demokrasi sebenarnya merupakan suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi undang-undang dan peraturan yang telah dibuat manusia dengan akal sendiri. Mereka menetapkan ketentuan berdasarkan kemaslahatan yang dipertimbangkan menurut akal.⁶ Dalam demokrasi semua hal dan pengambilan hukum di musyawarahkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan kedudukan hukumnya dengan syari'at. Realitanya, masyarakat demokrasi menjadikan musyawarah mufakat suara terbanyak sebagai nilai dan kebenaran tertinggi. Hasil apapun- kendati isinya

⁶ Abdul Qadim, Zallum, *Ad-Dimuktatayah Nizham al Kufur*. Terj Shiddiq al Jawi, *Demokrasi Sistem Kufur*, Pustaka Thariqul izzah, cet V, Bogor, 2008, hlm 89.

kebatilan- merupakan suara mayoritas, tetap diterima sebagai kebenaran dan dijadikan patokan hukum. Ditambah lagi suara mayoritas tidak mutlak benar. Menurut analisa penulis, walaupun suara mayoritas itu benar, hal itu dikarenakan suara mayoritas dalam hasil musyawarah, bukan karena kebenaran itu sendiri. Inilah yang terjadi dalam demokrasi. Hal ini diperkuat oleh Abu Nashr Muhammad bin Abdillah al Imam, beliau mengatakan seandainya mayoritas anggota majlis -dalam demokrasi- menetapkan satu hukum yang mencocoki syari'at, maka mereka akan berkomitmen dengan hukum tersebut, bukan karena hukum tersebut cocok dengan syariat, akan tetapi dikarenakan ia merupakan suara mayoritas.⁷ Perbedaan yang jelas juga terlihat antara demokrasi dengan *syuro* dalam objek permasalahan yang dimusyawarahkan, dalam demokrasi seluruh hal dan aspek dimusyawarahkan dengan dalil kedaulatan rakyat, sementara dalam Islam yang dimusyawarahkan hanya aspek teknis yang bersifat mubah. Dalam Islam ada hal yang tidak perlu dimusyawarahkan, ada hal yang dikembalikan persoalan kepada yang ahlinya, ada hal yang dikembalikan kepada suara mayoritas, dan suara mayoritas hanya dalam perkara teknis. Dengan demikian jelas, berbeda antara *syuro* dalam demokrasi dengan *syuro* dalam Islam. Dalam pandangan Islam, walaupun ada musyawarah- yang dijadikan dalil oleh pengusung demokrasi- maka musyawarah itu diserahkan kepada orang yang ahli di bidangnya. Kendati demikian hukumnya mubah, bukan wajib-sebagaimana

⁷Abu Nashr Muhammad bin 'Abdillah al Imam, *Tanwir Azh Zhumalat bi Kasyfi Mafasid wa Syubhat al Intikabaat*, terj Abu Muqbil Ahmad Yuswaji, Abu Nizar Arif Mufis, *Menyingkap borok-borok pemilu dan membantah Syubhat para pemujanya*, Darul Hadist, Depok, 2004, hlm 63.

dalam konsep demokrasi. Adapun menyampaikan pendapat, baik kepada penguasa, komandan, itu hanyalah nasihat yang juga diperintahkan oleh syariat. Dengan demikian, menurut penulis sangat jauh perbedaan antara demokrasi dan *syuro* yang memang dianjurkan Islam. Akan tetapi sebagian besar kaum Muslimin berusaha mencoba menyelaraskan antara demokrasi dan *syuro* tanpa menyelami dan mempertimbangkan realita dan aspek mendasar dalam demokrasi. Mereka hanya mencoba menyamakan *Syuro* dan demokrasi hanya pada tatanan kulit saja. Inilah salah satu upaya Barat untuk membuat kaum Muslimin terpecah belah dan membuat kaum Muslimin buta dan kabur terhadap ajaran Agamanya. Upaya menyamakan demokrasi dengan *syuro* adalah perkara yang kabur. Menurut analisa penulis, sesungguhnya perubahan nama itu tidak ada gunanya apabila hakikatnya masih sama. Perubahan nama dengan upaya meyesuaikan Islam dan demokrasi itu tidak akan mampu merubah hakikat demokrasi itu sendiri.⁸ Hal ini juga diperkuat oleh Syaikh Abu Ahmad Ashim al Maqdisi bahwa sesungguhnya mengqiyaskan demokrasinya orang-orang Musyrik dan *Syuronya* orang-orang *Muwahhid* (orang yang bertauhid) dan menamakan majlis *syuro* dengan kebatilan adalah merupakan qiyas batil dan penghamburan rukun-rukunnya. Qiyas semacam ini sama artinya dengan mengqiyaskan antara kesyirikan dengan tauhid, kekafiran dengan iman.⁹

⁸Nabi Bersabda, "Sungguh akan ada sekelompok umatku yang akan mengalalkan *Khamar* dengan cara merubah namanya (Diriwayakan oleh Ahmad dengan Musnadnya dai Ubadah bin Ash Shamit, hadist:2274)

⁹Abu Ahmad Ashim al Maqdisi, *Ad Dimukratyah Dinun*, ter Abu Musa Ath Thayyaar, *Agama Demokrasi*, Kafayeh Jateng, cet II, 2008, hlm, 94-95.

Diantara perbedaan *syuro* dan demokrasi dapat disimpulkan, *Pertama*, *Syuro* adalah sebuah sistem *Manhaj Rabbani*, sedangkan demokrasi adalah sistem buatan manusia yang penuh kelemahan, diselimuti nafsu dan banyak memiliki kesalahan. *Kedua*, *Syuro* adalah syari'at dan hukum Allah, sedangkan demokrasi adalah pengkaburan terhadap syari'at bahkan bertentangan dengan hukumnya. *Ketiga*, *syuro* dilakukan pada masalah yang tidak ada nashya, adapun ketika nash telah ada maka tidak ada *syuro*. Sedangkan demokrasi meremehkan semua permasalahan dan tidak mempertimbangkan nash. Akan tetapi pijakan dijadikan pertimbangan adalah hukum rakyat dalam semua bidang.¹⁰ Dengan demikian jelaslah bahwa demokrasi bukan *syuro* dan *syuro* bukan demokrasi.

Ajaran teokrasi yang pada konsepnya kedaulatan di tangan Tuhan. Pada negara Teokrasi, identik dengan pemusatan kekuasaan pada tokoh tokoh spiritual yang sekaligus sebagai Kepala Negara. Dalam Negara Teokrasi, Kepala Negara yang sekaligus tokoh spiritual, biasanya dianggap sebagai keturunan Dewa, manusia setengah Tuhan, dan manusia pilihan Tuhan, bahkan juga dianggap sebagai reinkarnasi dari orang suci. Dan dalam ajaran teokrasi ini Tuhan tentu tidak pernah salah dan pemimpin tidak pernah salah. Karena mereka orang suci walaupun mereka pada akhirnya menghisap dan menindas rakyat. Hal ini berbeda dengan Khilafah Islam. Negara Khilafah Islam bukan negara Teokrasi, sebab Khalifah (kepala negara) diakui sebagai

¹⁰*Ibid.*, hlm 96. Ini yang berlaku di dalam demokrasi barat, adapun yang berlaku di demokrsi arab, sesungguhnya yang dijadikan pertimbangan pertama dan paling utama adalah Raja atau President. Karena tanpa persetujuan darinya tidak ada gunanya kata-lata dari rakyat. Semua keputusan ada di tangannya. Bukan di tangan syari'at.

manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Sumber hukum Negara Khilafah bukan dari Khalifah, namun bersumber dari Qur'an dan Sunnah.

Khalifah wajib bertindak adil sesuai dengan Syari'at Islam. Undang-undang yang dilegalisasi Khalifah harus bersumber dari Qur'an, Sunnah, dan Ijma' Sahabat. Pembuatan undang-undang harus digali dengan metode yang terperinci yakni ijtihad. Khalifah bukan dipilih Allah, tapi dipilih oleh kaum muslimin melalui bai'at. Bentuk Negara Khilafah Islam bukan Teokrasi, karena kepemimpinan Khalifah tidak terbatas pada masalah moral spiritual. Masalah ekonomi, kesejahteraan, pangan, keamanan adalah masalah masalah yang harus diperhatikan Khalifah. Sistem Khilafah Islam ini telah terbukti selama berabad-abad dalam memberikan kesejahteraan yang maksimal kepada rakyat. Hal ini diperkuat oleh Taqiyuddin an Nabhani yang mengatakan bahwa Khilafah adalah Negara Manusiawi, bukan Teokrasi. Dalam artian, Khalifah tidak berhak berlaku semena-mena kepada Rakyat. Khalifah bisa saja berbuat salah, lupa dan maksiat. Sekalipun demikian, Rasulullah sesungguhnya telah memerintahkan kaum Muslimin agar senantiasa mentaati Khalifah selama memerintah sesuai dengan Islam, tidak melakukan kekufuran dan tidak memerintah dengan maksiat. Atas dasar itu, para Khalifah setelah Rasulullah adalah manusia biasa yang mungkin berbuat salah atau benar, mereka bukanlah orang-orang yang *ma'shum*, maksudnya mereka bukanlah para nabi hingga dikatakan bahwa Khilafah adalah negara

Teokrasi (Daulah Ilahiyah). Akan tetapi Khilafah adalah (Daulah Basyariah) yang memerintah adalah mausia biasa.¹¹

Abu A'la al Maududi¹² dengan konsep Teodemokrasinya mencoba mengkombinasikan antara Teokrasi dan Demokrasi. Secara esensial, konsep theo-demokrasi berarti bahwa Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, akan tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, theo-demokrasi adalah sebuah kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Menurutnya, Sistem politik yang ideal adalah sistem teodemokrasi bukan sistem demokrasi. Teodemokrasi juga merupakan gagasan yang diluncurkan oleh tokoh-tokoh Islam, antara lain Abul A'la al Maududi, Mohammad Natsir dan Yusuf Qaradhawi. Ketiga tokoh ini setuju konsep teodemokrasi dan menolak konsep Teokrasi, sebuah konsep bentuk negara yang lahir dari sejarah kekuasaan gereja. Maududi, Natsir dan Qardhawi mengajukan konsep Teodemokrasi (Natsir menyebutnya

¹¹Taqiyuddin an Nabhani, *Ajhizah ad Daulah al Khilafah*, terj Yahya A.R, *Struktur Negara Khilafah* cet III, HTI Press, Jakarta, 2008, hlm, 77-83.

¹²Abul A'la Al-Maududi (lahir 1903), adalah penggagas konsep Theo Demokrasi, ulama Pakistan yang mendirikan gerakan Islam Jamaat-e-Islami pada tahun 1940-an. Konsep itu dituangkan dalam bukunya yang terkenal *Al-Khilafah wa al-Mulk* (Khilafah dan Kerajaan) yang terbit di Kuwait tahun 1978. Seperti dapat diduga dari istilahnya, konsep theo-demokrasi adalah akomodasi ide theokrasi dengan ide demokrasi. Namun, ini tak berarti al-Maududi menerima secara mutlak konsep theokrasi dan demokrasi ala Barat. Al-Maududi dengan tegas menolak teori kedaulatan rakyat (inti demokrasi), berdasarkan dua alasan. Pertama, karena menurutnya kedaulatan tertinggi adalah di tangan Tuhan. Tuhan sajalah yang berhak menjadi pembuat hukum (law giver). Manusia tidak berhak membuat hukum. Kedua, praktik "kedaulatan rakyat" seringkali justru menjadi omong kosong, karena partisipasi politik rakyat dalam kenyataannya hanya dilakukan setiap empat atau lima tahun sekali saat Pemilu. Sedangkan kendali pemerintahan sehari-hari sesungguhnya berada di tangan segelintir penguasa, yang sekalipun mengatasnamakan rakyat, seringkali malah menindas rakyat demi kepentingan pribadi lihat, [www Hizbut Tahrir/ The House Of Khilafah/ Mengkritisi Konsep Theo Demorkasi](http://www.HizbutTahrir.org) oleh Shiddiq al Jawi, 21 April 2009.

demokrasi Islam), karena melihat ada keliaran dan cacat bawaan sistem demokrasi, seperti yang kita rasakan sekarang.

Menurut penulis, dari uraian sekilas ini, dalam konsep Theo Demokrasi nampak teori "kedaulatan Tuhan" sungguh tak dapat dilepaskan dari konsep theokrasi yang bertentangan dengan Islam. Setidaknya ada tiga poin krusial yang menunjukkan kontradiksi teori "kedaulatan Tuhan" (theokrasi) dengan Islam. *Pertama*, dalam teori kedaulatan Tuhan, penguasa adalah wakil Tuhan di muka bumi. Sedang dalam Islam, seorang khalifah dalam negara Khilafah adalah wakil umat --bukan wakil Tuhan-- dalam urusan kekuasaan dan penerapan hukum-hukum Syariah Islam. *Kedua*, dalam teori kedaulatan Tuhan, penguasa bersifat ma'shum. Sedang dalam Islam seorang khalifah tidak ma'shum. Bisa saja dia berbuat dosa dan kesalahan. Karena itulah, amar ma'ruf nahi munkar disyariatkan. *Ketiga*, dalam teori kedaulatan Tuhan, penguasa atau gerejawan membuat undang-undang atau hukum yang berasal dari dirinya sendirinya, tanpa suatu acuan dan pedoman yang jelas dari wahyu Tuhan. Sedang dalam Islam, penguasa mengadopsi hukum-hukum syara' berdasarkan ijtihad yang sah dengan acuan dan pedoman yang jelas, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Walhasil, adanya kontradiksi tajam antara "kedaulatan Tuhan" (Teokrasi) dan Kedaulatan di tangan Syari'at.

Hal ini diperkuat oleh an Nabhani "kedaulatan di tangan syara' " (as-siyadah li asy-syar'i), bukan kedaulatan di tangan Allah (as-siyadah li-llah),

demikian kejernihan pemikiran. Imam dan Khalifah tidaklah Ma'sum sebagaimana ajaran Teokrasi.¹³

Dengan demikian jelas pencampuran antara Teokrasi dan Demokrasi adalah bentuk pengkaburan, di satu sisi kedaulatan di tangan Tuhan dan Di satu sisi kedaulatan di tangan syaria'at. Penggunaan kedua Istilah yang ini digandengkan dengan Islam adalah sebuah kerancuan dan akan memperumit makna hakikatnya.¹⁴ Disatu sisi Kedaulatan di tangan Tuhan, di satu sisi di tangan Rakyat. Ini jelas bentuk pengkaburan yang tidak jelas kedudukannya.

Dengan demikian, jelas bahwa Islam tidak ada solusi lain untuk mengatasi seluruh problematika umat melainkan kembali kepada Syari'ah yang murni. Dan kemurnian syari'ah ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya pelaksana dalam bentuk negara Khilafah sebagai institusi pelaksana

¹³ Teori "kedaulatan Tuhan" tak dapat dilepaskan dari konsep theokrasi yang berkembang di Barat pada Abad Pertengahan (abad ke-5 s/d ke-15 M). Menurut The Concise Oxford Dictionary, hal. 1321, istilah theokrasi dikaitkan dengan pemerintahan atau negara yang diperintah oleh Tuhan, baik secara langsung maupun melalui kelas kependetaan (Asshidique, 1995:23). Dalam theokrasi Barat ini, konsep "kedaulatan Tuhan" mempunyai arti bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah Tuhan. Selanjutnya, Tuhan mewakilkan kekuasaan-Nya kepada raja atau Paus . Oleh karena mewakili Tuhan, maka segala perilaku raja atau Paus selalu terjaga dari kesalahan atau suci (ma'shum, infallible). Jadi, negara theokrasi --yang menjalankan teori kedaulatan Tuhan-- merupakan negara yang dipimpin oleh gerejawan atau raja yang menganggap segala perilaku mereka terjaga dari kesalahan dan suci. Menurut Imam Khomeini, tokoh kaum Syiah yang sangat terpengaruh dengan konsep theokrasi Eropa, kesucian para pemimpin/penguasa, berada pada martabat yang sangat tinggi yang bahkan tak bisa dijangkau oleh para nabi maupun malaikat muqarrabin lihat Al-Imam Al-Khomeini, "Al-Wilayah At-Takwiniyah", Al-Hukumah Al-Islamiyah, hal. 52). dikutip dari lihat www Hizbut Tahrir/ The House Of Khilafah/ Mengkritisi Konsep Theo Demokrasi oleh Shiddiq al Jawi, 21 April 2009.

¹⁴ Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, jika suatu istilah asing mempunyai makna yang bertentangan dengan Islam, istilah itu tidak boleh digunakan. Sebaliknya jika maknanya terdapat dalam khazanah pemikiran Islam, istilah tersebut boleh digunakan .lihat www Hizbut Tahrir/ The House Of Khilafah/ Mengkritisi Konsep Theo Demokrasi oleh Shiddiq al Jawi, 21 April 2009. Dalam hal ini, Islam telah melarang umatnya untuk menggunakan istilah-istilah yang menimbulkan kerancuan, apalagi kerancuan yang menghasilkan pengertian-pengertian yang bertolak belakang antara pengertian yang Islami dan yang tidak Islami. Allah SWT berfirman : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad), 'Raa'ina', tetapi katakanlah 'Unzhurna' dan 'dengarlah'. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih." (QS Al Baqarah : 104)

Syari'ah. Untuk mengatasi segala problematika ini, *al Khilafah alaa Minhaj an Nubuwwah* (Pemerintahan menurut nabi) telah sepakati mayoritas. Sistem Khilafah adalah sistem yang unik yang berbeda dengan sistem pemerintahan manapun di dunia. Pada sub sistem tertentu mungkin ada yang sama dengan sistem lain. Tetapi secara esensial ia berbeda karena asal Khilafah ini ialah dari Allah dan Rasul. Pendirian Khilafah merupakan kewajiban yang sangat urgen dan fundamental di tengah-tengah pemikiran ummat yang telah dikebiri oleh Barat. Ummat tidak akan mampu melawan negara adidaya sekalipun jika tidak ada pertahanan dan institusi yang dinamakan Khilafah yang merupakan wadah atau institusi pelaksanaan syari'at murni. Berangkat dari seluruh permasalahan yang ada, saatnyalah kaum Muslimin bergerak dan maju dengan membangun sebuah negara Islam yang murni dengan penerapan seluruh hukum sesuai Islam dan Syari'atnya— tidak merupakan manipulasi agama dengan aturan yang dibuat manusia- yang meletakkan kedaulatan hanya di tangan syari'at, kekuasaan di tangan ummat dan berada dalam naungan Aqidah Islam yang mematuhi semua keterikatan Syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Demokrasi sangat bertentangan dengan Islam. Hal ini terlihat dari segi pengertian, sumber dan latar belakangnya; dari segi akidah yang melahirkannya dan asas- asas serta dari aspek-aspek yang harus diwujudkan agar rakyat dapat melaksanakan demokrasi.

Menurut Taqiyuddin an Nabhani, dari segi pengertiannya terlihat bahwa demokrasi meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. Inilah cacat terbesar dalam demokrasi. Rakyat dengan segala kekurangan dipaksa untuk menentukan sendiri hidupnya dan jalannya pemerintahan. Sementara di dalam Islam kedaulatan berada di tangan syari'at dan manusia tidak boleh merumuskan hukum berdasarkan hawa nafsunya. Dilihat dari latar belakang munculnya demokrasi, jelas bahwa demokrasi bersumber dari manusia berdasarkan kompromi (jalan tengah) antara filosof dan para cendekiawan terhadap gerejawan dengan mengambil jalan tengah yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Dilihat dari akidah yang mendasarinya, tentu demokrasi berasal dari akidah sekularisme sementara Islam, akidah berasal dari wahyu Allah.

Dilihat dari cara pengambilan hukum, demokrasi meletakkan musyawarah suara mayoritas sebagai patokan utama dalam pengambilan sebuah hukum tanpa mempertimbangkan syari'at, sementara penetapan hukum dalam Islam bukan berdasar suara mayoritas tetapi dari kebenaran itu sendiri yang bersumber dari nash.

Dalam demokrasi adanya jaminan kebebasan umum yang sangat bertentangan dengan Islam. Islam dibatasi dengan ikatan aturan yang mengikatnya, tidak ada kebebasan dalam Islam. Dalam Islam dikenal adanya keterikatan-keterikatan dengan hukum syara' yang diwajibkan kepada kaum Muslim untuk mematuhi keterikatan tersebut.

Dan untuk mewujudkan aturan Islam yang bertentangan dengan syari'at tersebut maka harus ada pendamping (negara) yang bertugas melaksanakan syari'ah tersebut, sebuah institusi pelaksana Syari'ah, yaitu Khilafah Rasyidah yang meletakkan kedaulatan berada ditangan syari'at, kekuasaan di tangan ummat dan segenap aturan yang senantiasa mengatur seluruh aspek kehidupan ummat yang bersumber dari Syari'at.

B. Saran

Demikianlah skripsi ini penulis buat, hal yang menjadi saran penulis adalah:

1. Skripsi ini dibuat disamping sebagai kewajiban untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, adalah mengajak seluruh para generasi muda Islam dan seluruh kaum Muslimin untuk berjuang dan berdakwah mewujudkan Khilafah Islam sebagai Institusi pelaksana Syari'ah demi kelangsungan kehidupan Islam.
2. Mengajak para pemuka agama dan masyarakat untuk membuka mata terhadap racun pemikiran Barat, termasuk Demokrasi dan menyaring apa-apa yang sesuai dengan Islam dan apa-apa yang tidak boleh di ambil yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

3. Penulis mengajak kepada mahasiswa dan para pengemban dakwah untuk melakukan kajian penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan konsep Khilafah Islamiah guna wawasan ke Islaman dan pada akhirnya cita-cita kaum Muslimin demi terwujudnya Khilafah Islamiah bisa dibuktikan.

Seandainya dalam penelitian dan penulisan ini terdapat kesalahan dan kekurangan maka penulis sangat berharap masukan dan kritiknya demi kelengkapan isi dari skripsi ini, kesalahan dan kekurangan hanyalah dari penulis yang *Faqir* akan ilmu sedangkan Sang Maha kaya akan ilmu dan kebenaran hanyalah Allah SWT.

Demikian skripsi ini diuraikan sebatas kemampuan penulis, semoga banyak manfaatnya. *Amin ya Rabbal 'Almaiin.*

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Husein, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*, Pustaka Thoriqul Izzah, Bogor, 2002.
- Abdurrahman, Hafidh, *Islam Politik dan Spiritual*, Lisan al Haq, Singapore, 1998.
- Ahmad, Winarno, *Dasar dan Tehnik Riset*, Tarsito, Bandung, 1978.
- Al Fakri, Fahmi Husein, *Islam mulai Akar ke Daunnya*, BKIM IPB Press, Bogor, 2002.
- Al Khalidi, Mahmud, *Zawaid Nizham al Hukm Fil Islam*, Dar al Buhuts al ‘ilmiyyah, Kuwait, 1980.
- Al Wa’ie, *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Demokrasi Sistem Kufur*, No 24 Tahun IX, 1-30 April 2009.
- Al Wa’ie, *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Menggugat 56 Tahun PBB; Demokrasi Peradaban Sampah*, No 14 Tahun II, 1-31 Oktober 2001.
- Al Wa’ie, *Media Politik dan Dakwah; Membangun kesadaran Ummat; Membumikan al Qur’an dengan Formalisasi Syari’ah; Mengenal Syaikh Taqiyuddin an Nabhani; Pendiri Hizbut Tahrir* (Bagian I), No 74 Tahun VII, 1-31 Oktober 2006.
- Al Wa’ie; *Media Politik dan Dakwah ; Membangun Kesadaran Ummat; Aktualisasi Hijrah*, No. 89 Tahun. VIII, 1-31 Januari, 2008.
- Al Wai’e, *Media Politik dan Dakwah; Membangun kesadaran Ummat; Penjajahan Melalui Undang-Undang*, No 70 Tahun VI, 1-30 Juni 2006.
- Al Wai’e, *Media Politik dan Dakwah; Membangun Kesadaran Ummat; Mengenal ; Isu Gender perlu diwaspadai; Syaikh Taqiyuddin an Nabhani; Pendiri Hizbut Tahrir* (Bagian II), No 75 Tahun VIII, 1-30 November 2006.
- Al Wai’e, *Media Politik dan dakwah; Membangun Kesadaran Umat; Hizbut Tahrir; Al Khilafah, dan Syari’ah*, No. 55., Edisi Khusus, Maret 2005.

- Al-Maududi, Abu A'la, *Nazdariyah al Islam as Siyasa*, Terj ,Gema Insani Pers, Jakarta,1991.
- An Nabhani, Taqiyuddin, *Ajhizah ad Daulah al Khilafah*, terj Yahya A.R, *Struktur Negara Khilafah*, HTI Press cet III, Jakarta, 2008.
- An- Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Muhammad Maghfur Wachid, Risalah Gusti cet II, Surabaya, 1996.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *At-Takatul al Hizbiy*, terj Zakaria, Labib, dkk., *Pembentukan Partai Politik Islam*, HTI Press cet II, Jakarta, 2007.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Ad-Daulah al-Islamiyah*, terj, Abu Amin, dkk, Beirut, Da al-Ummah,1994.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Al Syahshiyah al Islamiyah*, terj Zakia Ahmad, *Kepribadian Islam*, HTI Press, Jakarta, 2008.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *An- Nizham Al Ijtima'I fi Al Islam*, terj. M Nashir dkk., *Sistem Pergaulan dalam Islam*, HTI P ress, cet IV Jakarta, 2009.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Dukhul Mujtama'*, terj Zakia, Hizbut Tahrir, Alquds, 1958.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Mafahim Hizbut Tahrir*, terj Abdullah, HTI Pess cet III, Jakarta, 2007.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nizham al Islam*, terj Abu Amin, dkk., *Perturan Hidup dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah cet III, Bogor, 2003.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nizhamul al-Iqtishadi fi al-Islam*, terj, Dar Ummah, Bairut, 1991.
- An-Nabhani, Yusuf, *Jami' Karamat al Auliya'*, terj Mustafha al Babi al Halabi, Kairo, 1962.
- An-Nabhani,Taqiyuddin, *Nizhamul Islam*. terj Mansyurat Hizbut Tahrir cet V, Al Quds, 1953.
- Anonim, *Khilafah is The Answer*, terj Abu Faiz, *Khilafah adalah Solusinya*, Pustaka Thoriqul Izzah, Bogor, 2003.

- Ashim, Abu Ahmad al Maqdisi, *Ad Dimukratyah Dinun*, ter Abu Musa Ath Thayyaar, *Agama Demokrasi*, Kafayeh cet II, Jateng, 2008.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama cet V, Jakarta, 2005.
- Bakeer, Anton, dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Bulletin mahasiswa, edisi 9/IV-Y2K9, *Membangkitkan Pemuda dengan Visi : Syari'ah dan Khilafah*.
- Eickelman, Dale F dan James Picatori, *Ekspresi Politik*, terj Rofik Suhud, Mizan, Bandung, 1998.
- Fuad, Abu, *37 Soal Jawab tentang Ekonomi, Politik dan Dakwah Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995.
- Mayo, Hendri B, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Dari Masjidil Aqsha menuju Khilafah, sejarah awal perjuangan Hizbut Tahrir*, HTI Press, Kantor Penerangan Hizbut Tahrir, 2006.
- <http://www.al-islam.or.id/misc/biografi.htm> atau www.hizbut-tahrir.or.id
- <http://salafi.or.id>
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2007/05/20/syaikh-abdul-qadim-zallum-amir-hizbut-tahrir-kedua>
- <http://wordpress.com>
- Imarah, Muhammad, *Ma'rakatul baina al Gharbi wal Islami*, terj Musthalah Maufur, *Perang Terminology Islam versus Barat*, Rabbani Press, Jakarta, 1998.
- John, M Echols dan Hasan sabhily, *Kamus Inggris-Indonesia*, tp Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1976.

- Mahfudh, Muhammad, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cet II, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Manik, Edi Sabara, *Bai'at Perspektif Taqiyuddin an Nabhani*,. Skripsi Sarjana. Riau, UIN SUSKA RIAU, 2004.
- Media Ummat; *Memperjuangkan Kehidupan Islam, Kabinet Baru, Derita Rakyat*, Edisi 22, 18 Dzulqaidah 1430 H/ 23 Oktober- 5 November 2009.
- Mufrodi, Ali, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Logos, Jakarta, 1997.
- Aman, Muhammad bin Ali al Jamie, *Haqiqatu al Dimiqratiyyati wa Annaha Laisat min al Islam*, terj Saiful Islam, *Demokrasi Murni Bukan ajaran dari Islam*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 2000.
- Muhammad, Abu Nashr bin 'Abdillah al Imam, *Tanwir Azh Zhumalat bi Kasyfi Mafasid wa Syubhat al Intikabaat*, terj Abu Muqbil Ahmad Yuswaji, Abu Nizar Arif Mufis, *Menyingkap borok-borok pemilu dan membantah Syubhat para pemujanya*, Darul Hadist, Depok, 2004.
- Najib, Emha Ainun, *Demokrasi la raiba fih*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Rasyid, Daud, *Pembaharuan dalam Islam dan Orientalisme Dalam Sorotan*, Usamah Press, Jakarta, 2003.
- Samarah, Ihsan, *Maqhum al- Adalah al Ijtima'iyah fi al-Fikri al- Islami al Mua'shir*, terj Muhammad Shiddiq al-Jawi, *Syeikh Taqiyuddin an Nabhani, Meneropong perjalanan spiritual dan dakwahnya*, al Azhar Press cet II, Bogor, 2003.
- Samarah, Ihsan, *Syaikh Taqiyuddin an Nabhani ; Meneropong perjalanan spiritual dan dakwahnya*, Al Azhar Press, Bogor, 2003.
- Shalih, Hafizh, *Ad Dimuqrathiyah wa Hukm al Islam fi ha*, terj Yahya Abdurrahman, *Mengadili Demokrasi*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2005.
- Soemanto, Wasti, *Pedoman Skripsi Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Sudarto, *Metodologi penelitian Filsafat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Syabab HT, *The Method to Re- Establish the Khilafah*, terj Ramadhan Adi, *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2004.

- Thoha, Mifthah, *Birokrasi dan politik di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007.
- Tim ICCE UIN JAKARTA, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Wadjiji, Farid & Shiddiq al Jawi *et.al*, *Ilusi Negara Demokrasi*, al Azhar Press, Bogor, 2009.
- Wahid, Abdurrahman, *Membangun Demokrasi*, Rosda, Bandung, 2000.
- www Hizbut Tahrir/ The House Of Khilafah/ Mengkritisi Konsep Theo Demorkasi oleh Shiddiq al Jawi, 21 April 2009.
- www./HTI/syeikh-taqiuddin-nabhani-pendiri-atau.html
- Zallum, Abdul Qadim, *Ad-Dimuktatiyah Nizham al Kufr*. Terj Shiddiq al Jawi, *Demokrasi Sistem Kufur*, Pustaka Thariqul izzah cet V, Bogor, 2008.
- Zallum, Abdul Qadim, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, terj Maghfur, *Sistem Pemerintahan Islam*, Al izzah, Bangil, 2002.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

NAMA : NELLA LUCKY

T/TGL LAHIR : PEKANBARU, 1 NOVEMBER 1988

ALAMAT : JL KARYASARI 45, TANGKERANG SELATAN,
BUKIT RAYA, PEKANBARU, RIAU

TELP/HP : 081365713229/085278444345

E-m@il : nella_lucky @yahoo.com

JENJANG PENDIDIKAN : SD OII Pekanbaru (TAMAT THN 2000)

MTS Dar-el Hikmah Pekanbaru (TAMAT THN 2003)

MA Dar_el Hikmah Pekanbaru (TAMAT THN 2006)

S1 UIN SUSKA RIAU (TAMAT THN 2010)

MOTO : Bertindak “ Seperti” Berpikir dan Berpikir “Seperti”
Bertindak